

## PARIWISATA HALAL INDONESIA

### Penanggung Jawab:

Dr. (HC) KH Muhyiddin Junaidi Lc, M.A.  
Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag.

### Tim Pengarah:

Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, M.A.  
Ir. M. Nadrattuzaman Hosen, PhD.,  
Dr. KH. Muhammad Zaitun Rasmin, Lc., M.A.,  
Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A.,  
Dr. M. Bukhari Muslim, Dr. Sumunar Jati,  
Prof. Dr. Endang Soetari Ad, M.Si., Drs. H. Ahmad Zubaidi, MA

### Tim Penulis:

Hj. Amirah Ahmad Nahrawi, Lc., M.Ec., M.E.Sy.,  
Hj. N Fitri Ani Gayo, M. Si han, Arif Fakhruddin, M.A.,  
Dr. H. Burhanuddin Amak, Dr. Triyo Supriyatno,  
Atmo Prawiro, M.E.Sy.

### Tim Editor:

Dr. H. Shabah S.M. Syamsi, M.A.,  
Dr. Nadjematul Faizah Hosen, Dr. Achmad Ubaedillah, M.A.

### Tim Kontributor Data:

Jayadi Hasan, Lc, MA, Dra. Hj. Machsana Asnawi, M.Si.,  
H. Mohammad Ahmad Hasanuddin, Lc., H. Malhan SA, S.E.,  
H. M. Zein Mustamir, Lc.

### Penyelarasan Akhir:

Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, M.A.

Cetakan I: November 2020

Diterbitkan oleh  
**Q-MEDIA**

Dabag No. 52C Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

ISBN: 978-602-6213-43-3

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



## MAJELIS ULAMA INDONESIA LEMBAGA PENTASHIH BUKU DAN KONTEN KEISLAMAN (LPBKI MUI)

### SERTIFIKAT TASHIH

No. 017-0101-05112020

Setelah melakukan proses tashih, kajian dan verifikasi konten keislaman secara mendalam, dengan memohon hidayah dan inayah Allah SWT, menyatakan:

Nama : Pariwisata Halal Indonesia  
Jenis : Buku Ilmiah  
Penerbit/Perusahaan : Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Majelis Ulama Indonesia  
Alamat : Jl. Proklamasi No 51 Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat  
Masa Berlaku : 3 tahun (sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat)

### TELAH SESUAI DENGAN STANDARD TASHIH BUKU DAN KONTEN KEISLAMAN

Sertifikat ini berlaku selama kontennya tetap mengacu dan sesuai dengan keputusan Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman Majelis Ulama Indonesia (LPBKI-MUI)

Jakarta, 19 Rabiul Awal 1442 H/ 5 November 2020 M

### LEMBAGA PENTASHIH BUKU DAN KONTEN KEISLAMAN (LPBKI MUI) MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua

Prof. DR. H. Endang Soetari AD, MS.i,

Sekretaris



Arif Fahrudin, M.Ag,

Mengetahui,  
DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Wakil Ketua Umum

Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si

Sekretaris Jenderal



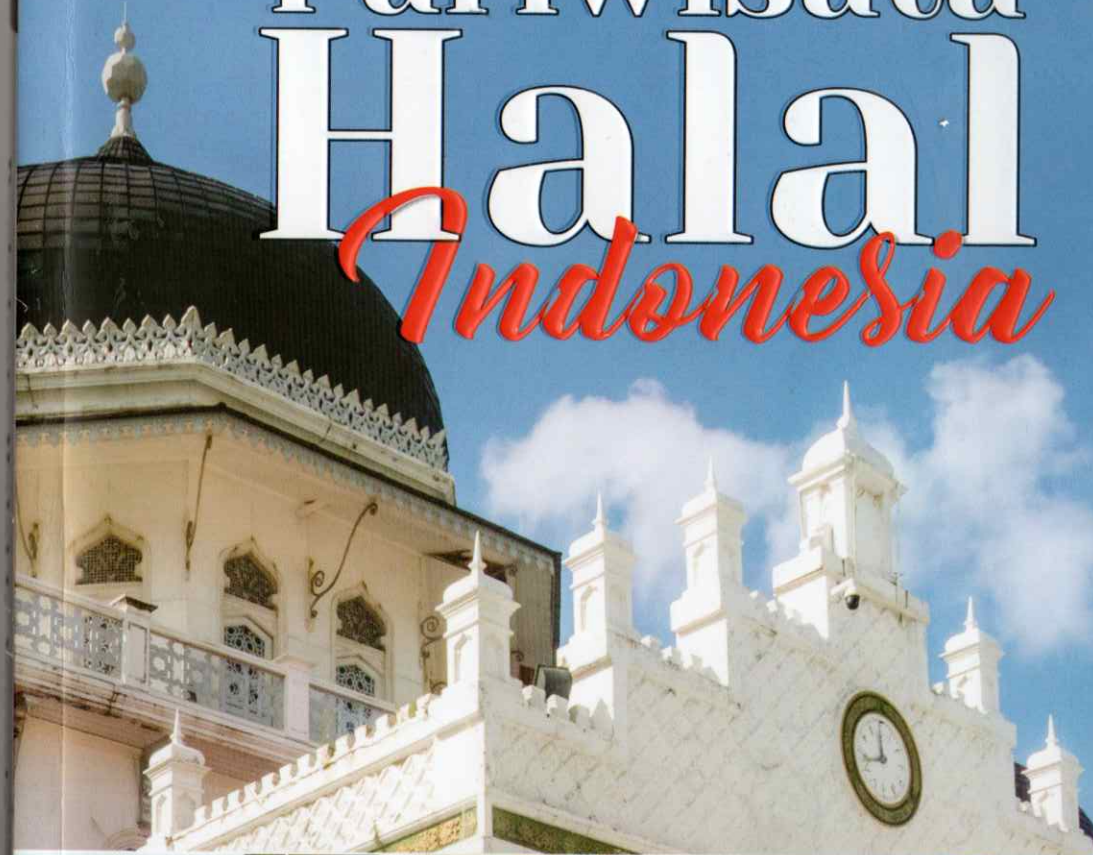
DR. Anwar Abbas, M.M, M.Ag





— TIM PENULIS MUI PUSAT —

# Pariwisata Halal *Indonesia*



Tim Penulis MUI Pusat

Pariwisata  
Halal  
*Indonesia*





**KATA SAMBUTAN**

**DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim

*Alhamdulillah Rabbi 'Alamin.* Puji syukur hanya kepada Sang Pemilik Alam Semesta Allah Swt yang telah menganugerahkan hidayah, taufik, dan inayah-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw.

Perkembangan pariwisata halal dunia di era 4.0 ini mengalami perubahan sangat cepat. Dengan kecanggihan teknologi, maka lokasi atau obyek destinasi wisata di penjuru dunia ini dengan mudah dapat terakses termasuk objek-objek wisata halal Indonesia.

Banyaknya sektor industri di dalam pariwisata halal mengakibatkan penambahan devisa bagi negara, pembukaan lapangan pekerjaan lebih banyak, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu tidaklah diragukan lagi, bahwa pariwisata halal mampu menumbuhkan dan memiliki potensi dalam pemeratakan perekonomian nasional.

Pariwisata halal juga salah satu media dakwah yang mampu menyatukan perbedaan. Pertemuan ragam budaya yang berbeda antara masyarakat lokal pada suatu destinasi pariwisata halal dengan wisatawan domestik ataupun



wisatawan mancanegara mengharuskan dakwah *Wasathiyatul Islam* terlibat di dalamnya. Pertemuan budaya yang berbeda pada pariwisata mampu disatukan dengan dakwah wasathiyatul Islam Indonesia yang di dalamnya menanamkan keramahtamahan, sopan santun, kebersamaan, gotong-royong, dan saling menghormati antara satu dengan yang lainnya.

Capaian prestasi pariwisata halal selama beberapa tahun terakhir selalu dimenangkan oleh negara-negara seperti Turki, Yordania dan Malaysia. Namun seiring dengan semakin meningkatnya atensi pemerintah dan masyarakat serta nilai lebih yang dimiliki Indonesia seperti mayoritas Muslim yang ramah, fasilitas yang mulai membaik dan potensi alam yang luar biasa indah pada akhirnya Indonesia mampu bersaing. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Global Muslim Travel Index (GMTI) 2018 Indonesia adalah salah satu negara destinasi pariwisata halal favorit di dunia. Pada beberapa tahun terakhir pariwisata halal Indonesia banyak mendapatkan penghargaan atas pencapaiannya, seperti penghargaan *The World Halal Travel Summit & Exhibition* pada tahun 2015 di Uni Emirat Arab (UEA), *World Halal Tourism Awards* (WHAT) di Abu Dhabi pada tahun 2016 – 2018, kemudian pada tahun 2019 GMTI menempatkan Indonesia pada posisi terbaik ke-1 di dunia dalam hal destinasi pariwisata halalnya.

Maka, dengan hadirnya buku ini MUI berupaya mengenalkan pariwisata halal Indonesia yang memiliki potensi cukup membanggakan tersebut. Kearifan lokal seperti budaya santun, gotong-royong, dan Islam yang ramah

sebagaimana termanifestasi melalui *Wasathiyatul Islam* Indonesia adalah sumber daya utama dalam membangun pariwisata halal Indonesia. Harapan kami penerbitan buku pariwisata halal Indonesia ini tidak sekadar untuk memberikan informasi keindahan alam dan budaya Indonesia semata. Namun juga memberikan pemahaman tentang pariwisata halal Indonesia yang unik dan menakjubkan bagi wisatawan yang berkunjung. Buku ini diharapkan menjadi panduan awal bagi wisatawan yang ingin mendalami lebih dalam lagi tentang wisata halal Indonesia yang tentu memiliki banyak perbedaan dengan destinasi wisata halal di negara lain

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menyampaikan apresiasi yang tinggi atas upaya penulisan buku pariwisata halal Indonesia yang diinisiasi oleh Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional (HLN-KL) dan Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman (LPBKI) MUI. Semoga buku ini bermanfaat bagi peningkatan prestasi pariwisata halal Indonesia dan sekaligus juga syiar dakwah *Wasathiyatul Islam*.

16 Rabiul Awwal 1442 H  
Jakarta, 2 November 2020 M

Dewan Pimpinan  
Majelis Ulama Indonesia  
Sekretaris Jenderal

Ketua Umum



Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin



Sekretaris Jenderal

Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag

# KATA PENGANTAR

## KOMISI HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL MUI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

**A**lhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah Swt atas segala nikmat-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan teruntuk Rasulullah Saw Sang Pembawa Risalah Islam untuk rahmat seluruh alam.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai tenda besar umat Islam Indonesia memiliki orientasi *irsyadiyah* dan *istijabiyah*. *Irsyadiyah* adalah upaya mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan *amar ma'ruf naby munkar* dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan MUI dirancang untuk selalu berdimensi dakwah dan tuntunan.



*Istijabiyah* adalah MUI senantiasa memberikan jawaban positif dan responsif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (*'amal salib*) dalam semangat berkompetisi dalam kebaikan (*istibaq fil kbairat*).

Sebagai Negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia patut disebut sebagai *Prototype* Negara Damai (*darus salam*) di tengah kondisi dan situasi Negara-negara Islam dan berpenduduk muslim lainnya yang notabene sedang berada dalam situasi ketegangan, konflik, bahkan peperangan. Padahal, dari sisi potensi ketegangan, Indonesia sebagai Negara-bangsa memiliki level pluralitas yang sangat tinggi karena ragam agama, keyakinan, suku, adat, dan Bahasa. Jika bangsa Indonesia tidak secara cerdas dan dewasa dalam merajut pluralitas dan diversitas tersebut bisa berpotensi terjerembab ke jurang perpecahan dan peperangan. Namun, Indonesia mampu merawat pluralitas dan diversitas tersebut dengan baik dan penuh komitmen persatuan (*unity in diversity*). Oleh karenanya, Indonesia pun banyak diharapkan oleh dunia internasional untuk memainkan peran aktif sebagai penjaga prakarsa perdamaian (*peace keeper*) tidak hanya bagi kawasan Negara-negara muslim saja melainkan juga kawasan lainnya secara lebih luas.

Hal lain yang juga semakin menambah posisi strategis Indonesia sebagai *prototype* Negara Damai di atas adalah tentang Pariwisata halal. Sebab, pariwisata halal juga dapat diposisikan sebagai Dakwah Damai dalam mempromosikan

destinasi wisata Indonesia sekaligus wajah Wasathiyatul Islam ke kancah internasional. Kedua tema tersebut saling terkait, terhubung, dan menunjang sebagai satu kesatuan utuh wajah Islam Indonesia yang ramah.

Dalam kerangka orientasi tersebut, Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Majelis Ulama Indonesia (HLNKI-MUI) diberi tugas oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) untuk mendiplomasikan pandangan dan kiprah MUI dalam praktik Wasathiyatul Islam dan Pariwisata Halal Indonesia ke level internasional. Maka, sebagai langkah awal, HLNKI-MUI menghadirkan dua buku yang berjudul *Peran MUI dalam Praktik Wasathiyatul Islam dan Pariwisata Halal Indonesia*. Inshaallah pada tahap berikutnya, buku ini akan diterjemahkan ke dalam bahasa internasional agar MUI semakin kontributif dalam dinamika pemikiran dunia internasional, dan dunia internasional dapat mengambil hikmah positif dari capaian positif Indonesia.

Sebagai sebuah karya akademik tentunya buku ini tidak luput dari alpa dan kekurangan. Maka, kami sangat membuka diri apabila ada kritik dan saran konstruktif untuk semakin meningkatkan kualitas karya ini dan kemanfaatannya untuk umat.

Terima kasih kami haturkan kepada segenap pihak yang berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung atas terbitnya buku ini. Kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia juga kami sampaikan terima kasih dan takzim kami

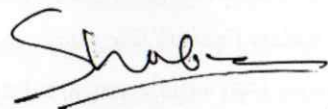


atas bimbingan dan arahnya dalam penyusunan buku ini. Semoga Allah Swt senantiasa mencurahkan bimbingan dan rahmat-Nya untuk kita semua.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

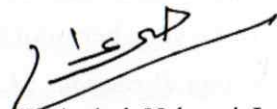
Jakarta, 2 November 2020  
Komisi Hubungan Luar Negeri  
dan Kerjasama Internasional  
Majelis Ulama Indonesia

Ketua



Dr. KH. Shabahussurur Syamsi, MA

Sekretaris



Hj. Amirah Nahrawi, Lc,  
M.Ec, M.E.Sy

# PENGANTAR TIM PENULIS

**A**lhamdulillah, penyusunan buku Pariwisata Halal Indonesia telah berhasil dirampungkan. Keberadaan alam dan warisan situs sejarah yang luar biasa indah, budaya yang beragam serta masyarakat Muslim Indonesia toleran yang tergambar dalam karakter washatiyatul Islam Indonesia adalah sumber utama kearifan lokal pariwisata halal yang menyebar pada destinasi pariwisata di Indonesia. Menggambarkan karakteristik pariwisata halal Indonesia dalam kacamata MUI adalah sebuah gagasan yang menarik dan paling relevan untuk memotret keragaman sosial, budaya dan agama di Indonesia. Keragaman Itu sebagaimana telah



digambarkan oleh MUI dalam mewadahi corak ormas Islam yang berbeda. Karena pengalaman dalam kultur lembaga MUI, maka lembaga ini mampu mendesain pariwisata halal Indonesia dengan menggabungkan keberagaman Islam Indonesia dan kearifan lokal Pariwisata Indonesia yang kompleks.

Penerbitan buku pariwisata halal Indonesia ini diarahkan untuk tidak sekedar memberikan informasi keindahan alam dan budaya Indonesia semata, namun juga memberikan pemahaman tentang desain pariwisata halal Indonesia yang unik dan menarik serta pengalaman yang menakjubkan bagi wisatawan yang berkunjung ke Indonesia.

Sebagai penutup, kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam memberikan data dan informasi terkait dengan penyusunan atau penerbitan buku ini. Semoga Allah SWT memberikan pahala kepada kepada kita semua, dan semoga buku ini benar-benar memiliki keberkahan dan kemanfaatan bagi siapapun yang membacanya, khususnya keberkahan juga untuk negeri kita yang aman, nyaman dan damai ini. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Jakarta, 7 November 2020  
Atas nama Tim Penulis,

**Atmo Prawiro**

# DAFTAR ISI

Sertifikat Tashih.....	iii
Kata Sambutan Dewan Pimpinan MUI .....	v
Kata Pengantar Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional MUI .....	ix
Pengantar Tim Penulis.....	xiii
Daftar Isi .....	xv
Bab I Konsep Dasar Wisata Halal .....	1
A. Pengertian .....	2
B. Wisata Halal Penunjang Ekonomi Nasional .....	7
C. Produk-Produk Halal .....	11
Bab II Landasan Pengembangan Wisata Halal.....	17
A. Filosofi Wisata Halal .....	17
B. Dasar Ajaran Agama .....	22
C. Tokoh-Tokoh Wisatawan dalam Sejarah Islam .....	26



D. Undang-Undang dan Kebijakan Pemerintah .	31
E. Kebijakan Dasar MUI .....	36
Bab III Potensi Wisata Halal.....	41
A. Demand Wisata Halal Global .....	41
B. Demand Wisata Halal Nasional .....	45
C. Objek Wisata Halal Nasional .....	51
1. Wisata Alam .....	52
2. Wisata Kuliner .....	58
3. Wisata Religi.....	64
4. Wisata Pendidikan Islam .....	77
Bab IV Peluang Wisata Halal .....	83
A. Sumber Daya Alam .....	84
B. Sumber Daya Manusia Dan Budaya .....	88
C. Kehidupan Sosial Agama.....	91
D. Kebijakan Pemerintah .....	97
E. Pasar Global .....	103
Bab V Pengembangan Wisata Halal.....	107
A. Penguatan Pemihakan Pemerintah .....	108
B. Pengembangan Infrastruktur .....	112
C. Capacity Building .....	116
D. Partisipasi Masyarakat.....	119
E. Literasi Wisata Halal .....	128
F. Peran Bank Indonesia, KNKS dan Bank Syariah .....	134
Bab VI Refleksi.....	141
Daftar Referensi.....	145
Glosarium .....	153
Daftar Indeks .....	159

## Daftar Gambar

Gambar 1. Sektor Perkembangan Industri Halal.....	14
Gambar 2. GDP Growth Compared With Other Sectors, 2018.....	42
Gambar 3. Negara-negara tujuan pariwisata dunia, baik negara OKI maupun Non-OKI .....	44
Gambar 4. Trend Wisata Halal Indonesia.....	48
Gambar 5. Perjalanan Muslim Milenial .....	49
Gambar 6. Taman Bunaken Sulawesi Utara.....	54
Gambar 7. Raja Ampat Papua.....	55
Gambar 8. Gunung Bromo Tengger Jawa Timur .....	56
Gambar 9. Gunung Tangkuban Parahu Jawa Barat....	57
Gambar 10. Kuliner Khas Indonesia .....	60
Gambar 11. Masjid Istiqlal Jakarta dan Masjid Agung Jawa Tengah.....	65
Gambar 12. Masjid Baiturahman Aceh .....	70
Gambar 13. Keraton Yogyakarta.....	71
Gambar 14. Istana Maimun Medan .....	72
Gambar 15. Keraton Kasepuhan Cirebon.....	73
Gambar 16. Makam Walisongo.....	73
Gambar 17. Pendidikan Islam Pesantren Amanatul Umah Jawa Timur.....	80
Gambar 18. Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur	80
Gambar 19. Wonderful Ramadan in Aceh.....	125
Gambar 20. Pesona Khazanah Ramadhan 2019 .....	126
Gambar 21. Peran Bank Indonesia .....	135
Gambar 22. Peran KNKS .....	139



## Daftar Tabel

Tabel 1	Kunjungan Wisatawan Asing (Negara Non-OKI) Terbanyak 2014-2018	9
Tabel 2	Kunjungan Wisatawan Asing (Negara OKI) Terbanyak 2014-2018 .....	9
Tabel 3	10 Produk Halal.....	12
Tabel 4	Daftar Travel & Tourism Countries Power Ranking per 2017 .....	46

## Bab I

# KONSEP DASAR WISATA HALAL

**P**erkembangan industri halal dapat dikatakan cukup pesat, baik di negara mayoritas Muslim maupun non-Muslim. Hal ini dikarenakan permintaan akan produk halal di seluruh dunia semakin meningkat. Bahkan terdapat beberapa sektor dari *halal lifestyle* (gaya hidup halal) yang memberikan kontribusi cukup besar dalam perkembangan perekonomian dunia. Pariwisata halal sebagai bagian dari *halal lifestyle* dan Industri halal global dalam perkembangannya tidak bisa independen, selalau terkait dengan produk industri halal lainnya. Pariwisata halal tidak saja dipraktekkan oleh negara Muslim yang tergabung dalam negara-negara OKI tetapi



beberapa negara non-Muslim pun yang tidak tergabung dengan OKI ikut dalam mengembangkannya. Mengapa negara-negara Non-Muslim itu ikut serta dalam memajukan pariwisata halal? Lalu apa dan bagaimana pariwisata halal itu?

## A. PENGERTIAN

Konsep dasar pariwisata halal adalah memberikan pelayanan dan fasilitas yang sesuai dengan karakter dan budaya Islam kepada turis-turis Muslim yang melakukan perjalanan wisata ke suatu destinasi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Namun pada perkembangannya, apa saja yang halal, tidak saja dikonsumsi oleh muslim akan tetapi juga oleh umat non muslim karena pada dasarnya halal identik dengan *higienis* (bersih/bebas dari penyakit) dan baik. Sehingga pariwisata halal tidak eksklusif untuk umat Islam saja, tetapi justru inklusif juga bagi orang-orang non Muslim. Lalu apa arti dari pariwisata halal tersebut?

Pengertian tentang “pariwisata halal” di kalangan akademisi masih sangat dinamis diperbincangkan dan perbedaan pun muncul tidak dapat dihindarkan. Adapun istilah yang paling sering digunakan adalah Pariwisata Islam dan Pariwisata Halal. Carboni mendefinisikan bahwa Pariwisata Islam adalah pariwisata yang sesuai dengan Islam, yang melibatkan orang-orang Islam yang tertarik menjaga sesuai dengan kebiasaan agama personal mereka pada saat dalam perjalanan. Ia berpandangan bahwa pariwisata Islam tidak terbatas hanya untuk tujuan agama dan tidak eksklusif

atau hanya ada di negara-negara Muslim saja (Carboni, Perelli, dan Sistu, 2014: 1–9). Zamani-Farahani dan Henderson berpendapat bahwa Pariwisata Islam dan Pariwisata Halal adalah konsep yang sama. Adapun yang dimaksud dengan Halal adalah ketentuan hukum Syariah, dalam arti, seseorang dikatakan sah melakukan suatu aktivitas, apabila dikerjakan sesuai dengan ketentuan Syariah Islam (Zamani-Farahani dan Henderson, 2010: 79–89) Dengan demikian yang dimaksud dengan Pariwisata Halal adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip Syariah, sehingga dengan demikian disebut juga dengan istilah Pariwisata Syariah. (M. Djakfar, 2017: 11)

Pariwisata Syariah juga dapat disebut dengan istilah Pariwisata Islami, perjalanan syariah, pariwisata halal, pariwisata yang ramah dan pariwisata ramah untuk keluarga. Dilihat dari aspek industri, perjalanan di dalam kegiatan pariwisata terdapat layanan yang berfungsi untuk melengkapi dan tidak membuang identitas pariwisata pada umumnya (Jaelani, 2017, p. 28). Pariwisata Syariah adalah kegiatan yang didukung oleh sarana dan prasarana serta layanan yang dilakukan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Islam (Kemenpar, 2012).

Farahani dan Anderson menegaskan bahwa pariwisata Islam dapat didefinisikan sebagai aktivitas perjalanan umat Islam ketika bergerak dari satu daerah ke daerah lain atau ketika berada di luar wilayah mereka dan tinggal selama kurang dari satu tahun serta untuk berpartisipasi dalam kegiatan dengan dorongan Islam (Zamani-Farahani & Henderson, 2010: 79–89) Sementara DSN-MUI dalam fatwanya, memberikan



definisi Pariwisata Syariah adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip Syariah. (Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016).

Definisi dalam fatwa tersebut pada dasarnya sesuai dengan definisi yang terdapat dalam Undang-undang Pariwisata No. 10 Tahun 2009, pasal 5 poin a. Undang-undang kepariwisataan, menjelaskan bahwa kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan (UU Pariwisata tahun 2009). Namun yang membedakannya dalam pengertian ini adalah mensyaratkan adanya tujuan Syariah yang dinamis dan dapat diterapkan oleh para pihak yang terlibat dalam pariwisata berbasis Islam.

Sementara itu, menurut Sofyan pariwisata Islami adalah pariwisata berdasarkan kepada ketentuan Syariah Islam (Sofyan, 2012: 33). Munir Caudry mengatakan pariwisata Islami adalah kerangka kerja baru dalam pariwisata yang bukan saja merupakan wisata religius, seperti Umroh dan Haji. Pariwisata syariah adalah pariwisata yang menyediakan layanan liburan yang menyesuaikan dengan gaya liburan untuk kebutuhan dan keinginan kaum muslimin. Karena itu, konsepnya seperti hotel yang berpegangan pada dasar syariah yaitu tidak menyediakan layanan untuk minum minuman

beralkohol, memiliki kolam renang dan spa yang terpisah antara pria dan wanita (Wuryasti, 2013). Wisata Islami telah disepakati menjadi kekuatan komersial yang kuat (Euromonitor, 2016), terutama di Timur Tengah, dengan prospek yang sangat bagus (Intel, 2005).

Selanjutnya menurut Puangniyom, bahwa pariwisata halal adalah kegiatan yang berakar di Indonesia dengan prinsip-prinsip Islamnya. Berdasarkan pandangan ini pariwisata halal dilakukan dengan menyiapkan program pariwisata dan tempat yang dirancang sesuai untuk kebutuhan wisatawan asing (Puangniyom, 2017:196). Oleh karena itu, apapun istilah yang digunakan dari mulai pariwisata Islam (*Islamic Tourism*) pariwisata halal (*halal tourism*),<sup>1</sup> pariwisata ramah Muslim (*Muslim Friendly Tourism*),<sup>2</sup> dan pariwisata ramah untuk keluarga (*Family Friendly Tourism*)<sup>3</sup>, secara substansi

<sup>1</sup> Penggunaan istilah Halal menurut Panitia Percepatan Pariwisata Halal Kemenpar RI Dr. Anang Sutono, terkait dengan Industri-industri di dunia yang menggunakan halal seperti HalalBooking.com, Serendipity Tailormade, Konferensi-konferensi ataupun event Pariwisata sebagai berikut: World Halal Tourism Summit, Abu Dhabi Halal Tourism Conference, Spain & Turkey Arabian Travel Market, Dubai Media yang meliput tentang Halal Tourism, wawancara dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2019.

<sup>2</sup> Istilah *Muslim Friendly Tourism* digunakan pada Islamic Tourism Center (ITC) Malaysia, CrescentRating, Shaza Hotels, COMCEC, (The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of the Islamic Cooperation), Tripfez dan Artikel-artikel di berbagai Media

<sup>3</sup> "The Global Islamic Economy Summit (GIES) is the world's largest and most comprehensive forum dedicated to the Islamic economy," Oktober 2018, <https://www.giesummit.com/>.



terdapat banyak kesamaan tujuan dan maksudnya. Oleh sebab itu, pada buku ini judul dan istilah yang digunakan adalah pariwisata halal (*halal tourism*) yang mencakup pengertian istilah-istilah lain. Penggunaan Istilah “pariwisata halal” didasarkan pada perkembangan pariwisata berbasis Islam yang secara global lebih familier, juga dalam konteks Indonesia istilah halal lebih dahulu ada dan berkembang sehingga lebih cocok, lebih dipahami dan dapat diterima oleh masyarakat Indonesia.

Pariwisata halal adalah perjalanan sementara yang memperhatikan nilai-nilai yang terdapat dalam aqidah, ibadah, dan etika Islam sehingga tujuan kebahagiaan di dunia dan akhirat tercapai. Pada pariwisata ini, terdapat perbedaan antara pariwisata halal dan pariwisata pada umumnya dan pariwisata keagamaan semata. Pariwisata halal lebih beragam daripada pariwisata konvensional dan pariwisata religius karena pariwisata halal berfokus pada produk halal dan kompatibel dengan Syariah Islam. Pariwisata halal tidak fokus pada pariwisata yang berarti perjalanan semata, tetapi lebih dari itu.

Kemendagri dan MUI menentukan empat bagian utama dalam pariwisata halal (Sucipto dan Andayani, 2014: 12) diantaranya adalah kuliner, Muslim mode, kosmetik-spa, dan keramah-tamahan. Dari paradigma pariwisata halal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata halal di Indonesia memiliki indikator dan dapat diringkas sebagai berikut (Jaelani, 2017: 28-29):

1. Adanya kerangka budaya terkait dengan pariwisata Islami yaitu situs budaya Islam (Al-Hamarneh, 2011);
2. Adanya pariwisata yang identik dengan orang Muslim yang patuh pada nilai-nilai Islam (Shakiry, 2008)
3. Adanya wisata yang dikaitkan dengan perjalanan Agama yaitu ziarah dan mengunjungi daerah-daerah suci di wilayah Islam dunia (Hassan, 2007).
4. Adanya ruang lingkup wisata Islami yaitu wisatawan yang berbaaur dengan ruang lingkup moral yang berdasarkan nilai-nilai Islam dan standarisasi etika Islam (Hassan, 2004).
5. Adanya wisata Islami yang terkait dengan perjalanan yang bermaksud untuk memotivasi keselamatan atau kegiatan yang berasal dari dorongan Islam (Din, 1989: 542-563).

Berdasarkan pemaparan dan pengertian yang sudah dijelaskan, maka apapun bentuk aktifitas dan kegiatannya selama masih dalam ruang lingkup kelima kriteria di atas, maka kegiatan wisata tersebut masih dapat dinamakan pariwisata halal.

## **B. WISATA HALAL PENUNJANG EKONOMI NASIONAL**

Laporan dari Tourism Worldwide-Statistics & Facts menyebutkan secara global bahwa perjalanan dan pariwisata secara langsung menyumbang sekitar 2,9 triliun dolar AS ke PDB pada tahun 2019. Laporan pariwisata di atas termasuk



jenis wisata halal yang sekarang berkembang pesat di dunia. Selanjutnya Laporan perjalanan dari Travel & Tourism Economic Impact World (WTTC, 2018) menyebutkan bahwa sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang diperhitungkan sebagai penyumbang devisa negara. Hal in terkait dengan kunjungan turis luar negeri ke negara-negara yang dikunjunginya termasuk kedatangan mereka ke Indonesia atau turis domestik yang mendatagi obyek-obyek wisata. Kedatangan turis mancanegara maupun domestik terutama mereka yang datang dari Timur Tengah, Asia dan Australia tentu memiliki nilai tersendiri dari segi ekonomi. Kedatangan mereka sangat penting karena menjadi penyumbang devisa negara. Oleh karena itu aktivitas pariwisata halal dapat dikatakan sebagai penunjang kekuatan ketahanan negara karena dapat menumbuhkan ekonomi nasional.

Laporan Kementerian Pariwisata RI, menyatakan bahwa pada tahun 2017 devisa dari sektor pariwisata mencapai Rp 200 triliun terhadap PDB baru mencapai 5 persen. Maka untuk meningkatkan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara Kemenpar RI menyediakan program 10 destinasi wisata unggulan Indonesia pada tahun 2018. Kesepuluh tempat wisata tersebut adalah:

1. Danau Toba, Sumatera Utara
2. Pantai Tanjung Kelayang, Bangka Belitung
3. Pantai Tanjung Lesung, Banten
4. Kepulauan Seribu, DKI Jakarta
5. Taman Wisata Candi Borobudur, Jawa Tengah
6. Taman Nasional Bromo Tengger, Jawa Timur

Tabel 1.  
Kunjungan Wisatawan Asing (Negara Non-OKI) Terbanyak 2014-2018

Negara Non OKI	2014	2015	2016	2017	(s.d Agustus) 2018
China	1.052.705	1.249.091	1.556.771	2.093.171	1.488.168
Singapura	1.559.044	1.594.102	1.515.701	1.554.119	1.214.232
Australia	1.145.576	1.090.025	1.302.292	1.256.927	849.807
Jepang	505.175	528.606	545.392	573.310	346.525
Korea Selatan	352.004	375.586	386.789	423.191	856.241

Sumber: BPS, 2018

Tabel 2.  
Kunjungan Wisatawan Asing (Negara OKI) Terbanyak 2014-2018

Negara OKI	2014	2015	2016	2017	(s.d Agustus) 2018
Malaysia	1.418.256	1.431.728	1.541.197	2.121.888	1.695.846
Kawasan Timur Tengah	261.589	293.006	367.587	284.369	198.792

Sumber: BPS, 2018



7. Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok, NTB
8. Labuhan Bajo, NTT
9. Pulau Morotai, Halmahera, Mauku Utara
10. Taman Nasional Wakatobi, Sulawesi Tenggara

Perkembangan jumlah wisatawan global yang berkunjung ke Indonesia berdasarkan tabel di atas dari 2014 hingga 2018 (dari Agustus) telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama dari Malaysia untuk negara-negara OKI dan China untuk negara-negara non-OKI. Bahwa jumlah wisatawan terbanyak yang datang ke Indonesia berasal dari negara-negara non-OKI, yaitu Cina, Singapura dan Australia. Sementara dari negara-negara OKI, wisatawan Malaysia menempati posisi pertama untuk mengunjungi Indonesia dan diikuti oleh wisatawan dari Timur Tengah. Atas dasar ini, maka pantas jika wisata halal ikut berperan dalam menunjang ekonomi nasional. Keberadaan pariwisata halal yang menjamin penyediaan fasilitas layak khususnya yang ramah Muslim (halal) dan *bigienis* akan melibatkan masyarakat terutama masyarakat lokal dan industri jasa lainnya yang menunjang berjalannya industri pariwisata halal.

Keterlibatan berbagai pihak akan menumbuhkan lapangan pekerjaan dan pendapatan ekonomi baik untuk masyarakat setempat atau industri lain yang menunjang. Dari sini jelas sekali bahwa keberadaan pariwisata halal dapat menguatkan dan menunjang ekonomi nasional.

### C. PRODUK-PRODUK HALAL

Industri halal yang memproduksi produk-produk halal beberapa tahun terakhir ini mengalami perkembangan pesat di dunia global. Bisnis yang berbasis pada sistem ekonomi Islam ini bukan hanya dikembangkan oleh negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, tetapi juga negara-negara yang sebagian penduduknya non-Muslim seperti Inggris, Jepang, Taiwan, Afrika Selatan dan sebagainya (GMTI, 2019). Oleh karena Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia maka keterlibatan dalam berpartisipasi menghasilkan produk-produk tersebut sangat strategis dan memiliki peluang sebagai negara penghasil produk-produk halal terbesar dunia.

Per Januari 2018, jumlah penduduk dunia sudah mencapai 7,53 miliar jiwa. Mereka yang beragama Islam berjumlah kurang lebih 1,8 miliar jiwa (24,1 %). Diperkirakan pada tahun 2030, persentase jumlah umat Muslim sedunia akan meningkat menjadi 26%. Sehingga dapat mempengaruhi peroduk-produk yang Islami atau barang-barang halal yang dapat mewarnai perdagangan dunia secara signifikan. Ekspor-impor barang-barang halal global sangat signifikan. Tak heran kalau group-group bisnis besar dunia, seperti Nestle dan Indofood sangat peduli membuat dan menjual produk-produk halal.

Produk-produk halal yang berkembang di dunia, termasuk di Indonesia akan bersentuhan dengan gaya hidup halal (*halal lifestyle*) masyarakat Muslim yang saling berkaitan.



Produk-produk halal juga pada tataran di lapangan tentu akan saling mendukung terutama pada industri pariwisata halal. Keberadaan pariwisata halal dimana dalam pengelolaannya tidak dapat berdiri sendiri, akan melibatkan produk-produk halal lain yang dapat menunjang berjalannya pariwisata tersebut. Adapun produk-produk yang bakal bersentuhan dengan pariwisata halal adalah:

Tabel 3  
10 produk halal

No	Jenis
1	Makanan
2	Keuangan
3	Travel
4	Kosmetika
5	Pendidikan
6	Fesyen
7	Media Recreation
8	Farmasi
9	Kesehatan
10	Seni Dan Budaya

Sumber: Republika.co.id

Industri halal yang melahirkan produk-produk halal dianggap sebagai peluang besar yang menjadi kebutuhan dan gaya hidup halal (*halal lifestyle*). Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) Sapta Nirwandar menjelaskan bahwa tren halal sangat prospektif, baik dari sisi keislaman maupun bisnis. Industri halal kini menjadi tren global, (*Republika*; 30/8/2016). Sektor yang mengalami perkembangan pada

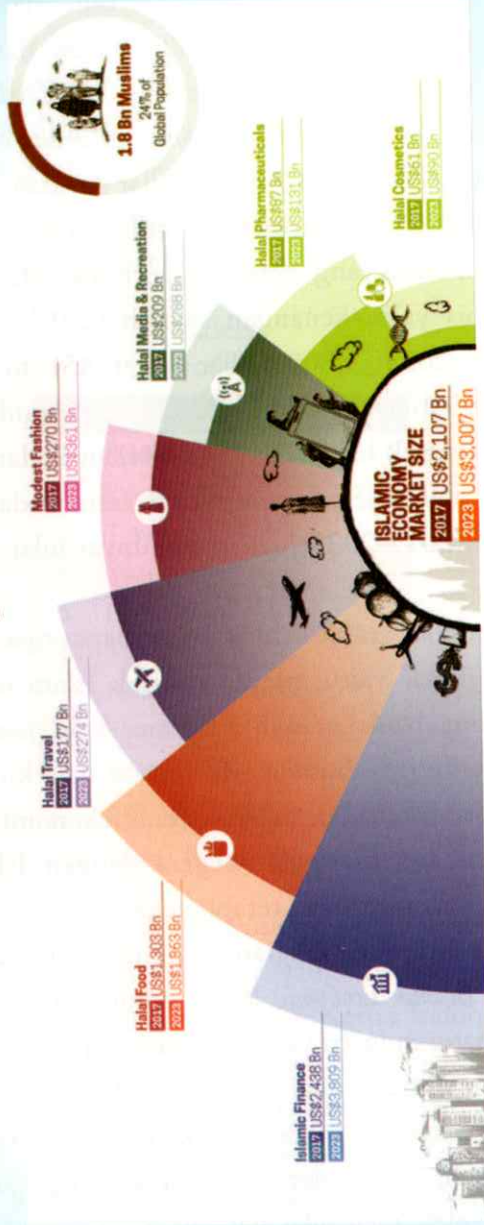
produk halal antara lain makanan-minuman, keuangan, fesyen, kosmetik dan obat-obatan, media dan pariwisata. Berdasarkan laporan dari *State of the Global Islamic Economy* pada tahun 2018-2019, *Islamic Economy Market Size* pada tahun 2017 yaitu sebesar 2.107 miliar dolar AS dan diperkirakan pada tahun 2023 mencapai 3.007 miliar dolar .

Prospek bisnis yang melahirkan produk halal dari masing-masing jenis yaitu keuangan syariah (2017: 2.438 miliar dolar AS - 2023: 3.809 miliar dolar AS), makanan halal (2017: 1.303 miliar dolar AS – 2023: 1.863 miliar dolar AS), pariwisata (travel) halal (2017: 177 miliar dolar AS – 2023: 274 miliar dolar AS), fesyen, media, farmasi dan kosmetika pada tahun 2017-2023 juga mempunyai nilai yang sangat besar.

Dari gambar grafik 1 (hlm. 14) terdapat tiga jenis produk halal yang besar yaitu, pertama: bank Islam (di Indonesia biasa disebut bank syariah), kedua: *halal food* (makanan halal), dan ketiga: busana Muslim. Kalau kita tinjau ke tiga jenis bisnis tersebut dalam bidang ekonomi Islam tidak bisa berkembang di negara-negara dengan Islam sebagai penduduk mayoritasnya, tetapi negara-negara non Muslim (Barat) juga ikut ambil bagian untuk mengembangkannya.

*Global Islamic Economic Report* tahun 2015 melaporkan, bahwa peluang industri yang melahirkan produk halal dunia besar sekali, dimana nilai ekonomi industri halal mencapai 1,8 triliun dolar AS. Berdasarkan hasil penelitian dari Pew Research, 73 % dari perilaku konsumsi orang Islam ditentukan oleh nilai-nilai dari ajaran agamanya, di mana

Gambar 1.  
Sektor Perkembangan Industri Halal



Sumber: State of the Global Islamic Economy Report 2018/19

mereka akan menjauhi konsumsi yang dilarang/haram (seperti babi, alkohol dan hewan yang disembelih tidak sesuai dengan ketentuan ajaran Islam). Sehingga dalam hal mengonsumsi apapun, mereka harus yakin betul bahwa apa yang mereka konsumsi itu adalah halal.

Pasar halal dengan segala produknya benar-benar telah menjadi pasar besar dunia, dan bukan hanya ceruk pasar semata. Pasar halal telah berevolusi, mulai dari makanan, keuangan, hingga gaya hidup. Termasuk gaya hidup Muslim sekarang ini adalah menyukai perjalanan yang sesuai dengan ajaran Islam yaitu wisata halal.



# LANDASAN PENGEMBANGAN WISATA HALAL

## **A. FILOSOFI WISATA HALAL**

**S**elama ini, pariwisata pada umumnya identik dengan menghadirkan kesenangan dan ekonomi semata. Pariwisata seperti tersebut tentu menghadirkan pemahaman kepada masyarakat tentang pariwisata seakan terlepas dari nilai dan agama sehingga tidaklah heran banyak tanggapan negatif tentang pariwisata. Pariwisata dieksploitasi sebanyak-banyaknya hanya untuk kepentingan ekonomi dan para pemodal, bahkan pariwisata sangat identik sekali dengan kemaksiatan. Ketika hadirnya pariwisata halal sebagai sebuah tawaran untuk



menjelaskan bahwa pariwisata yang lahir dari konsep wisata yang berlandaskan agama, dan etika yang penuh dengan makna filosofisnya, maka tidaklah heran banyak pihak yang mempertanyakan pariwisata halal tersebut.

Pariwisata halal pada dasarnya adalah bukan untuk mengubah destinasi pariwisata menjadi syariah atau menjadi ke-araban, akan tetapi memfasilitasi wisatawan dan para penyelenggara pariwisata serta menciptakan lingkungan agar nyaman, aman dan maslahah. Pariwisata halal tidak semata mementingkan ekonomi dan kesenangan dalam pengembangannya tetapi lebih dari itu semua pariwisata halal juga menerapkan bagaimana keberlangsungan stakeholder pariwisata yang taat kepada aturan, baik agama, etika maupun hukum yang berlaku dan tentu berujung kepada terciptanya kemaslahatan umum.

Senada dengan ini Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa pariwisata halal bukan untuk mengubah obyek wisatanya; pariwisata halal lebih kepada memfasilitasi (memberikan fasilitas). Begitupula Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, KH Muhyiddin Junaidi menjelaskan bahwa masih banyaknya pemahaman akan pariwisata halal di Indonesia, mengira bahwa wisata halal itu bagaimana membatasi gerak gerik wisatawan. Pariwisata halal di Indonesia adalah tentang bagaimana soal higienis, menghindari perbuatan melawan hukum seperti narkoba dalam destinasi pariwisata halal, terdapatnya aturan-aturan yang perlu dijaga, hotel memiliki tempat ibadah dan sebagainya. Inilah maksud di balik filosofi

pariwisata halal. Berdasarkan filosofi pariwisata halal di atas, maka dalam pengembangan pariwisata halal tentu melayani tamu dengan ramah tamah, memikirkan kesejahteraan masyarakat setempat, menjaga kelestarian lingkungan, dan menjaga budaya yang ada.

Filosofi pariwisata halal adalah konsep penyediaan fasilitas dan pelayanan yang penuh dengan keramahan-tamahan. Pengelola pariwisata halal di Indonesia akan melayani dan memberikan pelayanan yang maksimal, terlebih terhadap wisatawan yang membutuhkan sarana untuk beribadah. Bahkan terhadap wisatawan non-Muslimpun, pihak pengelola tetap memberikan pelayanan yang ramah. Pengelola pariwisata halal memahami identitas wisatawan, baik itu terkait agama wisatawan, negara, ataupun sukunya wisatawan. Dengan keberadaan pemahaman pengelola terhadap identitas wisatawan yang mendalam, maka mereka mampu memfasilitasi wisatawan dengan penuh etika dan sikap yang baik. Termasuk ketika pengelola pariwisata halal berhadapan dengan wisatawan yang kurang menutur kata atau yang bertentangan dengan syariat, maka pihak pengelola akan memberikan informasi dan pengetahuan kepada wisatawan dengan tanpa menyinggung mereka.

Perlakuan yang ramah dari pengelola tersebut, karena pariwisata halal di Indonesia tidak saja masalah benar atau salah (halal-haram) semata yang dikedepankannya, akan tetapi terdapat juga bagaimana menyampaikan nilai-nilai dakwah yang dikedepankan bagi mereka yang belum memahami syariah Islam. Di sini pariwisata halal mengadung



karakteristik edukasi kepada masyarakat, wisatawan dan pengelolanya itu sendiri. Dengan penyediaan fasilitas ibadah yang layak, tempat bersuci yang memadai dan penyediaan makanan-minuman yang tersertifikasi halal, diharapkan wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang non-Muslim dapat menghargai kearifan lokal daerah setempat di obyek pariwisata halal. Sehingga kearifan lokal wisata halal Indonesia dapat dirasakan oleh semua pengunjung terutama wisatawan mancanegara.

Senada dengan para pimpinan MUI adalah Pengarah Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal Kemenpar RI dan Ketua Umum Perkumpulan Pariwisata Halal (PPHI) Riyanto Sofyan yang mengatakan bahwa pariwisata halal merupakan *brand internasional* yang menasar para wisatawan Muslim di seluruh dunia. Mengaitkan pariwisata Halal dengan Islamisasi maupun Arabisasi merupakan hal yang cenderung rasis. Sebab, wisata halal merupakan kebutuhan global dan berpotensi besar mendatangkan devisa bagi negara. Membangun brand dan mensosialisasikan wisata halal di Indonesia bukan perkara mudah. Sehingga tujuan pembangunan pariwisata halal tidak untuk kepentingan jangka pendek dan memenuhi hasrat politik praktis semata (<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/19/06/30/>).

Ketua Tim Percepatan Wisata Halal Indonesia (2017-2019) Dr. Anang Soetono, pada 15 Maret 2019 dalam diskusi FGD “*Wonderful Halal Tourism*” menjelaskan bahwa wisata halal bisa berupa seperangkat layanan tambahan yang terkait dengan pengembangan 3A, yakni Amenitas, Atraksi, dan

Aksesibilitas yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan dan keinginan wisatawan Muslim. Konsep inilah yang dijadikan pondasi pengembangan pariwisata halal Indonesia (*Wonderful Halal Tourism: Anang Sutono*). Dari sini dapat dipahami bahwa filosofi destinasi pariwisata halal juga mempertimbangkan keberlanjutan (*sustainability*) program pariwisata halal yang harus ditata dan dikelola dengan management yang rapi dan terencana.

Amenitas merupakan berbagai fasilitas di luar akomodasi yang dapat dimanfaatkan wisatawan. Beberapa amenitas pariwisata antara lain restoran, toko cenderamata, dan obyek wisata yang dituju. Adapun atraksi berupa aktivitas yang menarik bagi wisatawan. Sementara aksesibilitas adalah untuk kemudahan dan kenyamanan turis. Dari 3A ini bisa dijabarkan lebih dalam apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh wisatawan Muslim. (Anang Sutono: tempo.co)

Filosofi pariwisata halal selain terkait dengan urusan makanan, minuman dan pengelolaan destinasi wisata, juga berkaitan dengan lembaga keuangan syariah. Dengan adanya lembaga keuangan Syariah baik bank maupun non bank seperti koperasi Syariah, diharapkan keuangan bisa dikelola secara Syar’i di destinasi wisata halal manapun. Hal ini dilakukan agar pengelolaan keuangan di destinasi pariwisata halal sejalan dengan perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Dengan demikian lembaga keuangan syariah tidak sekedar mendapatkan pangsa pasar baru, akan tetapi juga memberikan jaminan bahwa seluruh proses transaksi keuangan terhindar dari riba.



Filosofi pariwisata halal selanjutnya adalah filosofi keamanan dan kenyamanan dan hal ini sangat penting terkait dengan ke-*tobararabannya* (kebersihannya). Di obyek pariwisata halal harus diciptakan lingkungan yang bersih, terutama terhindar dari sampah yang tidak terkelola dengan baik agar terasa aman dan nyaman. Maka realisasi pariwisata halal tidak saja dilakukan oleh penyelenggara semata tetapi melibatkan pemerintah maupun pihak swasta dan masyarakat sekitar. Filosofi kemamanan dan ke-*thabarahan* dalam pariwisata halal juga menggambarkan bagaimana di lingkungan obyek pariwisata halal terbebas dari bentuk-bentuk kriminalisasi seperti pencurian, peredaran narkoba, pelecehan terhadap perempuan termasuk penggunaan alkohol dan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam lainnya.

## B. DASAR AJARAN AGAMA

Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan wisata dalam bentuk traveling (perjalanan). Dalam tradisi Islam istilah perjalanan yang berhubungan dengan parawisata dapat dijumpai seperti pada kata *siyar*, *safar*, *al-siyābah*, *al-ziyārah*, atau *al-riblah*. Namun penggunaan pariwisata dalam bahasa Arab kontemporer sendiri lebih memilih “*al-siyābah*”. Secara bahasa *al-siyābah* adalah pergi kemana saja dengan motif apa saja (Mutlak tidak Muqayyad). Al-Qur’an menyebut kata *al-siyābah* dalam beberapa surat seperti pada Q.S. al-Taubah: 2 & 112.

فَسَيُخَوِّا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكٰفِرِينَ

“Maka berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di bumi selama empat bulan dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melembatkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.” (Q.S. al-Taubah [9]: 2)

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
الَّذِينَ يُؤْتُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْضَوْنَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَالَّذِينَ يَبِشْرُونَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ  
الَّذِينَ يُؤْتُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْضَوْنَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَالَّذِينَ يَبِشْرُونَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ  
الَّذِينَ يُؤْتُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْضَوْنَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَالَّذِينَ يَبِشْرُونَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ  
الَّذِينَ يُؤْتُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْضَوْنَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَالَّذِينَ يَبِشْرُونَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ

“Mereka itu adalah orang-orang yang bertobat, beribadah, memuji (Allah), mengembara (demi ilmu dan agama), rukuk, sujud, menyuruh berbuat makruf dan mencegah dari yang mungkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman”. (Q.S. al-Taubah [9]: 112)

Dalam al-Quran terdapat beberapa kata lain, seperti pertama, kata “*sāra-yasīru-sairan-saiyāratan*”: (berjalan, melakukan perjalanan), dari kata tersebut dijumpai kata “*saiyyār, muannatsnya saiyyārah*” dengan makna yang banyak menempuh perjalanan (mobil). Kata tersebut dapat ditemui dalam Q.S Saba’ [34]: 18. QS. al-A’am [6]: 11, Qs. An-naml [27]: 69, QS. al-Ankabut [29]: 20, QS. al-Rum [30]: 42 (al-Raghib Asfahani, 1989: 105)

Kedua, kata “*safar*” (perjalanan) terdapat dalam QS. al-Baqarah [2]: 184, 185, 283. QS. An-nisa’ [4]: 43, QS. al-Maidah [5]: 6. (al-Raghib Asfahani, 1989: 112)

Ketiga, kata “*ribla* dari raha-yarhalu” (perjalanan) terdapat dalam QS. Al-Qurays [106]: 1-4. (al-Raghib



Asfahani, 1989: 96) Ibnu Katsir memaknai kata Rihla dalam QS. al-Qurasy tersebut dengan makna “suatu kebiasaan perjalanan jauh yang terbiasa dilakukan oleh orang-orang Quraisy untuk berdagang dan keperluan lainnya (Ahmad Syakir, 2014: 549). Begitupula Quraish Shihab memaknai kata (rihla) dari kata رحل (*rahala*) yang terdapat dalam QS. al-Quraisy diatas “pergi ke tempat yang relatif jauh”. Rihla maksudnya adalah perjalanan dagang kaum Quraisy yang mereka lakukan dua kali setahun, di waktu musim dingin dan musim panas.

Perjalanan dagang tersebut dilakukan pertama kali oleh kakek Nabi Muhammd SAW, Hasyim Ibn Abd Manaf (Qurais Shihab, 2006: 538). Ajaran Rasulullah Saw. tentang makna Rihla juga terungkap dalam anjuran untuk melakukan perjalanan/wisata rohani ke tiga masjid. Sebagaimana sabdanya dalam kitab Shahih al-Bukhārī dan Muslim:

لَا تُشَدُّ الرَّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِ الرَّشُولِ  
- صلى الله عليه وسلم وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى

*“Janganlah kamu bersusah payah mengadakan wisata ziarah kecuali ke tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid-ku ini (Masjid Nabawi) dan Masjidil Aqsha”* (HR Bukhari dan Muslim).

Keempat, kata “hājara-yuhājiru-Muhājiran”: (Berhijrah, berpindah) terdapat dalam QS. Annisa’ [4]: 100 (al-Raghib Asfahani, 1989: 74). Kelima, kata “Sāha-Yasīhu-Saihan-Siyāhah-Sāihun”: (Berjalan atau bepegian), tedapat dalam QS. Al-Taubah [9]: 2 dan 112 (al-Raghib Asfahani, 1989: 102).

Beberapa ayat al-Quran di atas yang memiliki makna, anjuran atau perintah misalnya: QS Muhammad [47]: 10, “Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka; Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka dan orang-orang kafir akan menerima (akibat-akibat) seperti itu.” QS Yusuf [12]: 109 “Kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki-laki yang Kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Maka tidakkah mereka bepegian di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka (yang mendustakan Rasul) dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memikirkannya?”. QS Ali ‘Imran [3]: 137 “Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah; Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).” QS An-Naml [27]: 69: “Katakanlah: ‘Berjalanlah kamu (di muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa.’” QS Luqman [31] 31: “Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkan-Nya kepadamu sebagian dari tanda-tanda (kekuasaan)-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur.” QS Ar-Rum [30]: 42 “Katakanlah: “Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang



yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).” Q.S Al-An’am [6]: 11 “Katakanlah: “Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu’.”

Ayat-ayat di atas adalah dasar agama Islam yang memerintahkan umat untuk melakukan perjalanan (berwisata). Dengan demikian, Islam mengajarkan bahwa wisata dalam bentuk perjalanan adalah bagian dari ibadah, karena diperintahkan untuk melakukan satu kewajiban dari rukun Islam, yaitu Haji. Islam menjelaskan tidak saja untuk tujuan bersenang-senang dalam melakukan wisata tetapi makna perjalanannya harus mampu mendekatkan diri kepada Allah Swt, harus ada pengetahuan (*ribla fi thalabil ilmi*), harus *tadabur* terhadap alam semesta dan melakukan syiar agama Islam sebagai bagian dari perjalanan wisatanya.

### C. TOKOH-TOKOH WISATAWAN DALAM SEJARAH ISLAM

Para ulama selama ini tidak dikategorikan sebagai wisatawan. Namun jika ditinjau dari pola perjalanan mereka menuntut ilmu maka mereka bisa dikategorikan sebagai wisatawan dalam arti *ribla fi thalabil ilmi*. Mereka adalah traveller yang tangguh dalam mendekatkan diri kepada Allah melalui rihla atau wisata yang pada akhirnya melahirkan ilmu pengetahuan yang diikuti oleh para sarjana Barat. Berikut adalah beberapa ulama yang melakukan wisata menuntut ilmu:

Ahli hadis seperti Imam Bukhari, Muslim, Ahmad ibn Hambal, Abu Dawud, al-Tirmidzi dan para ahli hadis lainnya, bahkan para ulama pada priode Sahabat dan Tabi'in adalah para traveler ulung. Para *riblatul fi thalabil ilmi* tersebut, melakukan wisata dengan perjalanan untuk mendapatkan satu hadis, mereka biasanya mengunjungi para guru yang terkadang belum pernah diketahui oleh orang lain. Dalam istilahnya Cohen (Cohen, 1979: 104–111) kegiatan tersebut dapat dikatakan dengan teori drifter yaitu wisatawan yang berkeinginan mengunjungi lokasi yang sama sekali belum dikenal atau belum terpublikasi, dan ini jumlahnya sedikit. Pekerjaan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam tersebut dapat juga dikatakan sebagai explorer, yakni musafir yang melakukan perjalanan sendiri, tidak mengikuti perjalanan pada umumnya. Mereka yang tergolong explorer ini tidak keberatan dalam kondisi seadanya, namun tingkat interaksi dengan tempat dan masyarakat yang dikunjunginya tergolong cukup tinggi (Bungaran Antonius: 2017: 9).

Dalam sejarah Islam juga dikenal traveller lain, mereka adalah Ibn Khardazdbah (820-912 M), Ibnu Jubaer (540-614 H / 1145-1217 H), Ibn Khaldun (1304-1378 M/ 703-779 H) dan para pelancong Muslim lainnya yang sangat ulung dalam menaklukkan lautan dan hamparan daratan yang luar biasa luasnya. Tokoh traveller yang fenomenal pada masa keemasan Islam adalah Ibnu Bathutah (Bahār Aḥmad Jāsīm al-Sāmīrāī, 2013: 225-265; Ahmad Ramadhon Ahmad, tth).

Ibnu Bathutah (1304-1378M/703-779 H) dikenal dengan sebutan “the First Traveller of Islam.” Nama



lengkapnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim al-Lawathi at-Tanji Abu Abdullah yang terkenal dengan sebutan Ibnu Bathuttah. Lahir dan berkembang di Thanjah (Tangier) pada tahun 703 H. Nama Ibnu Bathuttah telah dicatat dalam kepustakaan-kepustakaan dunia, khususnya sejak abad pertengahan sampai zaman modern. Namanya masyhur di mata ilmuan Muslim, maupun Barat. Banyak buku atau karya ilmiah disusun dan bersumber dari memori Rihla Ibnu Bathuttah. Ibnu Bathuttah melakukan perjalanan meninggalkan negerinya menuju beberapa tempat di Afrika Utara, seperti Maroko, Mesir, Syam, Hijaz, Irak Persia, Yaman, Bahrain, Turkistan, sebagian wilayah India, Cina, Nusantara (Pasai), Tartar dan Afrika Tengah.<sup>1</sup>

Perjalanan Ibnu Bathuttah dimulai pada tahun 1325-1352 M dari negerinya di Afrika Utara (kota Tonji) menuju Makkah dan Madinah sampai kembali lagi ke Maroko. Ia berumur 22 tahun ketika melakukan perjalannya dan menghabiskan waktu kurang lebih 28 tahun. Perjalanannya dilakukan sejauh 79.000 mil atau sekitar 15.000 KM. Menurut laporan, Bathuttah melakukan perjalanan hanya dengan jalan kaki, namun ada yang berpendapat perjalanannya tersebut terkadang dengan menyewa unta, domba atau kuda.

Wisatawan Muslim yang sangat terkenal dan berpengaruh di Asia, dan Asia Tenggara, khususnya Indonesia adalah Zheng He, atau Cheng Ho. Ia adalah seorang Muslim dari

---

<sup>1</sup> Ibn Battuta. *Tuhfab Al-Nazbar Fi Gharā'ibil Amsbar wa' Anjā'ibil Asfar*, Pentahqiq Muhammad Abdurrahim, Lebanon: Ihya Al-Ulum, (1978 M-1407 H): vvii

Yunnan yang melakukan perjalanan misi negaranya. Ia berhasil membangun hubungan dengan banyak negara Islam, dan bahkan melakukan perjalanan ke Mekah. Dari wisatanya ke berbagai negara tersebut pada akhirnya banyak museum telah didirikan yang menceritakan kisah perjalanan wisata Zheng He / Cheng Ho. Diantara museum itu ialah Museum Budaya Cheng Ho, Melaka, Malaysia; Museum Sejarah Hong Kong, Hong Kong (Cina); Museum Bahari Macao, Macao (Cina); Pameran Silk Silk Road, situs bersejarah Three Ales dan Seven Alley; Kota Fuzhou, Provinsi Fujian, Cina; Museum Cheng Ho, Kota Jakarta Timur, Indonesia; Museum Maritim Nasional Cina, Tainjin, Cina; Museum Bahari Quanzhou, Provinsi Fujian, Cina; Maritime Experiential Museum, Sentosa, Singapura; dan Taman Kapal Harta Karun Zheng He, Nanjing, Cina. Masih banyak kisah wisatawan Muslim lainnya yang melakukan perjalanan wisata ke Nusantara dengan membawa perdamaian. (del Turisme, Organizació Mundial, 2017).

Bagi para wisatawan Muslim di atas, mereka melakukan wisata ke luar negeri melintasi perbatasan negara, atau sebatas di wilayah negerinya sendiri, tentu ajaran dan budaya Islam yang mereka anut tidak ditinggalkan. Mereka tetap melaksanakan ibadah, mempertebal keimanan, melakukan tadabbur alam sekaligus bersyukur kepada Allah Swt. atas nikmat yang diberikan berupa kemudahan dan kesempatan untuk menyaksikan keindahan alam ciptaan Allah. (Priyadi Abadi, 2016). Praktek yang dilakukan oleh wisatawan Muslim tersebut mampu memberikan contoh dan pelajaran



bagi wisatawan Muslim selanjutnya untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan-Nya dan tetap mempektekan kebiasaan-kebiasan mengkonsumsi makanan dan minuman halal selama dalam perjalanannya. Tidak sedikitpun dari mereka melakukan kemaksiatan ketika dalam perjalanannya. Mereka juga mampu merealisasikan rahmat bagi seluruh alam. Karena kemampuan mereka dalam memahai budaya, suku, ras, bahasa bahkan juga berbagai agama yang dibingkai dalam koridor syariat Islam dengan tanpa adanya konflik di lingkungan wisata atau tempat yang mereka singgahi.

Sastrawan Islam Indonesia, Habiburrahman El-Shirazy, pada pengantar buku “Muslim Traveller Solutions” dalam buku Priyadi Abadi mengemukakan, bahwa Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan travelling, tadabbur alam ke berbagai daerah dan Negara. Setiap Muslim terdahulu adalah para traveler ulung yang berkeliling dari satu kota ke kota lain, satu desa ke desa lain, satu lembah ke lembah lain, satu negeri ke negeri lain (Priyadi Abadi, 2016).

Berdasarkan ayat al-Quran, hadis dan laku para ulama di atas maka pariwisata halal yang berawal dari perjalanan yang tidak termanagemen kemudian –seiring dengan perkembangan zaman dan sains– ditandai dengan mulai adanya transportasi dan perkembangan pariwisata global pada era Thomas Cook, sejak itu, pariwisata hanya dikenal dan berkembang di dunia Barat. Padahal kalau ditelusuri dalam sejarahnya, sebagaimana yang diurai di atas, pariwisata halal bukanlah sesuatu yang baru, tetapi pariwisata halal sudah ada sejak masa awal Islam. Sedangkan di era modern sekarang ini,

penamaan “halal” yang disandingkan dengan “pariwisata” adalah untuk lebih mempertegas bahwa pariwisata dalam Islam sudah ada dan kemudian berkembang di negara-negara Muslim termasuk Indonesia dengan ciri khasnya yaitu kearifan lokal wisata halal Indonesia.

## **D. UNDANG-UNDANG DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH**

Penyelenggaraan pariwisata halal di Indonesia merujuk kepada undang-undang dan berbagai peraturan yang berlaku. Selama ini, aktifitas kepariwisataan yang dijalankan di Indonesia paling tidak merujuk ke dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Kepariwisata No. 10 Tahun 2009. UU ini tidak secara spesifik membahas pariwisata halal, karena memang sudah lahir jauh sebelum perkembangan pariwisata halal. Namun UU ini sangat mendukung bagi pelaksanaan pariwisata berbasis agama Islam sebagaimana terdapat dalam Pasal 5. poin a. Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai penjawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan. Begitu pula aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah RI Pasal 14 poin 2 (PP) No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025. PP ini



- mempertegas kembali nilai-nilai agama, budaya, dan konservasi untuk menjaga kelestarian lingkungan dalam keberlanjutan pariwisata.
2. Undang-undang RI No. 33 tahun 2014 tentang *Jaminan Produk Halal* yang sifatnya sudah mandatori (wajib) adalah penting dalam penguatan kebijakan Pemerintah Indonesia di bidang produk-produk Halal.. Undang-undang ini sudah mengamanatkan kepada industri yang sifatnya mandatori (wajib) pada akhir tahun 2019 untuk menerapkan produk-produk halal.<sup>2</sup> Oleh karena undang-undang ini bersifat umum, maka tentu saja berlaku pula untuk industri pariwisata halal yang harus steril dari segala hal yang haram berdasarkan syariah.
  3. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang *Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata* yang didalamnya memuat ketentuan sertifikasi usaha pariwisata halal. Keberadaannya sangat membantu dan memajukan industri pariwisata halal Indonesia menuju pariwisata halal terbaik dunia.
  4. Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) RI No. 17 Tahun 2020, tentang tata cara memperoleh surat keterangan dalam rangka pembentukan kawasan industri halal. Keberadaan Permenperin ini sangat cocok dalam membangun kawasan industri halal dimana wilayah-wilayah pariwisata halal akan dipromosikan sebagai kawasan halal.

<sup>2</sup> Lihat UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

5. Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah pun mengeluarkan peraturan terkait pengembangan pariwisata halal di daerahnya. Misalnya Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerbitkan Perda Provinsi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Keberadaan Perda ini jelas sangat mengena untuk pembangunan dan pengembangan pariwisata halal. Keberadaannya yang memahami secara persis kondisi daerahnya sangatlah relevan dalam memajukan dan mampu berdaya saing dengan pariwisata halal dunia.

Dari pemaparan di atas, walaupun secara khusus belum adanya UU tentang pariwisata halal, pada dasarnya pemerintah sudah memberikan peluang yang sangat besar untuk pengembangan pariwisata halal di Indonesia. Keberadaan UU JPH No. 33 tahun 2014 dan Peraturan Menteri tersebut sangat mengena berbagai kebutuhan aktivitas kepariwisataan khususnya kepada wisatawan (Muslim). UU dan Peraturan Menteri tersebut sangat terkait erat juga dengan usaha di bidang penginapan, restoran, kolam renang, spa dan faktor pendukung lainnya yang menyediakan makanan dan minuman sesuai dengan fasilitas yang disediakan, dan harus dijamin kehalalannya.<sup>3</sup>

Demikian juga di rumah makan atau restoran harus disediakan segala jenis produk yang harus dijamin kehalalan dan kebersihannya untuk dijual kepada wisatawan sebagai

<sup>3</sup> Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.108/DSNMUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah



konsumen, sehingga mereka tidak dirugikan karena mereka menikmati produk-produk yang dilarang untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa kehalalan produk-produk makanan minuman dan sebagainya, disamping membutuhkan kejujuran, keterbukaan, dan itikad baik dari para pelaku bisnis, produsen dan penjual dalam memproduksi dan menjual semua produk kepada wisatawan di wilayah wisata yang dikunjungi, maka peraturan pariwisata tentang sertifikasi halal adalah keniscayaan (Muhammad Djakfar, 2016: 421).

Pembangunan pariwisata halal, seperti yang sudah dibahas, baik skala nasional dan khususnya pembangunan di daerah, merupakan salah satu sektor pembangunan di bidang ekonomi yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi negara. Jika perekonomian nasional dan daerah tumbuh, maka tentu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kreativitas pemerintah pusat dan daerah dalam mencari dan merancang berbagai model dan formula baru yang dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara, tentu sangat dibutuhkan kerjasamanya dalam merancang dan membuat kebijakan yang tepat.

Berdasarkan gambaran tersebut, pemerintah juga menyusun langkah-langkah kebijakan untuk merealisasikannya dengan baik. Kebijakan ialah perencanaan jangka panjang yang mencakup tujuan pembangunan pariwisata dan cara atau prosedur pencapaian tujuan tersebut yang dibuat dalam pernyataan-pernyataan formal seperti hukum dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Kebijakan yang dibuat pemerintah harus sepenuhnya dijadikan panduan dan harus ditaati oleh

para stakeholders. Kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam bidang pariwisata yaitu kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan hubungan politik terutama politik luar negeri bagi daerah tujuan wisata yang mengandalkan wisatawan mancanegara.

Umumnya, kebijakan pariwisata dimasukkan ke dalam kebijakan ekonomi secara keseluruhan yang kebijakannya mencakup struktur dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kebijakan ekonomi yang harus dibuat sehubungan dengan meningkatkan pembangunan pariwisata ialah kebijakan mengenai penanaman modal, ketenagakerjaan dan keuangan, industri-industri penting untuk mendukung kegiatan pariwisata, dan perdagangan barang dan jasa. Dalam hal kebijakan secara khusus yang menyangkut pariwisata halal pemerintah melalui Keputusan Menteri Nomor KM.191/OT.001/MP/2018 menugaskan kepada Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal (P3H). Adapun tugas-tugas yang dilakukan oleh Tim P3H adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan strategi percepatan pengembangan pariwisata halal;
- b. Melakukan langkah-langkah untuk mengintegrasikan kebijakan antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam upaya percepatan pengembangan pariwisata halal;
- c. Melakukan pendampingan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka pengembangan dan pembangunan destinasi pariwisata halal;



- d. Melakukan peningkatan kapasitas di bidang pemasaran, pengembangan destinasi, industri, sertifikasi usaha dan sumber daya manusia di bidang pariwisata halal;
- e. Menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka pelaksanaan program pemasaran pariwisata halal; dan
- f. Memberikan evaluasi, rekomendasi dan masukan strategis untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan percepatan pengembangan pariwisata halal.

Berdasarkan uraian di atas, jelas perundang-undangan di Indonesia dan kebijakan pemerintah yang ada sangat mendukung keberadaan dan pelaksanaan pariwisata halal di Indonesia. Oleh karena itu tidak ada keraguan akan jaminan hukum positif dan kebijakan pemerintah yang ada dalam mengembangkan, membangun dan mengelola pariwisata halal Indonesia yang lebih maju dan mampu berdaya saing dengan negara-negara lainnya di dunia.

## **E. KEBIJAKAN DASAR MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)**

Tanpa dukungan masyarakat, khususnya komunitas Muslim, tentu pariwisata halal tidak akan bisa berkembang sebagaimana mestinya. Kebutuhan akan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim sebagai pengguna jasa pariwisata halal dan para pemangku kepentingan di industri pariwisata halal sangat dibutuhkan. Di sinilah posisi MUI sebagai bagian dari komunitas masyarakat yang selalu membina dan melayani masyarakat akan industri pariwisata halal.

Lahirnya fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 tentang *Pedoman Penyelegaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah* adalah kebijakan dasar yang bersifat keagamaan sekaligus merupakan tanggapan atas perkembangan ekonomi secara umum dan bagaimana ekonomi Islam mempedomani khusus bidang pariwisata halal yang semakin maju dan berkembang.<sup>4</sup>

Fatwa DSN-MUI dalam bidang industri pariwisata berdasarkan prinsip syariah tersebut merujuk kepada al-Quran dan al-Hadist Nabi Muhammad Saw, sebagai dasar utamanya. Namun, ketentuan dalam al-Quran dan hadis masih global sehingga DSN-MUI juga menggunakan sumber hukum lain seperti kesepakatan ulama (Ijma), Qiyas dan qaidah-qaidah fikih lainnya. DSN-MUI juga melakukan ijtihad secara kolektif untuk mempertegas dasar-dasar dalam menentukan hukum pariwisata yang sedang berkembang. Oleh karena itu, di sinilah pentingnya kehadiran para ulama melalau MUI untuk melakukan ijtihad sehingga semua masalah baru yang muncul dapat segera ditemukan solusinya.

Untuk meyakinkan kepastian hukum sehubungan dengan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, dalam perumusan fatwa Dewan Syariah Nasional Dewan Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 108 / DSN-MUI / X / 2016 pada dasarnya dapat dipetakan menjadi empat sumber, yaitu Alquran, Sunnah (Hadis), Yurisprudensi, dan Pendapat Para Ulama. Sumber pertama dan kedua adalah wahyu, sedangkan

<sup>4</sup> Lihat alasan pokok fatwa tersebut dikeluarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 tentang pedoman penyelegaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah



sumber ketiga dan keempat adalah produk pemikiran (ijtihad-formulasi) dari para sarjana yang kompeten di bidang hukum Syariah. Sumber-sumber ini sebagian sudah dibahas pada sub bab perintah menjalankan pariwisata halal di atas. Fatwa DSN-MUI memutuskan bahwa prinsip-prinsip umum pariwisata halal adalah bahwa pelaksanaan pariwisata harus menghindari kemusyrikan, kemaksiatan, kemaafsadatan, tabdzir/israf, dan kemungkar.

Berangkat dari prinsip-prinsip umum di atas, kegiatan pariwisata halal harus benar-benar melindungi kepercayaan (*al-dīn*) wisatawan (muslim) agar mereka tidak jatuh ke dalam jurang kemusyrikan dan hal-hal lain yang dapat menodai kesucian agama para wisatawan.<sup>5</sup> Dengan bepergian, wisatawan harus belajar banyak kearifan, manfaat dan ibrah yang berguna, tidak hanya sebagai bekal tambahan untuk hidup di dunia, tetapi juga di akhirat. Sehingga setelah melakukan perjalanan, iman mereka akan bertambah dan amalan kebaikan semakin meningkat. Beberapa ketentuan secara khusus yang menyangkut praktek pariwisata halal dalam fatwa ini antara lain ialah:

1. Destinasi wisata. Destinasi wisata syariah wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah; makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal

---

<sup>5</sup> Terkait dengan masalah perlindungan agama, dalam Islam banyak dibahas pada pembahasan Maqashid al-Shariah, yaitu melindungi, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

MUI. Selain itu, destinasi wisata wajib terhindar dari kemusyrikan dan khurafat; maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi; pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

2. Standarisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM). Hotel Syariah harus diwujudkan di mana pengelola dan karyawan hotel wajib mengenakan pakaian sesuai syariah; hotel syariah wajib memiliki pedoman pelayanan untuk menjamin pelayanan sesuai syariah. Pengelola hotel tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila; menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci; makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.
3. Spa, Sauna, dan Massage. harus disediakan SDM terapis laki-laki hanya untuk melayani tamu laki-laki dan terapis perempuan hanya untuk tamu perempuan. Biro perjalanan wisata syariah harus memiliki panduan wisata yang mencegah dari perbuatan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, miras, narkoba, dan judi.
4. Biro Perjalanan Wisata Syariah. Biro Perialarran Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:
  - 1) Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
  - 2) Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
  - 3) Memiliki daftar penyedia makanan dan



minuman halal yang memiliki Serlifikat Halal MUI; 4) Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lernbaga penjaminan, maupun dana pensiun; 5) Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah; 6) Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.

5. Sumber Daya Manusia (SDM). SDM pemandu wisata syariah wajib memahami dan melaksanakan nilai syariah dalam tugasnya, berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur, dan bertanggung jawab. Dalam ketentuan ini juga SDM pemandu wisata syariah wajib memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang dibuktikan dengan sertifikat. Penampilan sopan dan menarik sesuai prinsip syariah juga dibutuhkan. Disamping itu, Fatwa DSN ini juga memuat ketentuan bagi wisatawan untuk tetap berperilaku sesuai baik tidak melanggar aturan yang ada dan melakukan kemaslahatan di lingkungan obyek wisata halal.

## Bab III

# POTENSI WISATA HALAL

## A. DEMAND WISATA HALAL GLOBAL

**D**ewasa ini pariwisata merupakan salah satu sektor dalam ekonomi yang memiliki potensi yang luar biasa. Meningkatnya jumlah tujuan wisata dan investasi, menyebabkan sektor ini telah menjadi faktor penting dalam pendapatan devisa, pekerjaan, pengembangan bisnis dan infrastruktur. Kedatangan wisatawan internasional tumbuh 7,0% pada 2017, peningkatan tertinggi sejak krisis ekonomi global 2009 dan jauh di atas perkiraan jangka panjang UNWTO

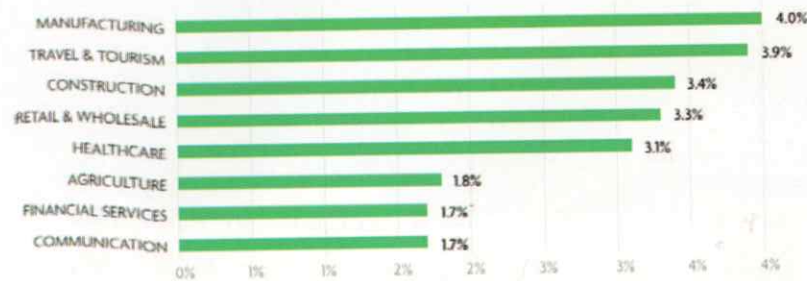


sebesar 3,8% per tahun untuk periode 2010 hingga 2020.

Selain itu, pariwisata juga merupakan salah satu sektor dengan pertumbuhan terbesar dan tercepat dibandingkan dengan sektor-sektor penting lainnya seperti konstruksi, ritail, kesehatan, pertanian, jasa keuangan dan komunikasi.

Gambar 2.

### GDP Growth Compared With Other Sectors, 2018



Sumber: World Travel and Tourism Council (WTTC, 2019).

Pariwisata adalah sumber pendapatan dan pekerjaan yang besar bagi negara-negara yang menerima lebih banyak wisatawan, dan ini berdampak signifikan pada ekonomi utama dunia. Karena alasan tersebut, banyak negara telah meningkatkan investasi mereka di industri pariwisata, termasuk beberapa kampanye dan strategi untuk menyoroti daya tarik destinasi utama mereka. Keadaan pariwisata saat ini telah menguntungkan semua benua di dunia, tumbuh dalam jumlah kedatangan wisatawan tahun demi tahun. Singkatnya, pariwisata telah menjadi pilar mendasar bagi pertumbuhan ekonomi semua negara, yang menyumbang sebagian besar

dari PDB dunia. Industri pariwisata mengalami pertumbuhan secara *eksponensial* selama bertahun-tahun. Laporan World Travel & Tourism Council (WTTC) menegaskan bahwa pariwisata dan perjalanan memiliki kontribusi positif terhadap ekonomi global di 185 negara dan 25 wilayah. Laporan ini mengungkapkan bahwa sektor ini menyumbang 10,4% dari PDB global dan 319 juta pekerjaan, atau 10 % dari total pekerjaan pada tahun 2018. (World Travel and Tourism Council (WTTC). *Economic impact and Trand*, 2019)

Perkembangan dunia pariwisata dan perjalanan tidak terlepas dari kunjungan wisatawan asing dan nasional. Pasar potensial yang diperkirakan akan terus tumbuh dari tahun ke tahun adalah kunjungan wisatawan Muslim. Hal ini dinyatakan dalam laporan Global Muslim Travel Index (GMTI 2019), bahwa pasar perjalanan Muslim tumbuh pesat, dan diperkirakan akan meningkat sebesar USD 80 miliar hingga USD 230 miliar pada tahun 2026. Pada tahun 2018, 140 juta jumlah wisatawan Muslim di dunia telah meningkat dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya 121 juta. Jumlah ini mewakili 10% dari total segmentasi sektor perjalanan secara keseluruhan. (GMTI, 2019) Tiga puluh negara menduduki posisi teratas diidentifikasi berdasarkan pasar Muslim saat ini dan juga pasar potensial, populasi Muslim di negara tersebut dan PDB per kapita. Dua puluh dari mereka berasal dari negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan sepuluh dari negara-negara non-OKI.





Gambar 3.  
Negara-negara tujuan pariwisata dunia,  
baik negara OKI maupun Non-OKI

**OIC Countries**

- |  |  |
|--|--|
|  Algeria    |  Morocco      |
|  Azerbaijan |  Nigeria      |
|  Bangladesh |  Oman         |
|  Egypt      |  Pakistan     |
|  Indonesia  |  Qatar        |
|  Iran       |  Saudi Arabia |
|  Jordan     |  Tunisia      |
|  Kazakhstan |  Turkey       |
|  Kuwait     |  U.A.E.       |
|  Malaysia   |  Uzbekistan   |

**Non-OIC Countries**

- |   |   |
|---|---|
|  China   |  Russia          |
|  France  |  Singapore       |
|  Germany |  The Netherlands |
|  India   |  U.S.A.          |
|  Italy   |  U.K.            |

Sumber: GMTI 2019

Meningkatnya jumlah turis Muslim yang mengunjungi banyak negara yang berpenduduk mayoritas Muslim dan minoritas Muslim mendorong peningkatan fasilitas pariwisata halal. GMTI (2019) memberikan gambaran ada 10 negara yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan Muslim. Tidak banyak perubahan sebetulnya dibandingkan dengan laporan GMTI tahun 2018. Sepuluh tujuan negara-negara Non-OKI teratas tetap sama. Sepuluh tujuan teratas

ini merupakan 22% dari perjalanan masuk Muslim, dan, Uzbekistan, dan Indonesia telah masuk sepuluh pasar masuk negara OKI teratas. Sepuluh tujuan ini merupakan 36% dari total pasar masuk Muslim. Dua puluh tujuan secara total merupakan 58% dari pengunjung Muslim.

Melihat data-data dan angka-angka di atas, maka sangatlah jelas permintaan (demand) akan wisata halal di tingkat global dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Peningkatan permintaan pada sektor pariwisata halal tidak lagi hanya negara-negara mayoritas Muslim tetapi sudah menyebar hampir ke negara-negara lainnya di dunia. Peningkatan tersebut menandakan bahwa pariwisata halal dapat diterima oleh berbagai wisatawan dikarenakan oleh beberapa sebab seperti meningkatnya jumlah populasi Muslim di dunia, pertumbuhan pendapatan kelas menengah (*middle income*)/ *Disposable Income* Muslim, kemauan negara-negara non Muslim dalam mengembangkan pariwisata halal, meningkatnya akses terhadap informasi travel, dan meningkatnya penyedia jasa travel yang ramah terhadap Muslim (*Muslim-friendly*).

**B. DEMAND WISATA HALAL NASIONAL**

Perkembangan pariwisata global yang semakin signifikan secara tidak langsung juga berdampak positif kepada negara berkembang, tidak terkecuali dengan Indonesia. Hal ini disebutkan dalam laporan WTTC (2018) dimana Indonesia menempati peringkat ke-9 dari 10 besar pariwisata terkuat di dunia. Posisi ini adalah yang terbaik dibandingkan negara-



negara ASEAN lainnya seperti Thailand yang berada di peringkat 12, Malaysia dan Filipina di peringkat 13, Singapura di peringkat 16 dan Vietnam di posisi ke-21. Daftar *Travel & Tourism Countries Power Ranking (absolute growth)* per 2017 (WTTC, 2018) dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4  
Daftar Travel & Tourism Countries Power Ranking per 2017

Countries	Overall rank	GDP Rank
China	1	1.5
United States	2	2.5
India	3	4.25
Mexico	4	6.75
United Kingdom	5	8
Spain	6	9.25
Spain	7	10.75
Canada	8	13
Indonesia	9	14.25
Australia	10	14.75
United Arab Emirates	10=	14.75
Thailand	12	15.5
Philippines	13	19.75
Malaysia	13=	19.75
Sweden	15	24
Singapore	16	25.75
Norway	17	26
Chile	18	26.75
Italy	19	27.75
Iran	20	28.75
Vietnam	21	29.5

Sumber: Laporan *Travel & Tourism Economic Impact World* (WTTC, 2018)

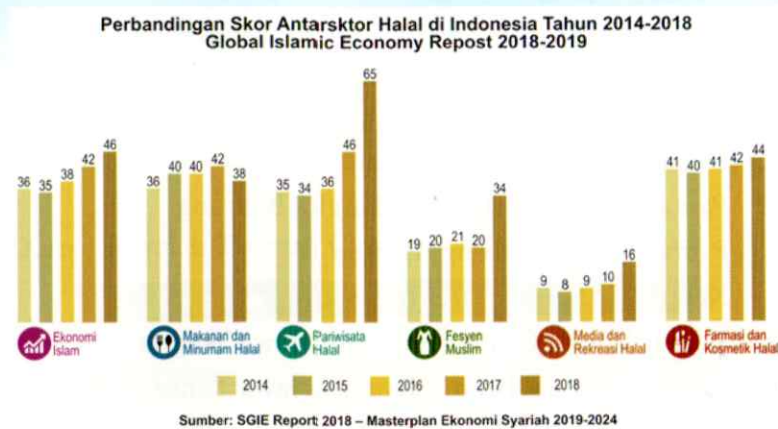
Salah satu upaya dari Kementerian Pariwisata untuk meningkatkan jumlah wisatawan domestik dan asing yaitu melalui program 10 destinasi wisata unggulan Indonesia tahun 2019 (IMTI: 2019). Kesepuluh tempat wisata tersebut yaitu:

1. Danau Toba, Sumatera Utara
2. Pantai Tanjung Kelayang, Bangka Belitung
3. Pantai Tanjung Lesung, Banten
4. Kepulauan Seribu, DKI Jakarta
5. Taman Wisata Candi Borobudur, Jawa Tengah
6. Taman Nasional Bromo Tengger, Jawa Timur
7. Kawasan Mandalika, Lombok, NTB
8. Labuhan Bajo, NTT
9. Pulau Morotai, Halmahera, Maluku Utara
10. Taman Nasional Wakatobi, Sulawesi Tenggara

Kekuatan Indonesia pada pariwisata dunia selain karena demand pariwisata halal global yang cukup baik, juga karena posisi pariwisata Indonesia menempati 10 negara terkuat pariwisatanya. Pariwisata Indonesia, sebagaimana sudah disebutkan di atas, mengalahkan pariwisata negara tetangga di ASEAN. Keadaan demikian tentu berimbas kepada demand pariwisata halal Indonesia secara nasional. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari pemaparan Kementerian Pariwisata RI pada pra konvensi pedoman pariwisata halal 2019 yang membandingkan trend travel halal di Indonesia dari mulai tahun 2014 sampai 2018.



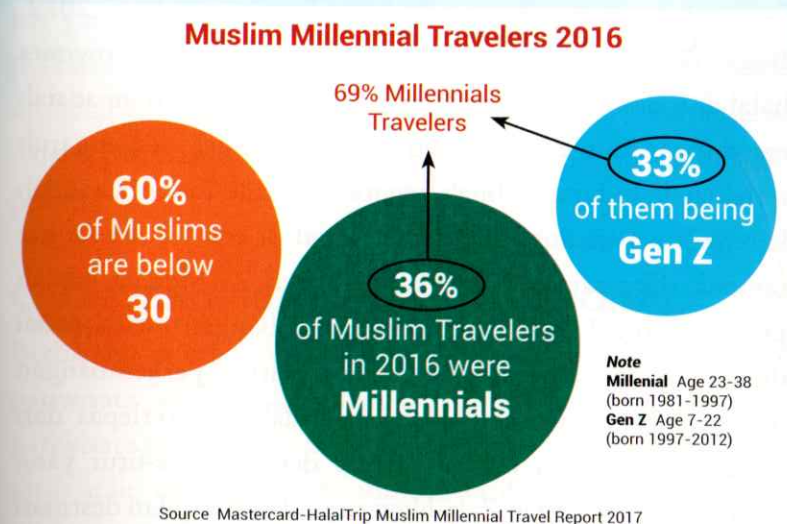
Gambar 4.  
Trend Wisata Halal Indonesia



Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, trend pariwisata halal di Indonesia sangat tinggi pada posisi kenaikan 65% di tahun 2018. Permintaan tersebut tumbuh besar mengalahkan industri halal lainnya seperti keuangan Islam, makanan dan minuman halal, fesyen Muslim, media dan rekreasi halal serta farmasi dan kosmetik halal.

Permintaan pasar pariwisata halal Indonesia yang terus meningkat tersebut, pada tahun 2016 terjadi karena dipengaruhi oleh perkembangan wisatawan Muslim Milenial (umur 23-38, kelahiran 1981-1997) dan Gen Z (umur 7-22: kelahiran: 1997-2012) terhadap perkembangan trend travel halal.

Gambar 5.  
Perjalanan Muslim Milenial



Muslim berusia muda menjadi segmen dari halal *travel/halal tourism*. Kelompok milenial Muslim pada tahun 2016 berusia rata-rata 24 tahun. Kelompok ini adalah pemuda dewasa, tidak ketergantungan dengan orang tua. Milenial Muslim membutuhkan pariwisata dan keramaham dengan keunikan jasa yang ditawarkan yaitu *Muslim Friendly*. Pernyataan ini sesuai dengan laporan *Dubai the Capital of the Islamic Economy 2013* yaitu banyaknya jumlah milenial Muslim merupakan pangsa pasar bagi industri makanan, perbankan, keuangan, fesyen, kosmetik, bahkan travel industry. Adapun menurut data tersebut total milenial Muslim di seluruh dunia yaitu 62% di bawah umur 30 tahun.



Permintaan pariwisata nasional juga tidak terlepas dari peran generasi gen Z. Gen Z adalah mereka yang berumur 7-22 tahun. Rata-rata mereka kelahiran tahun 1997-2012. Bagaimana peran mereka dalam meramaikan pasar pariwisata halal di Indonesia? Perlu diketahui di era digital 4.0 ini adalah era dimana dunia sosial media adalah sangat berpengaruh terhadap kehidupan sebuah negara termasuk Indonesia. Oleh karena itu, pertumbuhan media sosial di era 4.0 itu sangat tampak dikuasai oleh mereka para gen Z. Mereka adalah generasi yang lebih menguasai perkembangan media sosial dibandingkan generasi sebelumnya. Seiring perkembangan dan promosi pariwisata halal juga tidak bisa terlepas dari media sosial, maka medsos penuh dengan fitur-fitur yang menarik bagi para gen Z. bahkan tampilan-tampilan destinasi pariwisata halal di berbagai negara yang sangat terpencil mampu dijangkau oleh mereka. Dengan disain fitur destinasi pariwisata halal yang menarik maka tidak heran mereka banyak melakukan petualangan (wisata backpacker) untuk berwisata di Indonesia dan salah satunya destinasi pariwisata halal yang sedang trend.

Mereka gen Z, sangat tergantung kepada kebutuhan akan internet, media sosial, dan smartphone untuk penemuan tempat dan pemesanan perjalanan di kalangan wisatawan milenial dan Gen Z. *The Mastercard-Crescent Rating Digital Muslim Travel Report 2018* (DMTR 2018) mengungkapkan bahwa pengeluaran perjalanan daring oleh wisatawan Muslim diperkirakan akan melebihi 180 miliar dolar AS pada 2026.

Chief Executive dari *Crescent Rating dan Halal Trip* Fazal Bahardeen mengatakan bahwa digital adalah sebuah hal yang nyata dan melampaui generasi. Dengan cepatnya perkembangan teknologi dan metode pembayaran serta munculnya penduduk digital Muslim sebagai segmen utama dalam pasar perjalanan halal, prospek ruang digital sangat positif.

### **C. OBYEK WISATA HALAL NASIONAL**

Berbicara obyek wisata halal adalah berbicara destinasi pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Destinasi pariwisata halal adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah (Fatwa DSN-MUI No. 108 tahun 2016). Banyak macam obyek wisata halal di Indonesia, sehingga Indonesia kaya akan variasi wisata yang luar biasa indahnya. Hal ini membuat para wisatawan atau turis terkagum akan keindahan dan kerifan lokal destinasi pariwisata halal yang dimiliki oleh wilayah di Indonesia masing-masing. Beberapa obyek wisata atau destinasi wisata halal tersebut adalah sebagai berikut:



## 1. Wisata Alam

Keberadaan kondisi alam Indonesia luar biasa indah, bahkan Indonesia dapat dikatakan sebagai surga dunia yang menyebabkan siapapun yang memandang dan mendiami Indonesia terutama para turis mancanegara sulit untuk melupakan Indonesia. Bahkan berita seperti *inews.id/travel*, *travel.tribunnews.com*. pada bulan Juli 2020 memberitakan 5 destinasi paling dirindukan selama Pandemi Covid-19. Indonesia adalah bagian dari 5 negara dengan obyek wisata yang sangat dirindukan oleh para turis. *Kepulauan Gili* di Lombok, NTB, terpilih sebagai “Top Five Most Missed Islands” atau pulau yang paling dirindukan oleh orang-orang di seluruh dunia selama Pandemi Covid-19 dan sementara itu Pulau Bali dikenal sebagai “Top Five Most Missed Islands”.

Obyek wisata alam di Indonesia yang ikut meramaikan dunia kepariwisataan adalah wilayah-wilayah geografis yang terbentang dari mulai bagian barat sampai bagian Indonesia Timur, seperti Pulau Weh yang berada di daerah paling barat di wilayah Indonesia. Di pulau ini ditemukan Tugu Nol Kilometer sebagai simbol awal perjalanan di wilayah Indonesia. Meskipun tidak terlalu besar, Pulau Weh memiliki keindahan alam khas Nusantara yang luar biasa. Untuk mencapai pulau ini, harus berlayar dengan kapal feri sekitar 2 jam perjalanan dari pelabuhan Ulee-Lheue (Banda Aceh) menuju pelabuhan Balohan (Pulau Weh) yakni pukul 08.00, 11.00, dan 16.00. Sedangkan dari pelabuhan yang sama apabila wisatawan ingin menggunakan kapal cepat menuju Pulau Weh, maka waktu perjalanan yang ditempu kurang

lebih 45 menit. Kapal cepat dalam sehari memiliki dua kali jadwal keberangkatan yakni pukul 08.00 dan 14.30. Salah satu spot yang menunjukkan keindahan alam Indonesia di Pulau Weh adalah Pantai Iboih. Pantai ini terkenal dengan panoramanya yang sangat indah. Air laut yang membentang tampak biru jernih. Pasir di sepanjang pesisir pantai pun terlihat putih dan lembut. Selain Pantai Iboih, ada pula beberapa pantai lain, antara lain Pantai Kasih, Pantai Tapak Gajah, Pantai Sumur Tiga, dan Pantai Anoi Itam, yang tak kalah memesona.

Danau Toba merupakan danau terbesar di Indonesia. Di tengah-tengah danau ini ada sebuah daratan yang cukup luas yaitu *Pulau Samosir*. Para turis dapat berkunjung ke Pulau Samosir dengan menumpang kapal feri selama 30 menit melalui Pelabuhan Ajibata di Prapat menuju Pelabuhan Tomok di Samosir. Di Pulau Samosir, para pengunjung dapat mengeksplorasi sejarah dan kebudayaan masyarakat lokal. Berada sekitar 900 meter dari permukaan laut, suasana di sekitar Danau Toba terasa sejuk. Jangan lupa memilih spot terbaik untuk menyaksikan keelokan Danau Toba yang sempurna. Jika ingin lebih puas menjelajah obyek wisata alam Indonesia ini, carilah penginapan terdekat.

Keindahan alam Indonesia yang merupakan bagian dari obyek wisata alam lainnya adalah *Taman Nasional Bunaken*. Taman Nasional ini terletak di Sulawesi Utara, tepatnya di *Segitiga Terumbu Karang*. Di kawasan ini, ada sekitar 390 spesies terumbu karang serta berbagai jenis ikan dan hewan laut. Tak heran jika banyak wisatawan datang ke Taman Laut





Gambar 6. Taman Bunaken Sulawesi Utara, [datawisata.com](http://datawisata.com)



Gambar 7. Raja Ampat Papua, [unsplash.com](http://unsplash.com)

Bunaken untuk menyaksikan habitat bawah laut dari dekat. Aktivitas favorit selama berada di Taman Laut Bunaken adalah diving dan snorkeling. Bahkan, Bunaken disebut-sebut sebagai destinasi wisata menyelam terbaik di Indonesia.

*Raja Ampat Papua* adalah Pianemo atau Painemu yang merupakan kawasan karst. Gugusan pulau karang ini tampak cantik membentang di laut sehingga sering dijuluki “Surga Kecil” di Tanah Papua. Terdapat juga istilah *Laguna Bintang*, yaitu laguna yang berbentuk seperti bintang dan memiliki air berwarna hijau toska. Laguna yang terbentuk secara alami ini bisa dinikmati secara utuh dari puncak bukit. Berkunjung ke Raja Ampat juga tidak akan lengkap jika belum menginjakkan kaki di *Arborek*. Ini adalah sebuah pulau kecil di Raja Ampat

yang memiliki pantai landai dengan arus air yang tenang. Hamparan pasir berwarna putih berpadu dengan pepohonan kelapa menciptakan suasana yang sangat eksotis.

Obyek pegunungan yang dimiliki Indonesia juga tidak kalah menariknya dibandingkan dengan obyek wisata alam pantai Indonesia. Banyaknya jenis gunung di Indonesia menyebabkan para turis terutama dari mancanegara yang sangat takjub terhadap Indonesia. Salah satu destinasi gunung ini ialah *Kawah Ijen* yang berada di Banyuwangi Jawa Timur. Destinasi wisata alam populer di Indonesia ini terkenal akan kawahnya yang mengeluarkan api berwarna kebiruan. Berada pada ketinggian 2.368 meter di atas permukaan laut, tengah malam sebelum matahari terbit adalah waktu terbaik



untuk mencapai puncak dari Kawah Ijen dimana bagi para wisatawan yang tertarik dengan wisata ini dapat menyaksikan eksotisme api biru yang terdapat di kawah tersebut.

*Gunug Bromo* di Jawa Timur adalah salah satu gunung yang sangat populer di kalangan wisatawan karena menawarkan keindahan alam Indonesia yang menakjubkan. Meskipun berstatus sebagai gunung berapi aktif, Bromo tidak pernah sepi dari pengunjung. Terdapat sejumlah spot menarik di sekitar kawasan Gunung Bromo yang menjadi favorit wisatawan. Salah satunya, *Puncak Penanjakan* yang kerap menjadi lokasi untuk menyaksikan panorama matahari



Gambar 8. Gunung Bromo Tengger Jawa Timur, [pixabay.com](https://pixabay.com)

terbit. Puncak Penanjakan telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang mendukung untuk melakukan ibadah, mulai dari toilet, Mushola, hingga kios makanan halal.

Masih banyak pantai dan pegunungan di Indonesia, selain yang telah disebutkan di atas, yang menjadi destinasi penting misalnya, Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat, Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat, pegunungan di wilayah Sumatera Barat dan lainnya. Semua itu adalah obyek wisata alam Indonesia yang sangat sulit diungkapkan keindahannya dengan kata-kata. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia, KH Muhyiddin,



Gambar 9. Gunung Tangkuban Parahu Jawa Barat, [pixabay.com](https://pixabay.com)



tersebut. Hal ini tentu menjadi pilihan utama Muslim secara nasional dan global yang datang mengunjungi pariwisata di Indonesia. Sertifikat halal telah mendapatkan pengakuan 48 badan sertifikasi asing di 22 negara. Sementara itu, pada 8 Februari 2018 MUI telah mengakui lembaga sertifikasi asing (Certification Bodies/CB) dari 45 negara. (Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024)

Sertifikasi halal oleh BPJH dan MUI memainkan peran penting karena didefinisikan sebagai pemeriksaan proses produk tertentu dan memenuhi persyaratan higienis, sanitasi, dan keselamatan. Produk yang disertifikasi Halal oleh dewan

dapat menggunakan logo halal merek dagang terdaftar. Oleh karena itu, Hughes dan Malik (2017) mempertimbangkan sertifikasi halal sebagai kunci yang memungkinkan pengembangan industri halal global yang sukses. Keunggulan kompetitif diperoleh oleh perusahaan dengan sertifikasi halal, terutama jika mereka ingin menembus komunitas Muslim di banyak negara. Beberapa obyek wisata kuliner Halal Indonesia yang dapat dinikmati dan di kunjungi oleh wisatawan

Begitu menariknya kuliner Indonesia, berbagai even festival kuliner dilaksanakan. Bahkan ada ajang yang disebut dengan *World Halal Tourism Award* (WHAT). Sebuah even



Gambar 10. Kuliner Khas Indonesia, [freepik.com](https://www.freepik.com)



yang digelar di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada tahun 2016 memposisikan Sumatera Barat (Sumbar) yang memiliki makanan khas nasi Padang dan masakan khas padang lainnya, sebagai juara Destinasi Wisata Halal Terbaik Dunia. Salah satu nominator dalam WHAT tersebut adalah World's Best Halal Culinary Destination. Berdasarkan predikat yang dicapai oleh Sumbar dalam ajang tersebut memperjelas dan memptegas bahwa Sumbar sebagai obyek wisata kuliner halal Indonesia yang terbaik. Di tingkat nasional dan internasional wisata kuliner tersebut sangat layak untuk didatangi oleh turis-turis baik yang dari luar negeri maupun yang lokal.

Rendang sebagai icon pada kuliner Padang ini, dari materi halalnya tidak diragukan lagi, karena rendang itu berasal dari daging sapi, di negara mana saja mudah mencarinya. Bumbu-bumbunya itulah yang membuatnya semakin khas, dan kuat. Soal kuliner, Sumatera Barat memang harus diakui, salah satu jagoan kuliner dunia. Sementara untuk makanan yang spesial lainnya adalah soto dan sate Padang. Selain kaya bumbu dan cita rasanya yang **sangat nikmat dan lezat** di lidah, dua kuliner itu, telah masuk daftar 30 *Ikon Kuliner Tradisional Indonesia* (IKTI). Makanan halal di Sumatera Barat sangat penting dan mendapatkan dukungan dari mayoritas penduduk di provinsi Sumatera Barat yang muslim. Mereka akan sangat hati-hati dan menjaga kehalalan setiap makanan yang dikonsumsi oleh setiap orang.

Wisata kuliner Indonesia lainnya selain Sumatera Barat adalah Lombok Nusa Tenggara Barat yang masuk dalam nominasi kuliner halal, yaitu *Ayam Taliwang*. Ayam Taliwang

adalah makanan khas Lombok Nusa Tenggara Barat yang telah menjadi pemenang kuliner halal khas daerah pada tahun 2016. Makanan yang sebetulnya khas Suku Sasak di Lombok Nusa Tenggara Timur ini dinobatkan sebagai makanan khas daerah yang halal dan memperoleh penghargaan dari *Pesona Indonesia* selaku pelopor pariwisata Indonesia. Ciri khas dari Ayam Taliwang ini adalah olahan ayamnya yang gurih dan empuk serta bumbunya yang pedas meresap. Oleh karena Lombok Nusa Tenggara Barat bagian dari destinasi halal tingkat dunia, tentu makanan-makanannya pun (termasuk Ayam Taliwang ini) memiliki sertifikasi halal. Terdapat banyak tempat makan dan restoran di Lombok yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari lembaga yang berwenang, sehingga layak sekali wilayah ini menjadi wisata kuliner halal selain destinasi halalnya.

Indonesia memiliki kekayaan kuliner yang luar biasa di berbagai daerah. Selain contoh-contoh kuliner yang sudah disebutkan di atas terdapat kuliner lain yang menghiasi kepariwisataan Indonesia, seperti masakan Betawi (semur, pecak dan lain-lain), masakan Sunda (pepes, sayur asam dan lain-lain), masakan Cirebon (empal gentong dan lain-lain), masakan Yogyakarta (gudeg dan lain-lain), masakan Jawa Tengah (soto, sroto, sop, pecel, bandeng presto, bakso, dan lain-lain), masakan Jawa Timur (rawon, rujak cingur dan lain-lain), masakan Palembang (pempek dan lain-lain), masakan Banjar (soto dan lain-lain), masakan Makassar (coto, sop konro, palumara dan lain-lain), dan masakan Manado (woku-woku dan lain-lain). Makanan ringan dalam bentuk snack,



seperti aneka keripik, dodol, bakpia, getuk gorengan, wingko, wajit, rengginang, dan lain-lain. Bahkan, Indonesia sangat kaya dengan kopi dan teh yang dihasilkan oleh berbagai perkebunan swasta dan BUMN, maupun perkebunan rakyat.

Keberlakuan *UU Jaminan Produk Halal (JPH) No. 33 Tahun 2014*, yang sudah bersifat wajib (mandatory) tentu akan menjadi lebih efektif dan kepastian hukum bagi jenis-jenis dan produk di atas. Kelompok makanan dan minuman merupakan kelompok pertama yang wajib (mandatory) menerapkan sertifikat halal. Dengan gencarnya program sertifikasi halal (termasuk bantuan biaya, bahkan penggratisan biaya sertifikasi halal) yang dilakukan oleh *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)* – bekerja sama dengan stakeholder terkait, maka berbagai produk makanan dan minuman dari berbagai daerah di Indonesia segera beresertifikasi halal. Dengan demikian, tidak ada keraguan lagi wisatawan Muslim dari negara mana pun untuk menikmati aneka kuliner halal khas Indonesia di berbagai destinasi wisata halal yang mereka kunjungi.

### 3. Wisata Religi

Keunikan lain yang juga dimiliki oleh Indonesia dalam hal obyek wisata halal adalah wisata religi yang terlebih dahulu sudah ada dan dikenal oleh masyarakat Indonesia. Obyek wisata religi ini meliputi masjid-masjid di Indonesia, makam-makam orang shaleh dan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kini, masjid, makam dan situs kerajaan Islam menjadi obyek kunjungan masyarakat Indonesia yang sangat

terjangkau. Dengan melihat bahwa Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, maka masjid, makam dan situs kerajaan Islam otomatis menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi, terutama untuk beribadah dan mengetahui sejarah Islam masa lalu di Indonesia. Sedangkan di luar masjid, makam orang shaleh dan situs kerajaan Islam juga dapat memberikan kenyamanan kepada pendatang yang melakukan perjalanan. Di sinilah posisinya sebagai tempat wisata religi yang sangat mempunyai sejarah kuat.

Di Indonesia ada sekitar 800 ribu masjid. Dari jumlah tersebut, terdapat bermacam-macam daya tarik: masjid tertua, masjid bersejarah, masjid terbesar, masjid ikonik, masjid terkenal, masjid terindah dan lain-lain.

Berikut ini beberapa contoh masjid-masjid yang sangat layak dikunjungi oleh para wisatawan Muslim, baik domestik (lokal) maupun mancanegara: Masjid Istiqlal, Masjid Ramlee Musthofa yang dijuluki Taj Mahal Indonesia, Masjid Luar Batang, Masjid Lao Tze, dan Masjid Cut Mutia (Provinsi



Jakarta, freepik.com



Masjid Agung Jawa Tengah, unsplash.com



DKI Jakarta); Masjid Raya Provinsi Jawa Barat, Masjid Al-Furqan UPI Bandung, Masjid Salman ITB, Masjid Cipaganti, dan Masjid Al Irsyad (Bandung, Jawa Barat); Masjid Agung Banten, Masjid Cikoneng, Masjid Caringin, Masjid Pacinan Tinggi (Banten), Masjid Agung Jawa Tengah, Masjid Besar Kauman, Masjid Kapal Bahtera Nabi Nuh, replika Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, Masjid Taqwa Sekayu (Jawa Tengah), Masjid Syuhada, Masjid Gede Kauman, Masjid Gede Mataram Kotagede, Masjid Nurumi, Masjid Khadijah, Masjid Jogokariyan (Yogyakarta); serta Masjid Sunan Ampel, Masjid Nasional Al-Akbar, Masjid Rahmat, Masjid Cheng Hoo, Masjid Kemayoran (Jawa Timur).

Pulau Lombok-Nusa Tenggara Barat, juga salah satu wilayah yang unik dan menarik. Lombok dari mulai tahun 2015 sampai 2019 memiliki berbagai macam prestasi sehingga Indonesia dikenal dunia sebagai pariwisata halal. Adapun prestasi tersebut adalah World's Best Halal Tourism Destination dan World's Best Halal Honeymoon Destination.

Pada tahun 2016, Lombok NTB mendapatkan penghargaan *World Halal Tourism Award* di Abu Dhabi.

Kementraian Pariwisata RI menunjuk pulau ini termasuk dalam pengembangan pariwisata halal dari 10 Provinsi yang diprioritaskan, karena NTB dinilai memiliki potensi di sektor kepariwisataan halal yang kiranya dapat menarik wisatawan mancanegara dari Timur Tengah dan Asia. Provinsi ini terkenal dengan kekayaan dan keindahan alam yang sangat eksotis, sehingga dijadikan sebagai *role model* dalam industri pariwisata halal di Indonesia.

Lombok NTB juga mendapat julukan daerah seribu masjid. Banyaknya masjid dengan arsitektur yang bermacam-macam dan unik menandakan penduduk pulau ini sangat religius. Masjid-masjid di Lombok sangat mudah ditemui oleh wisatawan, karena keberadaan masjid hampir berdekatan dan berjarak beberapa meter. Dari jumlah 4.500 Masjid yang ada di Lombok NTB, lima masjid yang terindah yaitu Masjid Islamic Center (Mataram), Masjid Al Akbar, Masbagik (Lombok Timur), Masjid Kopang (Lombok Tengah), Masjid Agung Praya (Lombok Tengah), dan Masjid Jamiq, Selong (Lombok Timur).

Di Aceh, paling tidak ada lima masjid terbesar yang perlu dikunjungi saat melakukan wisata halal ke kota berjuluk "Serambi Mekkah" itu. Yaitu, Masjid Raya Baiturrahman (Banda Aceh), Masjid Agung Kota Meulaboh, Masjid Baitul Musyahadah, Masjid Teuku Dianjong dan Masjid Baiturrahim. Di Kota Padang, Sumatera Barat, setidaknya ada lima masjid terbesar yang perlu dikunjungi. Yaitu, Masjid Raya Sumatera Barat, Masjid Baiturrahmah Padang, Masjid Rahmatan Lil'alamin, Masjid Raya Gantiang, fan Masjid Nur Zikrullah. Di Sumatera Utara terdapat sejumlah masjid yang tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan. Masjid-masjid tersebut antara lain, Masjid Ahung Kisaran, Masjid Azizi Tanjung Pura Langkat, Masjid Raya Al-Osmani Labuhan Deli Medan, Masjid Raya Al Mashun Medan, dan Masjid Al Abror Padang Sidempuan. Di Provinsi Riau, banyak masjid yang sangat layak dikunjungi wisatawan. Contohnya, Masjid Agung An-Nur Pekanbaru, Masjid Madani Islamic Center



Rokan Hulu, Masjid Al-Ikhsan Islamic Center Kampar, Masjid Istiqomah Bengkalis, dan Masjid Sultan Syarif Hasyim Siak. Di Palembang (Sumatera Selatan), ada lima masjid bersejarah yang perlu dikunjungi saat berwisata ke kota empek-empek tersebut. Yaitu, Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin II, Masjid Sultan Agung, Masjid Suro, Masjid Lawang Kidul, Masjid Ki Marogan.

Di Makassar (Sulawesi Selatan), ada enam masjid yang wajib dikunjungi oleh wisatawan Muslim yang berkunjung ke kota tersebut. Yaitu, Masjid Al-Markaz Al-Islami, Masjid Raya Sulawesi Selatan, Masjid Terapung Makassar, Masjid Muhammad Cheng Hoo, Masjid Kuta Katangka, dan Masjid Al-Fatih Al-Anwar Makassar. Di Provinsi Kalimantan Selatan, ada lima masjid bersejarah yang perlu dikunjungi, yaitu Masjid Jami Sungai Jingah Banjarmasin, Masjid Agung Al-Karamah Martapura, Masjid Ba'angkat (As-Su'ada) Hulu Sungai Selatan, Masjid Banua Lawas Tabalong, dan Masjid Keramat Banua Halat Tapian.

Di Maluku, ada sejumlah masjid bersejarah yang perlu dikunjungi, yakni Masjid Jami Ambon, Masjid Batu Merah, Masjid Mapauwe. Di Ambon juga terdapat Masjid Al-Fatih yang sangat terkenal. Di Merauke, Papua, Masjid Raya Al-Aqso menjadi land mark kota di provinsi ujung timur Indonesia.

Sementara itu, jumlah hotel syariah di Indonesia juga terus tumbuh dan berkembang di berbagai kota. Umumnya hotel syariah tersebut berbintang tiga, kecuali Syariah Hotel Solo yang berbintang empat. Adapun sejumlah hotel syariah

di Indonesia saat ini antara lain: Hotel Sofyan, Zenrooms Menteng Syariah (Jakarta), Orange Homes Syariah, Ruby Hotel Syariah (Bandung), Home Anaya Hotel Syariah, Hotel Madani Syariah (Medan), Azizah Syariah Hotel, Syariah Hotel Kota Dolo, Namira Syariah Hotel (Pekalongan), Hotel Desa Pan Syariah (Yogyakarta), Grand Kalimas Hotel (Surabaya), dan Q Grand Dafam Syariah (Banjarbaru).

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo mengatakan besarnya potensi jumlah wisatawan muslim global yang berkunjung ke Indonesia menjadikan wisata halal sebagai sektor pendorong industri halal Indonesia. Chairman Sofyan Hotels Tbk, Riyanto Sofyan mengutip data dari SICTA-WTO menyebutkan, ada 185 destinasi usaha di bidang pariwisata yang memiliki pengaruh ekonomi terbesar. "World Bank menyebutkan pariwisata menjadi kontributor terbesar secara efisien dan cepat dalam pertumbuhan GDP, dan pertukaran warga dunia," Indonesia mampu memenangkan persaingan pasar wisata halal dunia, dengan syarat harus melakukan hal-hal strategis. Langkah strategis yang harus dilakukan Indonesia adalah menciptakan logo mengembangkan icon serta mempromosikan paket wisata halal unggulan Indonesia. Kemudian promosi dan perlu melaksanakan leadership initiatives guna meningkatkan brand equity Indonesia sebagai destinasi utama wisata halal dunia. Indonesia juga dikenal sebagai bangsa yang memiliki banyak situs Islam bersejarah termasuk kerajaan-kerajaan Islam. Diantara beberapa destinasi pariwisata halal dalam negeri ini adalah sebagai berikut:



## 1. Masjid Raya Baiturrahman Aceh

Masjid Raya Baiturrahman di Aceh ini juga menjadi salah satu situs kerajaan Islam di Indonesia yang wajib dikunjungi. Masjid yang menjadi ikon Aceh ini merupakan masjid dari Kesultanan Aceh yang didirikan oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam pada abad 1612 Masehi.

Masjid ini memiliki bentuk bangunan yang menyerupai Taj Mahal dan menjadi pusat kegiatan di Aceh Darussalam. Pada masa penjajahan Belanda, masjid ini pernah dibakar oleh tentara Belanda saat menyerang Kesultanan Aceh di tahun 1873 Masehi. Namun, Belanda kemudian mendirikan masjid ini kembali untuk meredam kemarahan masyarakat Aceh dan menarik simpati mereka.



Gambar 12. Masjid Baiturrahman Aceh, [unsplash.com](https://unsplash.com)

## 2. Keraton Yogyakarta

Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau biasa dikenal dengan Keraton Yogyakarta ini juga merupakan salah satu peninggalan situs kerajaan Islam di Indonesia, yaitu Kerajaan Mataram. Keraton Yogyakarta ini dibangun oleh Sultan Hamengku Buwono I pada tahun 1755. Meskipun saat ini Kesultanan ini telah menjadi bagian dari Republik Indonesia, namun kompleks keraton ini masih digunakan sebagai tempat tinggal dari sultan dan keluarga yang mana mereka masih menjalankan tradisi kesultanan hingga saat ini.



Gambar 13. Keraton Yogyakarta, [pixabay.com](https://pixabay.com)





Gambar 14. Istana Maimun Medan, [id.wikipedia.org](https://id.wikipedia.org)

### 3. Istana Maimun

Istana Maimun juga menjadi salah satu peninggalan situs kerajaan Islam di Indonesia yang patut untuk Anda kunjungi. Berada di Kota Medan, Sumatera Utara, Istana Maimun adalah peninggalan Kerajaan Deli. Istana ini didirikan oleh Sultan Deli yang bernama Sultan Mahmud Al Rasyid dan didesain oleh seorang arsitek berkebangsaan Italia. Pembangunan istana ini dilakukan pada tahun 1888 dan selesai pada tahun 1891. Luasnya yang mencapai 2.772 meter persegi ini membuat istana ini memiliki sebanyak 30 ruangan. Istana ini memiliki dua lantai dengan 3 bagian bangunan, yaitu bangunan induk, bangunan sayap kiri dan sayap kanan.



Gambar 15. Keraton Kasepuhan Cirebon, [kebudayaan.kemdikbud.go.id](https://kebudayaan.kemdikbud.go.id)

### 4. Keraton Kasepuhan

Jika wisatawan berkunjung ke Cirebon, akan singgah ke Keraton Kasepuhan Cirebon yang menjadi wisata ikonik. Keraton Kasepuhan Cirebon ini merupakan situs kerajaan Islam di Indonesia, yaitu Kerajaan Cirebon. Dibangun pada tahun 1529 oleh Pangeran Cakrabuana, keraton ini juga menjadi saksi kejayaan kerajaan Islam dan perkembangan ajaran Islam saat itu. Di depan keraton ini ada sebuah Alun-Alun yang dulunya bernama *Alun-Alun Sangkala Buana*. Alun-Alun ini merupakan tempat latihan prajurit yang diadakan setiap hari Sabtu dan juga sebagai titik pusat kompleks pemerintahan keraton.



## 5. Istana Sultan Ternate Maluku Utara

Situs kerajaan Islam di Indonesia yang terakhir adalah Istana Sultan Ternate. Istana ini merupakan peninggalan Kerajaan Ternate yang dikenal sebagai kerajaan Islam tertua di Maluku. Bangunan istana ini bergaya abad ke-19 dengan dua lantai yang menghadap ke laut. Istana ini juga dikelilingi oleh banteng dan berada satu kompleks dengan masjid Jami Ternate. Istana Sultan Ternate ini telah melewati dua kali pemugaran antara tahun 1978 hingga 1982 yang dilakukan oleh DR Daoed Joesoef. Saat ini, kompleks ini menjadi Museum Kesultanan Ternate yang menyedot perhatian banyak wisatawan.

## 6. Makam Orang-orang Shaleh (Para Wali)

Makam orang-orang Shaleh adalah salah satu situs warisan umat Islam di Indonesia yang tidak kalah pentingnya dalam sejarah masuknya Islam di Indonesia. Makam-makam ini selalu ramai dikunjungi oleh umat Islam. Istilah lain kunjungan wisatawan ke makam-makam yang dianggap suci ini adalah Ziarah Wali atau wisata religi. Destinasi wisata religi, di mana penziarahan tidak lagi dipandang dari sisi spiritualitas semata tetapi, juga dijadikan untuk menaikkan prestise dan menaikkan pendapatan ekonomi yang didapatkan dari ramainya peziarah di sana. Walaupun situs-situs makam orang shaleh tidak seperti di Timur Tengah yang banyak di kunjungi wisatawan Mancanegara, tetapi sangat jelas wisata religi ini memiliki pasar wisatawan Muslim domestik yang selalu ramai dikunjungi. Kebiasaan wisatawan Muslim ini tentu akan menaikkan perekonomian Indonesia khususnya daerah di





mana terdapat situs-situs tersebut. Teavel bus ziarah, pernak-pernik di sekitar makam, tempat penginapan atau hotel yang terdekat dengan situs ini dan beberapa kegiatan yang terlibat di dalamnya tentu akan terpengaruh pendapatannya dan akan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Fenomena wisata religi juga tidak bisa mengesampingkan perkembangan infrastruktur dan alat transportasi yang semakin mudah dan terjangkau secara ekonomis. Wisata religi, yang biasa dilakukan dalam perjalanan 3-5 hari tentu saja menghabiskan dana yang tidak sedikit. Dana itu terpakai untuk menyewa bus atau mobil dan juga untuk bekal dan membeli oleh-oleh. Karena itu, selain menjadi berkah bagi para pedagang di sekitar penziarahan, fenomena wisata religi juga menguntungkan pemerintah yang menarik pajak retribusi (biasanya dari parkir kendaraan) dan juga para pengusaha angkutan transportasi atau agen-agen dan biro wisata perjalanan. Bisa dipahami kemudian, ini menjadi ladang bisnis tersendiri (Anwar Masduki, 2015: 181)

Beberapa makam orang-orang shaleh di Indonesia yang biasa dikunjungi oleh wisatawan Muslim domestik Indonesia, diantaranya adalah: untuk wilayah Jawa terkenal dengan ziarah makam Wali Sanga, makam para habib dan makam ulama pendiri pondok pesantren di Indonesia. Makam Wali Pitu di Buleleng Bali, Makam Guru Sekumpul Banjarmasin Sulawesi Selatan, Makam Syech Burhanuddin di Pariaman Padang (Selvi dkk. 2017). Makam Sultan Muhammad Ali Ternate, Maluku dan banyak makam orang-orang shaleh lainnya terkait dengan situs-situs ulama penyebar agama Islam di Indonesia.

#### 4. Wisata Pendidikan Islam

Pesantren adalah lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Keberadaannya tidak terlepas dari peran ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia. Oleh karena keberadaannya tetap eksis dan berkembang sampai sekarang, ini membuktikan bahwa masyarakat pesantren (Pimpinan dan pengurus, santri, alumni, walisantri dan masyarakat sekitar pesantren) terus berbenah seiring perubahan zaman. Hal ini adalah salah satu kunci sukses keberadaaan pesantren, kemampuan berbenah dalam menghadapi perubahan. Dalam konteks pengembangan kini, pesantren dapat dijadikan sebagai salah satu bagian dari wisata Islam di Indonesia. Dalam tinjauan sejarah Islam, pesantren adalah kawah candradimuka bagi para penuntut ilmu dan dapat dikatakan sebagai wisata ilmiah atau *ribla fi thalabil ilmi* (E.J Brill, *libat ribla*). Konsep ini sudah terlebih dulu ada dan berkembang, sebelum adanya pariwisata modern sekarang. Konsep tersebut sudah dipraktekan sejak zaman Tabiin yang meriwayatkan hadis dan tafaquh fiiddin dalam mendalami ilmu fikih. Mereka mencari satu hadis dan mencari guru untuk mendalami ilmu melakukan perjalanan yang jauh, dari satu tempat ke tempat lain, dari satu wilayah ke wilayah lain bahkan menyeberangi lautan dan daratan yang begitu luas. Kemudian wisata dalam bentuk perjalanan di abad pertengahan dipopulerkan oleh Ibnu Bathutah dengan pola wisata religi, wisata kunjungan tugas kenegaraan, wisata dakwah dan termasuk wisata menuntut ilmu yang dikenal *rihla fi thalab al-Ilmi*.



Perspektif sejarah, lahirnya pesantren di Indonesia tidak lepas dari konsep wisata dalam arti rihla di atas. Konsep inilah yang sangat identik dengan wisata karena secara bahasa wisata adalah perjalanan. Sebagai peneguhan eksistensi pesantren yang sarat dengan fungsi sentral dalam sejarah ke-Islaman dan ke-Indonesiaan dapat ditelusuri dari konsep rihla fi thalabil ilmi yang dilakukan oleh para penyebar Islam di Indonesia. Maka layak sekalai pesantren sebagai bagian dari destinasi pariwisata halal yang potensinya harus terus digali dan dikembangkan.

Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia memiliki ribuan pesantren yang tersebar di berbagai pelosok nusantara. Pesantren sebagai lembaga pendidikan memiliki 5 elemen pokok; (1) Pondok atau asrama: adalah tempat tinggal bagi para santri. Pondok inilah yang menjadi ciri khas pesantren dan membedakannya dengan sistem pendidikan lain yang berkembang di Indonesia, (2) Masjid: merupakan tempat untuk mendidik para santri terutama dalam berbagai kegiatan seperti shalat, pengajian kitab klasik, pengkaderan kyai, dan lain-lain, (3) Pengajaran kitab-kitab klasik: merupakan tujuan utama pendidikan di pondok pesantren, (4) Santri: merupakan sebutan untuk siswa atau murid yang belajar di pondok pesantren, dan (5) Kyai: merupakan pimpinan pondok pesantren. Kata kyai sendiri adalah gelar yang diberikan masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang menjadi pimpinan pesantren dan mengajarkan kitab-kitab klasik. (Tradisi Pesantren: Zamakhsyari Dhofier, 1982).

Dari kelima ciri tersebut tersimpan banyak potensi yang bisa dikembangkan dari dunia pesantren. Salah satu yang

berpotensi dikembangkan adalah pesantren sebagai destinasi wisata halal. Hal ini seiring dan sejalan dalam memperkuat fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan dengan misi utama penguatan pemahaman keagamaan (*tafaqqub fiddin*). Sebagai destinasi wisata halal, pesantren wisata bisa menjadi publisitas yang marketable dan berkelanjutan.

Pengembangan potensi pesantren sebagai destinasi wisata halal banyak digali dari pesantren-pesantren dengan corak yang beragam di Indonesia. Terdapat pesantren tradisional, modern atau pesantren yang menggabungkann keduanya yang dikenal dengan Islamic Boarding School. Corak yang beragam tersebut menjadi keunikan tersendiri bagi destinasi pariwisata halal. Misalnya pondok pesantren Lirboyo Kediri, PP. Sidogiri Pasuruan, PP. Tebuireng Jombang, PP. Gontor Jawa Timur, PP. Darunnajah Jakarta, PP. Bulukumba Jawa Tengah, dan masih banyak lagi pesantren-pesantren yang jumlahnya melebihi lembaga pendidikan formal di Indonesia. Lembaga pendidikan Islam pesantren tersebut adalah lembaga yang memiliki karekter dan keunikan tersendiri. Karena kelebihan atau keunikan yang dimiliki pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam itulah maka banyak orang asing yang meneliti tentang itu. Diantara peneliti itu Seperti Martin Van Bruinessen dan Karel A. Steenbrink dan para peneliti lainnya, hingga sekarangpun masih banyak wisatawan asing yang datang dan berkunjung dalam rangka melihat dan memperhatikan keunikan lembaga pendidikan Islam yang terus eksis dan mampu beradaptasi dengan era 4.0.





Gambar 17. Pendidikan Islam Pesantren Amanatul Umah Jawa Timur, *kompasiana.com*



Gambar 18. Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur, *beritaSatu.com*

Destinasi merupakan suatu tempat tertentu yang dikunjungi dalam waktu yang signifikan atau tertentu selama masa perjalanan seseorang. Richardson dan Fluker (2004) mengemukakan sebuah pengertian tentang destinasi ini yaitu “a significant place visited on a trip, with some form of actual or perceived boundary. The basic geographic unit for the production of tourism statistics.” Dari pengertian ini, maka pesantren bisa dikategorikan sebagai destinasi, karena signifikannya waktu berkunjung saat orang bermobilisasi dari suatu titik ke titik lain (pesantren). Karena itulah konsep tentang turismepun memang perlu dikembangkan dalam rangka mengembangkan Wisata Pesantren atau Pesantren Wisata.

Sebetulnya, para wisatawan yang berada di suatu destinasi tertentu yang dikunjungi adalah konsumen meskipun bersifat sementara. Sebagai wisatawan mereka akan mengeluarkan sejumlah uang untuk keperluan selama berada di lokasi dan segala sesuatu yang diperlukan untuk dibawa pulang. Jika ini dikelola dengan baik, maka akan berdampak positif bagi perekonomian baik bagi pendapatan masyarakat, peluang kesempatan kerja, dan pendapatan pemerintah local. Ini juga akan menimbulkan multiplier effects. Kusdianto (1996), secara spesifik mengelompokkan destinasi wisata berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut: (1) Destinasi sumber daya alam, seperti iklim, pantai, hutan; (2) Destinasi sumber daya budaya, seperti tempat bersejarah, museum, teater, dan masyarakat lokal; (3) Fasilitas rekreasi, seperti taman hiburan, park buatan; (4) Even seperti pesta



kesenian Bali, Pesta Danau Toba, Pasar Malam; (5) Aktivitas spesifik, seperti Singapore Shopping Festival, Jakarta Shopping Festival, Surabaya Shopping Festival; (6) Daya tarik psikologis, seperti petualangan, perjalanan romantis, keterpencilan dan wisata edukasi.

Merujuk kelima ciri destinasi di atas, maka pesantren-pesantren yang tersebar di Indonesia, sesuai dengan kekuatan dan kelebihan yang telah dimilikinya maka pengelompokannya atau pemetaan ciri dan karakternya masing-masing dapat dilakukan secara bertahap untuk dijadikan destinasi pariwisata pendidikan dalam pariwisata halal Indonesia.

## Bab IV

# PELUANG WISATA HALAL

Pemandangan alam yang indah di Indonesia, banyak tidak dimiliki oleh negara-negara lain terutama negara-negara dengan penduduknya Muslim. Hal ini menjadi peluang tersendiri untuk pembangunan dan pengembangan pariwisata halal Indonesia yang memiliki 17.100 pulau dan 742 bahasa. Indonesia dengan jumlah penduduk 250 juta lebih adalah negara terbesar di kepulauan dengan panjang 5.120 km dari barat ke Timur dan 1.760 km dari Utara ke Selatan. Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar (88% dari populasi) dan 12,7% Muslim dunia (The Pew Forum on Religion & Public Life, 2018).



Berdasarkan ini, pengembangan pariwisata halal di masa depan sangat menjanjikan dan memiliki peluang besar yang bakal menjadikan Indonesia sebagai pusat pariwisata halal dunia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Haerisma (2018), industri halal menjadi tren global dan peluang bisnis di berbagai negara. Industri halal membawa kemanfaatan bagi perekonomian Indonesia dilihat dari sisi produk. Pasar pariwisata halal merupakan masa depan sumber ekonomi suatu bangsa. Permintaan pariwisata halal dunia sebagaimana ditunjukkan dalam bab sebelumnya, memiliki pertumbuhan positif sehingga seluruh negara dunia berlomba-lomba menyiapkan infrastrukturnya dan menjadi peluang bisnis sebagai devisa negara (Haerisma, Alvien Septian, 2018: 153-168).

Atas dasar itu, pembangunan pariwisata halal Indonesia harus juga memperhatikan kebutuhan dan harapan wisatawan yaitu kenyamanan dan ketenangan selama perjalanan tanpa melupakan nilai-nilai Islam. Nilai ini didukung oleh peningkatan komunitas Muslim kelas menengah, yang memiliki kesadaran halal terhadap produk halal (Alim, Riansyah, Hidayah, Muslim & Adityawarman, 2015). Berikut adalah peluang yang bisa dimanfaatkan:

## **A. SUMBER DAYA ALAM**

Sumber daya alam (SDA) Indonesia sudah tidak diragukan lagi keindahannya. SDA sebagai anugerah Illāhi yang

diberikan kepada bangsa dan masyarakat Indonesia adalah sangat penting dan utama dalam pariwisata Indonesia di dunia. Indonesia mempunyai keunggulan dalam hal sumber daya alam yang sulit ditandingi di kawasan Asia. Pantai, gunung, hutan, danau, sampai gurun pasir, suku yang beragam, adat istiadat yang hampir setiap daerah ada dan keramahan-tamahan masing-masing penduduk Indonesia adalah keindahan yang luar biasa. Pada tingkatan global, Indonesia berada di peringkat empat belas. Di Asia Tenggara, peringkat Indonesia hanya kalah dari Thailand. Atas kekayaan SDA Indonesia ini, maka menjadi alasan utama dalam pembentukan UU Kepariwisata Indonesia No. 10 Tahun 2009. Keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, merupakan sumber dan modal pembangunan kepariwisataan bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanah yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengembangan pariwisata alam memiliki prospek yang sangat baik. Indonesia mempunyai wilayah daratan yang sangat luas, termasuk di antaranya adalah area hutan hujan Tropis yang membentang di lebih dari 17 ribu pulau. Hutan dengan segala potensi yang dimiliki, baik keanekaragaman flora dan fauna maupun keunikan serta keindahan alamnya, sangat berpeluang untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata halal yang sangat menarik, terlebih lagi aturan destinasi pariwisata halal diantaranya tidak boleh ada kemudharatan dan kerusakan bagi alam. Ini adalah konsep wisata yang



menarik dan penting karena sesuai dengan UU Lingkungan yang wajib dijaga.

SDA di Indonesia tersebar hampir di seluruh pelosok Indonesia sehingga dapat dikembangkan secara optimal. Pengembangan SDA menjadi destinasi pariwisata akan dapat mendatangkan devisa negara yang tidak sedikit. Sebagai contoh adalah Komodo yang berada di *Taman Nasional Komodo*, hingga saat ini terus menjadi perhatian dunia internasional. Demikian pula dengan kekayaan taman laut yang tersebar hampir di seluruh wilayah perairan laut Indonesia. Salah satu contohnya adalah *Taman Nasional Laut Bunaken Manado Tua*. Taman Nasional ini sudah tidak asing lagi bagi wisatawan mancanegara yang memiliki hobi menyelam (snorkling dan diving). Di samping itu, masih banyak obyek wisata alam lainnya yang memiliki keunikan dan kekhasan yang tidak dimiliki oleh negara lain, seperti di kawasan *Taman Nasional (TN); Badak Jawa di TN. Ujung Kulon, Jalak Bali di TN. Bali Barat, Salju Abadi di TN. Lorentz* dan berbagai potensi flora.

Seandainya 39 Taman Nasional dengan luas  $\pm 15$  juta hektar yang tersebar hampir di seluruh pelosok Indonesia tersebut dapat dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan, dengan penambahan penyediaan fasilitas destinasi pariwisata halal, maka akan dapat mendatangkan devisa negara yang tidak sedikit dari sektor pariwisata alam Indonesia ini. Pariwisata alam memiliki 4 (empat) ciri-ciri utama, sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 tentang Pariwisata Yang Sesuai dengan Prinsip Syariah yaitu:

1. Obyek-obyek yang akan dikembangkan adalah obyek-obyek yang ada di alam (hutan, kebun, pantai/laut) yang tidak mengalami perubahan baik bentang alam maupun sumber dayanya.
2. Dalam pemanfaatannya dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan sangat kecil namun sebaliknya dampak positif yang diperoleh dapat menunjang upaya-upaya pelestarian kawasan atau obyeknya itu sendiri, sesuai dengan aspek konservasi.
3. Masyarakat di sekitar kawasan atau obyek dapat memperoleh keuntungan langsung dari kegiatan pariwisata alam tersebut karena mereka ikut terlibat di dalamnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
4. Adanya unsur pendidikan pelatihan dan penyuluhan bagi masyarakat tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sehingga pemahaman dan kesadaran masyarakat semakin meningkat untuk ikut serta melestarikan obyek pariwisata halal.

Memperhatikan hal-hal tersebut, maka pembangunan pariwisata alam harus diarahkan kepada pembangunan pariwisata alam yang berbasiskan kepada masyarakat (community based-tourism), agar masyarakat di sekitar kawasan dapat merasakan manfaat secara langsung dari kawasan tersebut.



## **B. SUMBER DAYA MANUSIA DAN BUDAYA**

Sumber daya manusia (SDM) dan Budaya Indonesia yang beraneka ragam memiliki hubungan yang erat. Posisi SDM yang unggul akan menghasilkan budaya yang baik. Hubungan erat antara SDM dan budaya ini akan sangat menentukan dalam pengembangan pariwisata halal. Oleh karena itu, selain sumber daya alam yang dimiliki kepariwisataan Indonesia, keberadaan sumber daya manusia yang baik akan menciptakan budaya positif bagi pariwisata halal Indonesia. Keduanya adalah faktor yang penting untuk membangun keberlanjutan pariwisata halal Indonesia.

Pengembangan sumber daya manusia pada hakekatnya adalah membangun manusia seutuhnya, yaitu suatu kesatuan membangun manusia sebagai makhluk sosial dan membangun manusia sebagai sumber daya pelaku pembangunan. Pembangunan manusia sebagai makhluk sosial ditekankan pada harkat, martabat, hak dan kewajiban manusia yang tercermin pada nilai rohani, kepribadian dan kejuangan serta aspek lainnya seperti pendidikan dan kesehatan termasuk keadaan gizinya. Adapun pembangunan manusia sebagai sumber daya ditekankan pada etos kerja produktif, keterampilan dan keahlian, kreativitas, disiplin dan profesionalisme. Dengan demikian sumber daya manusia pariwisata yang dibutuhkan adalah seseorang yang mempunyai nilai-nilai rohaniyah yang mempunyai kepedulian sosial yang tinggi bagi masyarakat di sekitarnya dengan bermodalkan pendidikan dan lingkungan yang mendukung, untuk dapat bekerja secara profesional.

Dengan adanya tingkat persaingan yang semakin ketat dari setiap negara untuk mempertahankan eksistensinya di dunia kepariwisataan, maka setiap warga negara berpeluang mempersiapkan dirinya untuk berkompetisi. Berikut adalah profil SDM Indonesia yang dibutuhkan untuk pengembangan pariwisata yang kompetitif:

1. Kemampuan dalam memahami dan menganalisa arus globalisasi. Hal ini ditandai dengan adanya arus informasi dan komunikasi internasional yang sangat cepat antar negara, dan bangsa Indonesia harus memiliki kemampuan untuk menciptakan ahli IT di era sosial media. Adanya undang-undang IT merupakan bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan arus globalisasi yang lebih baik. Keterbukaan, ketergantungan dan saling pengaruh pada berbagai aspek kegiatan ekonomi, politik, budaya dan sebagainya akan mempengaruhi SDM dalam usaha untuk menguasai pemanfaatan teknologi seperti komputer, internet dan sarana penyebar informasi lainnya. Disamping itu, penguasaan bahasa asing sebagai tanda seseorang memiliki wawasan internasional adalah sebuah keniscayaan.
2. SDM Pariwisata halal. Berkembangnya prodi Ekonomi Syariah atau Ekonomi Islam pada perguruan Tinggi dan perkembangan pesantren di Indonesia adalah kunci besar dalam membangun pariwisata halal. SDM yang dimiliki Indonesia dalam pengembangan pariwisata halal bisa disiapkan dengan optimal dan sangat baik. SDM yang tersedia sangat diharapkan memahami dan tanggap



terhadap isu-isu rekreasi dan lingkungan yang sesuai dengan ajaran Islam. Mereka akan mengembangkan dan memajukan pariwisata halal dengan tetap memperhatikan keberlangsungan ekologi dan sekaligus menghijaukan kembali bumi ini.

3. SDM pariwisata “local minded/pemikiran lokal” artinya SDM di Indonesia mempunyai kreativitas tersendiri yang berbeda dengan negara-negara lain untuk menciptakan sebuah diferensiasi produk wisata halal yang melibatkan unsur budaya lokal atau daerah masing-masing yang ada di Indonesia. Kreatifitas local minded ini menjadi keunikan dalam pengembangan pariwisata halal sehingga membuat wisatawan semakin betah dan nyaman di Indonesia. Keberadaan SDM yang mampu menciptakan iklim kreatif yang positif bagi pengembangan pariwisata halal adalah bagaian dari modal dasar dalam menciptakan produk-produk di destinasi pariwisata halal
4. Berbagai kemampuan yang dimiliki manajemen pariwisata halal Indonesia, seperti kemampuan manajerial dalam setiap unit secara mandiri, kemampuan pengelola pariwisata halal dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan penggalan pasar dan potensi masyarakat disekitar obyek pariwisata dan kemampuan kerja sama pengelola pariwisata dengan lembaga-lembaga lain yang terkait. Sehingga dengan kemampuan tersebut mampu menciptakan budaya persaingan yang positif dalam industri pariwisata halal.

5. Profesionalisme dan kode etik. Profesionalisme yang didukung dengan etika yang kuat adalah kunci keberhasilan sebuah manajemen pariwisata halal di Indonesia. Profesionalisme dan etika ini harus dimiliki oleh pengelola pariwisata halal sebagai prasyarat untuk menciptakan budaya yang lebih baik dalam membangun dan mengembangkan pariwisata halal Indonesia. Karena itu, pesantren, sekolah Islam, Perguruan Tinggi Islam berperan penting menyediakan sumberdaya manusia yang benar-benar memahami pariwisata halal, sehingga pariwisata halal di Indonesia bukan saja branding tetapi substansi dalam pengelolaannya pun benar-benar dilaksanakan sesuai dengan syariah.

### C. KEHIDUPAN SOSIAL AGAMA

Masyarakat Indonesia sebagian besar merupakan masyarakat yang beragama Islam. Agama bagi masyarakat Indonesia dijadikan sebagai pedoman hidup manusia dalam menjalani aktivitas sosialnya. Sajak awal perkembangan, agama-agama di Indonesia telah menerima kondisis sosial budaya masyarakat Indonesia. Islam sebagai konsepsi dalam sosial budaya dan Islam sebagai realitas budaya. Islam sebagai konsepsi budaya ini oleh para ahli sering disebut dengan *great tradition* (tradisi besar), sedangkan Islam sebagai realitas budaya disebut dengan *little tradition* (tradisi kecil) atau *local tradition* (tradisi lokal) atau pun Islamicate, bidang-bidang yang “Islamik” yang dipengaruhi Islam. (Bauto, 2014)



Tradisi besar dalam Islam itu sama seperti halnya sebuah syariat dalam Islam, dimana syariat itu adalah sebuah doktrin yang akan melekat pada ajaran dasar pada agama Islam. Sehingga, masyarakat Indonesia pun mempunyai pola pikir dan pola tindakan yang sesuai dengan syariat Islam. Tradisi kecil atau lokal tradisi dalam Islam itu seperti budaya kebersamaan dalam tradisi tasyakuran, tradisi mudik yang didalamnya mengandung makna silaturahmi dan budaya kehidupan sosial masyarakat Indonesia lainnya yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Keberadaan sosial agama masyarakat Indonesia yang melekat dengan budaya-budaya lokal, menjadikan Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia menerima aktivitas sosial masyarakat Indonesia secara umum, termasuk paraktek pariwisata halal di Indonesia dipandang oleh keberagaman masyarakat Indonesia adalah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Keberagaman masyarakat Indonesia yang juga saling menghargai antar pemeluk agama lain adalah nilai positif. Saling menghargai adalah budaya masyarakat Indonesia yang sudah lama ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan saling menghargai kehidupan sosial agama di Indonesia sangatlah aman dan nyaman, walaupun terdapat perbedaan dalam praktek keberagaman di Indonesia, namun sangatlah jarang sekali terjadi konflik, konflik sosial keberagaman di Indonesia sangat mudah diselesaikan persoalannya, karena pada dasarnya, masyarakat Indonesia penuh dengan kebersamaan dan toleran didalam menjalankan

aktivitas sosial di tengah masyarakat. Pola keberagaman Islam yang penuh dengan kebersamaan, toleraan dan saling menghargai ini adalah bentuk Islam wasathiyah yang dimiliki Indonesia.

Modal besar Indonesia dalam rangka mengembangkan wisata halal diatas adalah sangat cocok dengan corak keberagaman masyarakat Islam Indonesia yang *washatiyah*. Islam *washatiyah* dalam pandangan MUI memiliki sepuluh karakteristik. Karakter tersebut adalah mengambil jalan tengah (tawasuth), berkeimbangan (tawazun), lurus dan tegas (I'tidal), toleransi (tasamuh), egaliter non diskriminasi (musawah), musyawarah (syura), memperbaiki/ mendamaikan (Islah), mendahulukan yang prioritas (awlawiyah), dinamis, kreatif dan inovatif (tathawur wa ibtikar) dan berkeadaban (tahadur) (Pedoman Dakwah Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI). Keberagaman masyarakat Islam Indonesia yang penuh dengan keramah-tamahan juga dapat ditelusuri dari Islam *washatiyah* yang hampir ada dalam karakteristik diatas, terutama pada karakter tahadur (keberadaban). Adab atau etika masyarakat Indonesia dalam memperlakukan wisatawan (pendatang/ tamu) adalah memberikan pelayanan dan menerima mereka sebaik mungkin dengan penuh keramah-tamahan. Keramah tamahan ini diambil dari ajaran Islam tentang berkewajiban bagi tuan rumah memperlakukan tamu dengan sebaik mungkin. Dalam konteks pariwisata halal wisatawan adalah tamu yang harus diberikan pelayanan dan memperlakukannya dengan penuh keramah-tamahan.



Karakteristik sosial keberagaman Indonesia yang Islam washatiyyah menjadi peluang besar dalam mengembangkan pariwisata halal dengan kekhasan di masing-masing daerah. Adapun keramah-tamahan yang ada dalam ajaran Islam *wasathiyyah* adalah bagian dari kearifan lokal sosial agama dan bentuk manifestasi beragama yang Wasathiyah. Dengan kearifan sosial agama yang Washatiyah, maka peluang berkembangnya pariwisata halal Indonesia sangat besar dan bahkan ini bisa menjadi modal penting untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat pariwisata halal dunia.

Diantara ciri khas lain dari kehidupan sosial keagamaan Indonesia yang dimiliki Indonesia dan menjadi pembeda dengan negara-negara Timur Tengah atau Negara-negara muslim lainnya adalah keberadaan organisasi masyarakat Islam besar yang bercorak Wasathiyah yaitu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persis, Jamiatul Khoir, al-Irsyad, al-Washliyah, al-Ittihad dll. Organisasi-organisasi masyarakat Islam tersebut kemudian berhimpun dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memperkuat Ukhuwah, menampung aspirasi umat dan secara bersama-sama menjaga bangsa Indonesia. Dengan keberadaan ormas-ormas Islam dan juga MUI ini, maka peluang besar Indonesia dalam membangun pariwisata halal dunia yang ramah dan menarik bagi wisatawan nusantara dan mancanegara sangatlah terbuka. Inilah salah satu kekhasan yang dimiliki bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara-negara muslim lainnya.

Dengan demikian kehidupan sosial keagamaan Indonesia dapat diintegrasikan dengan pariwisata sehingga akan

mendukung dan menguatkan pariwisata halal Indonesia. Integrasi sosial keberagaman dengan pariwisata dapat memperkuat pariwisata halal Indonesia, karena menyatunya prinsip-prinsip keagamaan masyarakat di sekitar pariwisata halal akan selaras dengan aktivitas pariwisata. Hal ini sesuai dengan teori yang menegaskan bahwa masyarakat, sebagai konsep sosial, menggambarkan berkumpulnya manusia atas dasar sukarela, yang memiliki keterikatan dan keterkaitan batiniah satu dengan lainnya (Ginandjar Kartasasmita, 1997:7). Dalam konsep masyarakat yang demikian ini, ada makna kesatuan antara kebinekaan atau keanekaan (diversity) sekaligus kekhasan atau kekhususan (uniqueness). Menurut Ginandjar “apa yang menjadi kesamaan (what is common to all) merupakan pertanyaan mendasar setiap kali terjadi hubungan yang saling bergantung atau kerjasama yang berintikan situasi simbiosis yang mutualistik.”

Situasi simbiosis-mutualistik sudah tercipta di masyarakat Indonesia; elemen-elemen sosial keagamaan dapat disatukan sehingga membentuk suatu kekuatan yang bersifat sinergis, misalnya, dalam wadah MUI. Kekuatan sinergis lahir dari proses interaksi sosial yang berlangsung secara intensif di dalam dan diantara unit-unit sosial yang ada dalam masyarakat, baik itu keluarga, kelompok, asosiasi, golongan masyarakat (etnis dan agama) dan sebagainya. Dalam kaitan itu Ginandjar menekankan pentingnya proses interaksi sosial baik yang vertikal maupun horizontal. Interaksi vertikal dijalin antara pemerintah sebagai otoritas pengelolaan pariwisata halal dengan masyarakat. Hubungan interaksi vertikal ini



lahir dari gagasan-gagasan pemerintah sebagai pengelola pariwisata halal kepada masyarakat setempat dimana pariwisata halal itu berada. Kemudian pada perjalanannya interaksi vertical ini dikembangkan menjadi interaksi dialogis dalam wadah MUI tersebut. MUI hadir bersama pemerintah memberikan edukasi dan arahan tentang konsep pariwisata halal baik dalam tataran aturan maupun dalam tataran praktis. Sedangkan interaksi horizontal, dimana pengelolaan pariwisata halal adalah masyarakat setempat sebagai operatornya maka dibutuhkan saling kerjasama dengan wisatan dalam membangun, menguatkan dan menjalankan pariwisata halal. Eksistensi pariwisata halal menjadi interaksi solidaritas dan kemitraan diantara stakeholder pariwisata halal. Dengan terciptanya interaksi ini maka diharapkan tidak ada sekat antara penduduk asli sebagai tuan rumah dan wisatawan sebagai mitra dalam pariwisata halal.

Gambaran pola kehidupan sosial agama di atas mampu menciptakan peluang untuk pembangunan dan pengembangan pariwisata halal yang lebih baik. Faktor kehidupan sosial agama sangatlah berpengaruh dalam pola pelayanan yang ramah bagi wisatawan. Bahkan kehidupan sosial agama di Indonesia mampu menciptakan keamanan di lingkungan pariwisata halal Indonesia.

## **D. KEBIJAKAN PEMERINTAH**

Laporan Kementrian Pariwisata pada tahun 2018 menyebutkan bahwa daya saing pariwisata Indonesia ini berada di peringkat ke-50 di dunia, dari sebelumnya berada di posisi ke-70. Indonesia terus berusaha menjadi yang terbaik, sehingga pada tahun 2019 Indonesia berada di posisi ke-30. Data statistik wisatawan Mancanegara di Kementerian Pariwisata RI mencatat bahwa kunjungan wisatawan Mancanegara dari sembilan belas pintu masuk utama pada tahun 2015 sebanyak 9,420,240 orang dan periode Januari-Desember 2016 mencapai 10,405,947 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa kunjungan wisatawan mengalami peningkatan sebesar 10,46 % (Millatina dkk, 2019: 96-109)

Pada Rakornas Kepariwisata ke-4 pada 6-7 Desember 2016 di Jakarta dengan tema “Indonesia Incorporated, Meraih Target 15 juta Kunjungan Wisatawan mancanegara dan 265 juta Perjalanan Wisatawan Nusantara Tahun 2017”, yang dihadiri lebih dari 700 orang stakeholder pariwisata Indonesia, Kementerian Pariwisata pertama kali mengumumkan Indeks Pariwisata Indonesia (IPI) yang mengacu pada Travel and Tourism Competitive Indeks (TTCI) World Economic Forum dan United Nations World Organization yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia untuk mengukur kesiapan area tujuan destinasi wisata. Sejumlah indikator lain juga diterapkan, seperti *policy support* (prioritas pariwisata, daya saing harga, keterbukaan regional, environment sustainability), *tourism enabler*



(lingkungan bisnis, keamanan, kebersihan dan kesehatan, Sumber Daya Manusia dan tenaga kerja, kesiapan teknologi informasi), infrastruktur (infrastruktur pelabuhan dan darat, infrastruktur pelayanan pariwisata, infrastruktur bandara,) dan natural dan cultural resources (sumber daya alam dan sumber daya budaya) (<http://lifestyle.liputan6.com>).

Pemerintah adalah leading sector pengembangan dan penguatan industri pariwisata halal Indonesia. Oleh karena itu peran dan keterlibatannya sangatlah besar. Beberapa kebijakan untuk mengembangkan dan memajukan pariwisata halal telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Pariwisata RI dengan membentuk Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal (P3H). Tim ini pada awalnya diketuai oleh Ryanto Sofyan B.S.E.E, MBA, kemudian dilanjutkan oleh Dr. Anang Sutono. Beberapa usaha telah dilakukan untuk mempercepat dan menguatkan pariwisata halal Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional oleh tim ini. Begitupula kerjasama Tim Percepatan pariwisata halal dengan beberapa stakeholder strategis diantaranya DSN-MUI sebagai mitra yang sangat penting dalam pengembangan industri halal agar sesuai dengan aturan agama dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Tim P3H yang berada di bawah Kementerian Pariwisata juga telah rutin melakukan bimbingan teknis (bimtek) serta workshop di 10 destinasi pariwisata halal unggulan. Guna mendorong percepatan pengembangan destinasi pariwisata halal nasional berstandar global, P3H Kemenpar RI menyelenggarakan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI)

pada tahun 2018 dan 2019. Penilaian IMTI dilakukan langsung oleh Crescent Rating-Mastercard yang bekerjasama dengan Indonesia dengan menggunakan empat indikator utama yang telah ditetapkan oleh GMTI yakni: accessibility (aksesibilitas), communication (komunikasi), environment (lingkungan) dan service (layanan). Hasil penilaian dari empat aspek utama tersebut secara otomatis akan menentukan top 5 destinasi wisata halal prioritas Indonesia.

Pariwisata halal sebagai bagian dari industri perdagangan dalam bidang jasa, maka kegiatannya tidak terlepas dari peran serta pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah bertanggung jawab atas empat hal utama yaitu; pembangunan (*development*) fasilitas utama, perencanaan (*planning*) daerah atau area destinasi wisata, dan pendukung pariwisata, pengeluaran kebijakan (*policy*) pariwisata, dan pembuatan dan penegakan peraturan (*regulation*). Berikut ini penjelasan mengenai peran-peran pemerintah dalam bidang pariwisata tersebut di atas: (Subadra, 2006)

### 1. Perencanaan Pariwisata

Pariwisata ialah industri yang memiliki kriteria-kriteria khusus, mengakibatkan dampak positif dan negatif. Untuk memenuhi kriteria khusus tersebut, memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan sehubungan dengan pengembangan pariwisata diperlukan perencanaan pariwisata yang sangat matang. Kesalahan dalam perencanaan akan mengakibatkan munculnya berbagai macam permasalahan dan konflik kepentingan di antara



para stakeholders. Masing-masing daerah tujuan wisata mempunyai permasalahan yang berbeda dan memerlukan jalan keluar yang berbeda pula.

Perencanaan pariwisata bertujuan untuk mencapai cita-cita dan pengembangan pariwisata. Secara garis besar perencanaan pariwisata mencakup beberapa hal penting yaitu:

- a. Perencanaan penggunaan lahan.
- b. Perencanaan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan berbagai jenis industri yang berkaitan dengan pariwisata
- c. Perencanaan infrastruktur yang berhubungan dengan bandar udara, jalan dan keperluan lainnya seperti; air, listrik, pembuangan sampah dan lain-lain:
  - a) Perencanaan pelayanan sosial yang berhubungan dengan penyediaan lapangan pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial, dan
  - b) Perencanaan keamanan yang mencakup keamanan internal untuk daerah tujuan area wisata dan para wisatawan.

## **2. Kerjasama.**

Pemerintah Indonesia juga bersinergi dengan banyak pihak untuk mengembangkan pariwisata halal (halal tourism), misalnya Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Sertifikasi Bisnis (LSU). Bentuk konkret kerja sama adalah dengan mengembangkan pariwisata dan

mempromosikan nilai-nilai budaya dan agama yang emudian akan diuraikan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Jaelani, 2017).

## **3. Pelatihan.**

Pelatihan sumber daya manusia, penjangkauan, dan pengembangan kapasitas juga dilakukan. Pemerintah juga bekerja sama dengan Asosiasi Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk menyediakan penginapan dan tempat makan halal yang dapat menyajikan menu makanan halal, dan bekerja sama dengan Asosiasi Wisata dan Perjalanan Indonesia (ASITA) untuk membuat paket wisata halal ke tempat wisata. keagamaan. Meskipun pariwisata halal tidak hanya terbatas pada wisata religi (Kementerian Pariwisata, 2015).

Kementerian Pariwisata (2015) dalam laporannya mencatat bahwa ada 13 provinsi yang siap menjadi tujuan wisata halal, yaitu Aceh, Banten, Sumatera Barat, Riau, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Bali. Kementerian Pariwisata Indonesia sejauh ini telah mengembangkan dan mempromosikan bisnis jasa di bidang perhotelan, restoran, agen perjalanan, dan spa di 12 tujuan wisata Islam. Pengembangan tersebut dilakukan di sejumlah kota yaitu Aceh, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Semarang, Jawa Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan (Alamsyah, I. E, 2018).



Pasar wisata halal adalah salah satu penyumbang pertumbuhan segmen pariwisata yang paling cepat. Proyeksi pada 2020 kontribusi wisata halal ditargetkan menyumbang 35% atau \$300 juta ke sektor ekonomi global (Direktur Mastercard Indonesia, 2018). Indonesia juga telah meraih penghargaan “World’s Best Halal Travel Destination” versi GMTI 2019. Sedangkan destinasi regional Indonesia yang meraih penghargaan “Best Halal Travel Destination” versi Indonesia Muslim Travel Index 2019 adalah Lombok.

Data pariwisata syariah di Indonesia mulai dari tahun 2013, yaitu terdapat 37 hotel syariah bersertifikasi baru dan sebanyak 150 hotel menuju operasi syariah. Demikian juga dengan restoran, dari 2.916 restoran, hanya 303 yang bersertifikat halal. Sebanyak 1.800 mempersiapkan diri sebagai restoran halal. Sementara tempat relaksasi, SPA kini hanya tiga unit. Sebanyak 29 sedang dalam proses mendapatkan sertifikat (Dini Andriani et al: 2015). Dalam program nasional Kementerian Pariwisata RI juga mencanangkan target 20 juta wisatawan mancanegara dengan 5 juta diantaranya adalah wisatawan Muslim.

Sejalan dengan keseriusan pemerintah dan para pendukung pariwisata terkait, serta potensi berbagai destinasi wisata di setiap wilayah di Indonesia, bukan tidak mungkin Indonesia dapat menjadi tujuan wisata utama dan terdepan di Indonesia.

## **E. PASAR GLOBAL**

Semenjak dulu di masa kolonial, hingga sekarang Indonesia masih dikenal sebagai negara yang subur dan memiliki hasil alam yang melimpah ruah. Potensi hebat yang dimiliki Indonesia dan menjadi aset yang dapat dibanggakan dan menjadi perhatian dunia hendaklah digali kembali karena hal itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada masyarakat Indonesia. Terlebih dimulai pada penghujung tahun 2015 hingga sekarang ini 2020 keterbukaan pasar ekonomi Asean memberikan kesempatan sebesar-besarnya dalam persaingan antar negara-negara Asean. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara di kawasan Asean dan juga di tingkat global. Salah satu aset penting yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) sebagaimana telah diurai di atas.

Pada tahun 2018 lalu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan Crescentrating-Mastercard GMTI meluncurkan program Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona Jakarta, kantor Kemenpar RI. Ide ini diusung mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbesar di dunia dan memiliki keindahan alam yang luar biasa. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pew Research Center, yaitu lembaga riset yang berkedudukan Washington



DC, Amerika Serikat, yang bergerak pada penelitian demografi, analisis isi media, dan penelitian ilmu sosial. Pada tahun 2012, Pew Research Center mempublikasikan risetnya yang berjudul "The Global Religious Landscape" mengenai penyebaran agama di seluruh dunia dengan cakupan lebih dari 230 negara. Riset tersebut memaparkan total jumlah penduduk Muslim yang tersebar di berbagai negara yang berjumlah 1,6 miliar atau sekitar 23,2% dari total jumlah penduduk dunia. Indonesia dinobatkan sebagai peringkat pertama penganut agama Islam terbesar dengan total 209.120.000 jiwa (87,2%) dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 237.641.326 jiwa. Data tersebut juga diperkuat oleh data sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010.

Indonesia tidak saja sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, namun juga diakui dunia karena mampu menjalankan demokrasi dan dialog antarumat beragama dengan baik. Menteri Luar Negeri RI, Retno Lestari Marsudi, pada pembukaan "Confrence on Indonesia Foreign Policy 2015" yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, (13/06/2015) mengungkapkan, "Indonesia is a country where Islam and democracy can go hand in hand, at the same time interfaith dialogues are enabled." Artinya dengan potensi yang dimiliki, Indonesia bisa menjadi negara yang sukses dalam mengembangkan halal tourism. Indonesia memiliki reputasi yang positif sebagai negara demokrasi dan negara yang toleran dalam beragama karena corak Wasatiyatul Islamnya. Konsep mengenai halal tourism di

Indonesia masih terus berkompetisi dengan negara-negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. Indonesia memiliki potensi wisata yang sudah diakui dunia. Berbagai ulasan di internet bahkan menyebutkan Indonesia sebagai salah satu negara yang wajib dikunjungi. Kecantikan, keelokkan, dan keunikan Indonesia memang tidak usah diragukan lagi.

Permintaan produk halal, baik itu makanan, minuman, maupun wisata halal semakin meningkat. Thomson Reuters memperkirakan, pada tahun 2019 pasar makanan halal bernilai US\$ 2,537 miliar (21% dari pengeluaran global), pasar kosmetik halal menjadi US\$ 73 miliar (6,78 % dari pengeluaran global), dan kebutuhan personal halal menjadi US\$ 103 miliar (6,6 % dari pengeluaran global). "Untuk pasar terbesar makanan halal, yaitu Indonesia sebesar US\$ 190 miliar, Turki US\$ 168 miliar, dan Pakistan menempati urutan ketiga sebesar US\$ 108 miliar. Lalu, Indonesia juga berada di urutan ketiga untuk pasar farmasi terbesar, yaitu dengan angka US\$ 4,9 miliar. Sementara, Indonesia tidak menjadi pasar terbesar untuk kosmetik halal," ujar Marco Tieman, CEO LBB International. (Marketeers edisi April 2015, hal 60).

Untuk sektor wisata, Sapta Nirwandar sebagai Perwakilan Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah 2014 - 2017, dalam Marketeers edisi April 2015, hal 61 mengatakan potensi pariwisata halal begitu besar. Berdasarkan data dari UNWTO Tourism Highlights tahun 2014, terdapat sekitar 1 miliar wisatawan dunia dan diperkirakan akan naik menjadi 1,8 miliar pada tahun 2030 mendatang. Sebagai negara yang



mayoritas penduduknya Muslim, Indonesia masih terus memaksimalkan potensi itu. Oleh karena itu, Indonesia sudah mulai mempromosikan diri sebagai negara tujuan pariwisata yang muslim-friendly.

Indonesia sedang memperluas berbagai segmentasi pasar untuk industri pariwisata, khususnya pasar untuk Muslim travelers. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, tentu masih tetap terdapat kendala bagi Indonesia untuk mengembangkan konsep halal tourism, walaupun selama ini bisa diatasi permasalahannya. Para operator di industri pariwisata tetap meyakini pada potensi pasar wisata halal. Menanggapi hal tersebut, Mantan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sapta Nirwandar, menilai bahwa dengan menonjolkan suku, agama, ras, dan golongan tertentu bukanlah hal yang populer maka harus ada alternatif lain yang mampu dikenal secara luas. Ia berpendapat bahwa untuk meraih tujuan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan bersama, pelabelan yang identik dengan agama atau suku, misalnya, itu boleh-boleh saja seperti halnya memberikan label wisata halal yang tujuannya mengembangkan kepariwisataan tanah air. (Marketeers edisi Juni 2015, hal 149).

## Bab V

# PENGEMBANGAN WISATA HALAL

**B**ab ini akan menjelaskan pengembangan pariwisata halal di Indonesia dari berbagai pihak yang terlibat. Pengembangan dilakukan karena pariwisata halal belum familier dan belum menjangkau masyarakat Indonesia pada umumnya, maka penting sekali untuk menggandeng dan mendiskusikannya dengan pihak-pihak terkait. Pengembangan pariwisata halal Indonesia tentu memiliki banyak nilai positif. Selain nilai positif ekonomi yang dihasilkan dari pengembangan pariwisata tersebut tentu terdapat nilai-nilai kearifan lokal Indonesia yang akan diperkenalkan lebih luas di tingkat nasional dan internasional. Memperkenalkan kearifan



lokal Islam Indonesia kepada dunia adalah suatu modal utama juga bagi pariwisata halal Indonesia. Kebergamaan Islam Indonesia yang Wasahatiyah, sebagaimana yang telah diurai di atas, adalah komponen utama dalam membangun perdamaian dunia. Oleh karena itu wisata halal yang dibangun dari budaya Wasatiyah Islam dan keindahan alam serta keanekaragaman budaya Indonesia adalah modal utama yang akan dikembangkan dan ditawarkan kepada turis Mancanegara. Harapannya, Indonesia sebagai negara besar dan negara mayoritas Muslim dunia mampu diandalkan bagi siapapun yang datang ke Indonesia. Keberadaan pariwisata halal Indonesia dengan mengedepankan kearifan lokal tersebut adalah bukti bahwa Islam di Indonesia benar-benar rahmat bagi seluruh alam. Islam Indonesia sebagai pelopor pariwisata halal akan membuat aman dan nyaman siapapun yang datang ke Indonesia.

Untuk mendukung pariwisata halal Indonesia kelas dunia yang diharapkan tercapainya tujuan pariwisata halal tersebut, maka perlu juga pengembangan pariwisata halal dari sisi lain, beberapa pengembangan pariwisata halal harus didukung diantaranya adalah:

### **A. PENGUATAN PEMIHAKAN PEMERINTAH**

Pelaksanaan kepariwisataan di Indonesia tercantum dan diatur dalam UU. No. 10 Tahun 2009. Pemerintah dalam hal ini, baik pusat (Presiden), daerah (gubernur, Bupati/Walikota) maupun kementerian yang terkait yaitu Kementerian

Pariwisata RI adalah pihak-pihak yang diamanatkan oleh UU tersebut sebagai penanggung jawab dan pelaksana utama dalam membangun dan mengembangkan pariwisata halal. Sejak pariwisata halal menjadi isu nasional sekitar tahun 2010, dengan nama sebelumnya adalah wisata Islam, wisata syariah atau yang lainnya berbagai usaha dan upaya dilakukan oleh pemerintah. Puncaknya pada tahun 2015, Indonesia menjadi negara yang patut dipertimbangkan. Di tahun tersebut, usaha yang dilakukan oleh pemerintah baik daerah (dalam hal ini Nusa Tenggara Barat) maupun pusat yang dipelopori oleh Kemenpar RI berhasil mendapatkan hasil yang menggembirakan melalui penghargaan pada tahun 2015 dan 2016 World Halal Travel Awards (WHTA) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Kemudian disusul oleh penilaian Global Halal Travel Index (GMTI) dari tahun 2017, 2018 dan 2019 destinasi pariwisata halal Indonesia berada di posisi puncak mengalahkan beberapa negara Timur Tengah dan mampu bersaing dengan Malaysia di posisi pertama.

Keberadaan pariwisata halal Indonesia sebagai negara yang mampu bersaing dengan Malaysia, Turki dan negara-negara lain adalah anugerah yang luar biasa. Ini memang merupakan tantangan bagi masyarakat Indonesia untuk memertahankan agar Indonesia tetap menjadi yang terbaik dalam pariwisata halal dunia. Maka dalam hal ini bagaimana Indonesia harus tetap menjadi negara yang menempati puncak teratas dalam persaingan pariwisata halal global. Bukan sesuatu yang mudah dalam hal ini untuk tetap bertahan di posisi puncak. Indonesia terus berbenah dan mengoperatori



dengan sebaik mungkin, maka bukanlah suatu mustahil Indonesia menjadi pusat pariwisata halal dunia. Oleh sebab itu perlu kiranya melakukan langkah-langkah sebagai berikut dalam memperkuat peran pemerintah baik pusat maupun daerah.

### **1. Peraturan Menteri Pariwisata tentang pariwisata halal yang lebih spesifik.**

Selama ini aturan yang secara tegas memperkuat peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata halal secara khusus belum terealisasi. Namun beberapa aturan seperti Permen No. 1 Tahun 2016 tentang *Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata*, yang di dalamnya memuat sertifikasi usaha pariwisata halal, dan Peraturan Menteri Perindustrian RI Tahun 2020 tentang *Tatacara Memperoleh Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal* adalah bentuk penguatan pemerintah dalam mendukung pembangunan pariwisata halal. Keberadaan beberapa aturan di atas, tentu memiliki nilai positif dalam penguatan pengembangan pariwisata halal yang lebih memberikan kepastian tentang aturan main dan panduan pariwisata halal yang sesuai dengan ajaran Islam dan juga tetap bisa bersaing dengan negara-negara lain dalam mengenalkan pariwisata halal dunia.

### **2. Efektivitas Layanan Sertifikasi Halal**

Undang-undang no. 33 tahun 2014 tentang *Jaminan Produk Halal*, yang sifatnya sudah mandatori (wajib) pada tahun akhir

tahun 2019 yang lalu, menegaskan bahwa layanan sertifikasi halal bukan lagi menjadi ranah LPPOM MUI; sertifikasi kini ditangani oleh *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal* (BPJPH) sebagai amanat UU JPH. Namun LPPOM MUI tetap ikut berperan yaitu sebagai *Lembaga Pemeriksa Halal* (LPH). Pasca munculnya BPJPH, proses sertifikasi kehalalan masih di MUI. Proses pendaftaran sertifikasi halal masuk ke pemerintah. Pengeluaran sertifikat halal dilakukan pemerintah. Namun proses Fatwanya masih sama menjadi ranahnya Majelis Ulama Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan daya saing produk halal UMKM, termasuk UMKM yang akan tersebar di industri pariwisata halal, pemerintah menekankan pentingnya sertifikasi halal dan izin edar. Hal ini, sejalan dengan semangat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang *Jaminan Produk Halal* (JPH). Penyelenggaraan JPH adalah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Misalnya masyarakat yang sedang melakukan perjalanan pariwisata halal, maka dari mulai perjalanan melalui travel sampai di destinasi wisata halal harus tersedia banyak UMKM yang mempunyai sertifikasi halal. Hal itu juga dapat meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Berdasarkan kondisi yang demikian, Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan telah berkomitmen agar sertifikasi halal bagi UMK dengan omzet di bawah 1 miliar



rupiah dibebaskan dari biaya sertifikasi halal. Kementerian Agama juga menyatakan bahwa pemerintah tengah berupaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan sertifikasi halal sehingga JPH berimplikasi mendukung percepatan ekonomi termasuk sektor UMKM. Kepala *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal* (BPJPH) Kemenag Sukoso mengatakan untuk memudahkan sertifikasi halal bagi produk UMKM yang jumlahnya begitu besar dan tersebar di tanah air, pihaknya telah membentuk satuan tugas layanan sertifikasi halal di 34 provinsi. (<https://kabar24.bisnis.com/read/20200709/15/1263518/bpjph-berupaya-tingkatkan-efektivitas-layanan-sertifikasi-halal>)

Dengan semakin dipermudahnya proses sertifikasi halal, khususnya bagi UMKM maka aktivitas dalam pelayanan pariwisata halal lebih optimal dan lebih memihak kepada UMKM-UMKM di sekeliling pariwisata halal. Keterlibatan banyak UMKM tentu juga memberikan angin segar bagi pengembangan dan kemajuan pariwisata halal di Indonesia.

## **B. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR**

Menjadikan pariwisata halal Indonesia yang unggul dengan kearifan lokal yang dimiliki Indonesia tentu adalah tujuan utama. Untuk menjadi pariwisata halal yang unggul selain SDA dan SDM yang dimiliki tentu juga sektor pariwisata membutuhkan infrastruktur. Keberadaan infrastruktur pariwisata yang memadai menjadi syarat peningkatan laju pertumbuhan sektor pariwisata halal yang semakin

berkembang. Pengembangan infrastruktur pada pariwisata halal tidaklah berbeda dengan pariwisata pada umumnya meliputi sarana transportasi, informasi, penginapan dan pusat oleh-oleh yang sangat dibutuhkan dalam menarik minat wisatawan. Legalisasi halal adalah menjadi pembeda pada tempat-tempat penginapan wisatawan di destinasi pariwisata halal.

Penting melakukan upaya pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata halal bertaraf internasional. Dukungan infrastruktur standar internasional sangat penting dalam menunjang destinasi dengan membangun sarana transportasi (moda transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut dan kereta api), prasarana transportasi (pelabuhan laut, bandara, stasiun) dan sistem transportasi (informasi rute dan jadwal, ICT, kemudahan reservasi modal).

Pemerintah telah berusaha membangun prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas kawasan pariwisata halal walaupun masih perlu peningkatan kembali dalam pembangunannya ini. Kebutuhan sarana penunjang sangat penting agar menimbulkan kenyamanan selama berada di lokasi. Sarana tersebut meliputi prasarana umum dan prasarana khusus. Kategori prasarana umum meliputi keamanan, keuangan perbankan, bisnis, kesehatan, sanitasi, kebersihan, listrik, air, telekomunikasi, pengelolaan limbah dan keimigrasian.

Sedangkan prasarana khusus meliputi tempat ibadah, akomodasi, rumah makan/restoran, informasi dan pelayan



pariwisata, e-tourism kios, polisi pariwisata /satuan tugas wisata, toko cinderamata dan penunjuk arah-papan informasi wisata. pada prasarana khusus harus disediakan bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia.

Kondisi infrastruktur yang sekarang ini sudah memadai. misalnya di Lombok Nusa Tenggara Barat, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengungkapkan komitmennya untuk terus mengembangkan wisata halal di NTB. Apalagi NTB memiliki eksotisme dan aura yang berbeda dibanding daerah lain di Indonesia, bahkan dunia. Banyak wisatawan yang berada di Lombok NTB dari Australia, Eropa dan Korea ketika datang ke Lombok. Mereka merasakan aura yang berbeda. Banyak hal yang lebih indah; lebih utama, eksotisme Lombok memang luar biasa. Zulkieflimansyah juga mengungkapkan bahwa seluruh perangkat infrastruktur dikembangkan terus untuk memajukan wisata halal di NTB ini. Salah satunya adalah Bank NTB Syari'ah. (<https://www.gatra.com/detail/news/450453/ekonomi/pariwisata-halal-dunia-kunjungan-wisatawan-di-ntb-meningkat>).

Di kawasan pariwisata halal di Sumatera Barat, pemerintah juga terus mempercepat pembangunan infrastruktur jalan tol. Misalnya, Jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.818 km di Indonesia yang direncanakan menghubungkan kota-kota di Pulau Sumatra, dari Lampung hingga Aceh, yang sudah dibangun beberapa tahun yang lalu. Sedangkan (JTTS) ruas yang sudah diresmikan di akhir tahun 2019 adalah ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung Lampung. Hal ini tentu akan mendongkrak berbagai

perekonomian Indonesia terutama di Sumatera dan tentu juga berimbas sangat baik juga bagi pariwisata halal di daerah tersebut dengan wisata kuliner halalnya. di Medan terdapat destinasi pariwisata halal yang potensial dengan dukungan infrastruktur yang tidak kalah baik dibandingkan dengan wisata-wisata lainnya, seperti wisata Mesjid Raya Azizi Tanjung Pura, Salju Panas Tinggi Raja, air Terjun Sipisipiso, Taman Nasional Gunung Leuser, Rahmat International Wildlife Museum and Gallery dan lain-lain.

Sarana pendukung pengembangan wisata halal di kawasan Medan seperti jumlah hotel, resto/kuliner, jasa akomodasi terus bertambah seiring banyaknya jumlah wisatawan yang datang ke kota itu. Hingga akhir tahun 2015, di Kota Medan tercatat 1663 usaha akomodasi yang terdiri dari 47 hotel bintang, 653 salon kecantikan, 211 rumah makan. Wilayah tersebut sudah menerapkan prinsip sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya, jika ada dua orang wisatawan dengan jenis kelamin berbeda akan diminta surat/buku nikah bila akan menginap, tersedia petunjuk arah kiblat di setiap kamar, sajadah, dan lain-lain.

Aksesibilitas di Kota Medan untuk penerbangan tersedia direct flight penerbangan internasional dari dan ke Kota Medan. Dari Malaysia sendiri ( Kuala Lumpur dan juga Penang) tersedia Air Asia 5 kali dalam sehari, dan Firefly 2 kali dalam sehari, dan maskapai Malaysia Airlines terbang dari Medan ke Kuala Lumpur 3 kali dalam sehari. Demikian juga dari Singapura dengan maskapai Air Asia. Maskapai Indonesia yang melayani rute Malaysia antara lain Batik



Air 2 kali dalam sehari, Kondisi ketersediaan infrastruktur dan jalan juga sudah cukup baik. Kendala aksesibilitas masih ditemui di daya tarik wisata alam seperti ke Pantai Barat Sumatera Utara yang memiliki daya tarik yang cukup diminati oleh wisatawan.

### C. CAPACITY BUILDING

Capacity Building adalah upaya untuk mengembangkan suatu ragam strategi meningkatkan efisiensi, efektivitas dan responsivitas kinerja pemerintah. efisiensi, dalam hal waktu (time) dan sumber daya (resources) yang dibutuhkan guna mencapai suatu outcomes; efektivitas berupa kepastian usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan; dan responsivitas merujuk kepada bagaimana mensikronkan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut. Dalam pengembangan capacity building bagi pariwisata halal di Indonesia, semetara ini Indonesia terus berjalan. Pengembangan pariwisata halal melalui capacity building tersebut tidaklah dilakukan dengan spontan, akan tetapi membutuhkan waktu yang matang dan tepat. Akan tetapi, untuk sementara yang dilakukan adalah:

1. Strategi memperluas pasar, bekerjasama mengembangkan paket wisata dan pengembangan Sumber Daya Manusia. Strategi memperluas pasar dan bekerjasama mengembangkan paket wisata akan dilakukan Indonesia. Langkah tersebut dilakukan karena Indonesia tengah menuju destinasi wisata halal nomor satu di

dunia. Strategi yang pertama adalah to increase the size. Bagaimana tren pariwisata halal menjadi lebih besar lagi. Menurut mantan ketua *Percepatan Pariwisata Halal Indonesia* Riyanto, saat ini wisata halal adalah pariwisata beretika atau bertanggung jawab. Tren bergerak ke arah yang organik, sehat, hidup bersama keluarga, dan hal-hal itu adalah pasar wisata halal. Ia mencontohkan di Turki terdapat pantai yang dipisahkan laki-laki dan perempuan, turis Mancanegara juga tetap datang karena mereka merasa aman membawa anak-anak. Tidak ada orang mabuk di sana. Ini tentu berbeda kalau berada di tempat pariwisata umum. Tren wisata halal bukan hanya dinikmati wisatawan Muslim melainkan juga oleh wisatawan Mancanegara non-Muslim. Dengan adanya pasar wisata halal yang berkembang, wisatawan tersebut bisa datang dan merasa aman di destinasi wisata halal. Sajiannya inklusif untuk wisatawan non-Muslim. Turis non-Muslim, misalnya, mereka tinggal di Antalya, Turki karena mereka merasa aman. Model dan pola-pola seperti di Turkey tersebut pada dasarnya sangat memungkinkan sekali diterapkan di Indonesia. Inilah seterategi pertama dalam pembangunan capacity building pariwisata halal Indonesia.

2. Strategi kedua yang akan dilakukan adalah membuat kerjasama pariwisata dikalangan negara-negara yang tergabung dalam Organization of Islamic Cooperation (OIC/OKI) untuk promosi wisata bersama. Masing-masing negara mempunyai kelebihan tetapi yang paling penting adalah



bagaimana meningkatkan industri pariwisata bersama. Kerja sama paket-paket wisata tersebut telah dibicarakan pada pertemuan yang membahas wisata halal di Padang tanggal 29 September 2016. Dalam pertemuan tersebut, Riyanto akan membahas langkah-langkah kerja sama seperti paket wisata Halal Travel Series dengan kerja sama promosi dan penjualan bersama. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata menetapkan target kunjungan wisatawan Muslim Mancanegara sebanyak 5 juta di tahun 2019. Target tersebut naik sebanyak 3 juta kunjungan dibandingkan dengan tahun 2014. “Caranya (untuk promosi) dengan mengikuti award-award seperti World Halal Travel Award dan tetap kita imbangi dengan selling, familiarization trip, dan sales mission. Sesuai dengan pasarnya.”

3. Strategi ketiga adalah membangun SDM melalui sosialisasi masyarakat. Sosialisasi ini dibangun baik di tingkat masyarakat lokal, nasional maupun internasional. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat umum mengenai pariwisata halal yang ada di Indonesia. Membangun SDM melalui pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat lokal yang masih rendah menjadi tantangan bagi Pemerintah daerah untuk mengembangkan pariwisata halal.

Pembukaan prodi pariwisata halal di perguruan tinggi adalah salah satu langkah penting untuk mempercepat perkembangan pariwisata halal. Selama ini prodi pariwisata yang umum sudah ada di beberapa sekolah

- pemerintah seperti Politeknik pariwisata Bandung, Jakarta, Bali, Sumatra Barat, Nusa Tenggara Barat dan di wilayah lainnya. Sekolah tersebut juga bisa membuka prodi pariwisata halal di dalamnya, atau penambahan kurikulum sub-sub yang ada di pariwisata halal, seperti, makanan halal yang sehat dan higienis dan lainnya. Bisa juga di kampus-kampus Islam Negeri seperti UIN/IAIN/STAIN, demi untuk pengembangan pariwisata halal yang lebih cepat dan familier, membuka prodi pariwisata halal. Di kampus-kampus Islam ini, basis-basis keagamaannya disediakan. Yang perlu dilakukan ialah mensinkronkan atau mengintegrasikan dengan industri pariwisata halal.
4. Strategi keempat adalah strategi penguatan organisasi. Strategi ini dilakukan oleh Pemerintah setempat dalam tiga pokok program untuk meningkatkan kualitas kinerja operator pariwisata halal. Perbaikan struktur dan tugas operator pariwisata halal, yang merupakan strategi untuk meningkatkan kualitas kinerja dengan melakukan penyegaran struktur dan tugas pegawai di wilayah setempat dimana pariwisata halal ditukembangkan. Perbaikan beberapa posisi ini disesuaikan dan dipertimbangkan dengan keahlian dari pegawai.

#### **D. PARTISIPASI MASYARAKAT**

Salah satu pengembangan pariwisata halal selain memperkuat peran pemerintah di atas ialah mengupayakan keterlibatan peran masyarakat terutama masyarakat lokal yang berada di



sekitar obyek pariwisata halal. Keterlibatan masyarakat untuk membentuk *community-based tourism* (CBT), *community-based ecotourism* (CBET), *Agrotourism*, *Eco and Adventure Tourism and homestay* sangat penting. Ketika menggambarkan pariwisata halal dengan melibatkan masyarakat, maka perlu diketahui kelangsungan budaya, sosial, dan lingkungan di sekitar pariwisata. Bentuk pariwisata ini sebagian besar akan dikelola dan dimiliki oleh masyarakat untuk masyarakat pula guna membantu para wisatawan untuk meningkatkan kesadaran mereka dan belajar tentang masyarakat dan tata cara hidup masyarakat lokal (Local Way Of Life). Dengan demikian, pariwisata dengan melibatkan masyarakat ini berbeda dengan pariwisata massa yang dampak negatifnya banyak. Keterlibatan masyarakat ini dimaksudkan untuk memaksimalkan implementasi dan menjaga nilai-nilai positif masyarakat dan daya lingkungan yang tersedia.

Secara konseptual prinsip dasar keterlibatan masyarakat terhadap kepariwisataan adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan, sehingga kemanfaatan dan nilai-nilai agamis penerapan halal dapat dirasakan dan dipahami oleh mereka. Hal ini penting, tidak saja kesejahteraan masyarakat yang didapatkan, akan tetapi pendidikan tentang halal bisa dikembangkan dan ditularkan kepada para wisatawan yang datang mengunjungi. Di sinilah terdapat interaksi positif, sehingga pariwisata halal Indonesia dapat tersebar dengan jangkauan yang luas, dapat dinikmati sebagai pengalaman yang unik bagi wisatawan Muslim

maupun non-Muslim atau bagai wisatawan domestik ataupun mancanegara. Keterlibatan masyarakat, atau membangun *community based-tourism* (CBT), sangat diperlukan untuk mengembangkan pariwisata. Menurut COMCEC dalam Dzikri Abadi, 2017: 41 terdapat beberapa elemen penting dalam mengembangkan CBT antara lain yaitu:

1. Pemerintah yang berfungsi sebagai pemimpin yang visioner, pembuat kebijakan, regulator, koordinator, fasilitator, pemandu dan pengontrol. Pemerintah juga menyediakan pengetahuan dan pengalaman. Bahkan pemerintah juga menyiapkan cara untuk mendidik, melatih dan memberdayakan penduduk setempat untuk mencapai kesetaraan dalam partisipasi, kepemilikan, keputusan, distribusi biaya.
2. Organisasi pendonor dan LSM yang berperan sebagai pendukung dan fasilitator, pemandu, pelatih yang menyediakan sumber daya keuangan, pengetahuan, pengalaman, dan mengetahui bagaimana mendidik dan melatih penduduk setempat untuk keadilan.
3. Sektor swasta yang berfungsi sebagai pendukung, mitra, pengembang, investor, fasilitator, pemandu, penerima, dan penyedia dana, pengetahuan pengalaman dan mengetahui bagaimana mendidik, melatih dan mempekerjakan penduduk setempat.

Dari komponen-komponen di atas perlu kiranya sinergi antar pihak-pihak yang terkait. Pariwisata halal akan berkembang tidak saja dilakukan oleh pemerintah akan



tetapi keterlibatan semua komponen yang berperan dalam pengembangan pariwisata halal juga harus disertakan. Dengan demikian jika terpenuhi komponen-komponen di atas, maka akan terjadi sinergi antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam meningkatkan industri pariwisata halal yang akan berdampak terhadap semakin besarnya peluang kerja bagi masyarakat sekitar daerah wisata.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan di lingkungan sekitar pariwisata halal juga harus melibatkan individu, keluarga, masyarakat sekitar, regulator, operator (pengelola), media, peneliti, tenaga, pendidik, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat. Semuanya diharapkan bisa berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan pariwisata halal. Hal ini juga pernah disampaikan oleh Ketua Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI) Riyanto Sofyan. Ia meminta masyarakat dan pemerintah agar terus memperkuat literasi serta edukasi kepada turis yang datang berkunjung tentang penerapan wisata halal. Ia juga mengingatkan kepada para pelaku usaha di daerah wisata halal agar secara terus menerus melakukan pengembangan pemasaran. Kemudian, untuk memajukan wisata maka langkah yang paling penting dilakukan adalah menjalankan standarnya (<https://lampung.antaranews.com/berita/373039>).

Wakil Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DKI Jakarta Safri Haliding dalam berita dengan tema “Membangun Konsep Wisata Halal Berbasis Komunitas” berpandangan bahwa kewirausahaan (entrepreneurship) merupakan salah satu faktor produksi yang memegang

peranan penting di dalam pembangunan termasuk dalam sektor pariwisata yang memiliki potensi yang besar. Ia mengatakan, semangat entrepreneur perlu diperkuat dan dikembangkan di kalangan masyarakat sekitar kawasan wisata dengan menerapkan prinsip dasar pariwisata halal berbasis masyarakat (community-based tourism/CBT). Dengan demikian, maka industri ini bisa memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat di sekitar kawasan wisata halal. Setiap kawasan wisata halal memiliki keunggulan dan keunikan masing-masing. Masyarakat di sekitar obyek wisata halal dapat berperan untuk mendukung aktivitas wisata halal sehingga menjadi unik. Melibatkan masyarakat setempat dalam hal ini sejalan dengan program melahirkan dan mengembangkan wirausaha di bidang pariwisata dari Kementerian Pariwisata (<https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/VNx791yK-membangun-konsep-wisata-halal-berbasis-komunitas>).

Dengan lahirnya entrepreneur berbasis pariwisata halal maka ada target dalam jangka pendek yaitu meningkatkan jumlah pemain di industri pariwisata. Sementara dalam jangka panjang, dapat mengembangkan ekosistem industri pariwisata halal Indonesia. Secara kongkrit ini bisa dilakukan dengan membentuk dan mendirikan pendampingan kepada masyarakat setempat. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat memasukkan usaha dan bisnis yang selaras dengan kawasan pariwisata halal dan sesuai dengan konsep pariwisata halal seperti konsep “Satu Kawasan Wisata Satu Pusat Wirausaha Halal”.



Pengembangan dan percepatan halal tourism akan lebih aksekeratif dan optimal jika semua lapisan masyarakat, terutama pemerintah sebagai regulator dan stakeholder di lingkungan pariwisata halal, dapat bekerjasama dan berpartisipasi secara pro-aktif. Hal ini penting dilakukan agar kebijakan yang dijalankan dari pusat hingga daerah dan diimplementasikan di lokasi pariwisata halal termanaje dengan rapi.

Partisipasi masyarakat dalam bidang pariwisata halal adalah seperti apa yang sudah pernah dilakukan oleh masyarakat Aceh dan Nusa Tenggara Barat yang diwujudkan melalui kerja sama pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengisi kehadiran Ramadhan melalui kegiatan Festival Ramadhan (Aceh) dan Pesona Khazanah Ramadhan (NTB). *Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA)* Aceh, misalnya, menyebutkan bahwa industri pariwisata halal telah berjalan lama di provinsi syariat Islam sebelum istilah itu diperkenalkan dalam “World Halal Tourism Summit” di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab tahun 2015. Festival Ramadhan yang dilaksanakan di Aceh mengangkat tema “*Wonderful Ramadan in Aceh*” di mana kegiatan wisata religi “Festival Ramadhan 2019” menyuguhkan beragam kegiatan Islami dan menarik. Festival ini berlangsung selama dua minggu yang diadakan setiap hari pada pukul 16.30-20.00 WIB kemudian dilanjutkan lagi pada pukul 21.30 WIB hingga selesai. Adapun kegiatan yang dilaksanakan ialah opening ceremony, bazar dan kuliner, jajanan berbuka puasa, pentas dan lomba seni budaya Islami, pameran budaya Islami, pemutaran film

Islami, berbuka puasa, tausiyah dan kegiatan pendukung menarik lainnya, seperti lomba seni Islami, azan, mewarnai, nasyid, dalail, dan lainnya yang disajikan di tiga panggung di area Taman Budaya (Acara Festival Ramadhan di Aceh, [www.acehtrend.com/2019/04/28](http://www.acehtrend.com/2019/04/28)).

Festival Ramadhan 2019, tidak hanya untuk memperkenalkan Aceh sebagai destinasi wisata halal dengan sebutan Serambi Mekkah yang sarat dengan budayanya yang Islami sehingga wisatawan dapat menikmati pesona dan keunikan wisata Ramadhan di Aceh dan memperkuat



Gambar 19. Wonderful Ramadan in Aceh  
Sumber: [rencongpost.com](http://rencongpost.com)





Gambar 20. Pesona Khazanah Ramadhan 2019  
Sumber: kataknews.com

positioning Aceh sebagai Destinasi Wisata Halal unggulan nasional dan internasional. Kegiatan ini juga mengajak wisatawan muslim Nusantara dan Mancanegara untuk melaksanakan ibadah puasa di Aceh dengan penuh khidmat dan berkah sebagai sebuah sensasi dan pengalaman baru.

Kegiatan pariwisata halal di NTB mengambil tema utama adalah “Pesona Khazanah Ramadhan 2019” Pada acara ini kegiatan yang dilakukan adalah mengundang imam shalat Fardhu dan shalat Tarawih dari berbagai negara di Timur Tengah, dan mendatangkan para penceramah terkenal. Dengan demikian, kegiatan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi warga lokal, tapi juga sangat cocok untuk para turis, khususnya dari kawasan Asia Tenggara, seperti Malaysia, Singapura, Brunai dan Thailand.

Kegiatan yang berlangsung sebulan penuh itu diisi dengan berbagai ragam acara menarik bersifat Islami, seperti Opening Ceremony, Bazar dan Kuliner, Jajanan Berbuka Puasa, Pentas dan Lomba Seni Budaya Islami, Pameran Budaya Islami, Pameran Buku, Pemutaran Film Islami, Buka Puasa, Tausyiah dan kegiatan pendukung menarik lainnya, seperti lomba seni Islami, adzan, mewarnai, Nasyid, Dalail, dan lain-lain yang disajikan di tiga panggung di area Taman Budaya. (Sumber: Disbudpar Prov NTB).

Partisipasi masyarakat, di Nusa Tenggara Barat (NTB), memnerikan dukungan terhadap wisata halal ini. Di Hotel Senggigi menyuguhkan kopi daripada minuman beralkohol. Hotel Svarga di kawasan Pantai Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), juga berkomitmen mendukung



pengembangan wisata halal di Pulau Seribu Masjid tersebut. Manajer Operasional Hotel Svarga, Zulfandi, mengatakan Hotel Svarga yang mengusung konsep “Moslem friendly” juga dengan menyajikan hidangan aneka kopi ketimbang minuman beralkohol kepada tamu yang datang menginap. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat itu menjelaskan bahwa di acara ini tidak adanya penjualan minuman yang beralkohol demi untuk mewujudkan konsep wisata halal yang sudah menjadi trademark pariwisata di NTB. Ia juga menyampaikan bahwa dalam rangka wisata halal ini di hotel berbintang empat diadakan kompetisi, penyediaan minuman kopi dan berbagai atraksi dalam bentuk kompetisi roasting (republika.co.id, dukungan wisata halal hotel disengigi).

## **E. LITERASI WISATA HALAL**

Literasi adalah sebuah peristiwa sosial yang melibatkan keterampilan tertentu guna menyampaikan suatu informasi maupun untuk mendapatkan suatu informasi dalam bentuk tulisan. Hakikat literasi bukan saja mengenai kemampuan membaca dan menulis namun kemampuan berpikir kritis dalam memahami berbagai bidang (Damayantie, 2018). Literasi akan mampu membentuk suatu masyarakat yang keritis dan membentuk masyarakat berpengetahuan (The Literacy and Numeracy, 2009). Literasi melibatkan interpretasi atau bagaimana konsepsi seseorang terhadap hal yang telah dibacanya, dilihatnya maupun didengarnya dan literasi pun melibatkan kolaborasi antara pemberi informasi

dan penerima informasi sehingga sebuah informasi dapat diterima sebagaimana mestinya dan dapat diinterpretasikan oleh penerima. Bahkan, literasi akan melihat pemecahan masalah dimana hal ini merupakan sebuah upaya untuk mempertimbangkan berbagai informasi yang diterima untuk dapat diambil kesimpulan (Kern, 2000).

Literasi pariwisata halal, berdasarkan kepada pengertian di atas, bisa dipahami sebagai sebuah upaya untuk mempertimbangkan berbagai informasi baik dari pihak pemberi informasi (ahli/pakar pariwisata halal) kepada pihak yang menerima informasi (masyarakat umum) tentang pariwisata halal sebagai obyeknya. Keseimbangan tiga komponen tersebut menjadi fondasi dasar bagi literasi pariwisata halal Indonesia. Bagi penyelenggara dan pengusaha bidang pariwisata halal tentu hal ini akan membantu dalam mengkonsep desain produk pariwisata halal yang lebih baik dan menarik tanpa harus bertentangan dengan nilai-nilai Syariah. Sedangkan bagi pengguna (konsumen), yaitu wisatawan atau masyarakat yang akan berwisata, mereka dapat membantu meyakinkan bahwa destinasi pariwisata halal itu sangat penting dan bermanfaat.

Literasi pariwisata halal dengan demikian sangat penting dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan dunia pariwisata halal Indonesia. Melalui program literasi wisata halal ini maka pengetahuan yang baik dan memadai tentang konsep pariwisata halal Indonesia dapat dibangun; melalui program ini pula maka pengelola wisata tidak sekedar bisa menjelaskan apa itu wisata halal, akan tetapi juga sekaligus



memberikan kepercayaan kepada masyarakat Indonesia dan Mancanegara untuk menikmati dan mengembangkannya. Melalui literasi yang baik, maka kesalahan pemahaman bahwa pariwisata halal itu seakan-akan meng-Islamkan atau meng-Arabkan daerah wisata tersebut bisa diatasi. Karena itu memang diperlukan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta agen-agen yang memiliki kepedulian untuk mengembangkan pariwisata halal di tingkat lokal, nasional dan internasional.

Literasi pariwisata halal dibutuhkan untuk mempermudah dan saling melengkapi informasi yang valid baik dari pihak wisatawan sebagai pengguna maupun para penyelenggara, para pebisnis dan stakeholder lainnya. Melalui literasi ini, pengetahuan, tujuan pariwisata halal tingkat global dan lokal, lokasi destinasi wisata halal, fasilitas-fasilitas pariwisata halal dan sebagainya yang berkaitan dengan konsep pariwisata halal dapat dilacak dan dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan wisata halal.

Memperkenalkan wisatawan dan para penyelenggara pariwisata halal juga sangatlah penting. Hal ini terkait dengan perkembangan pariwisata halal di Indonesia. Lembaga terkait seperti Kementrian Pariwisata RI, Dinas Pariwisata Daerah, bagian promosi, DSN-MUI, Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI) dan pihak-pihak lainnya yang peduli dalam mengembangkan industri pariwisata halal memiliki tugas cukup berat. Memperkenalkan literasi pariwisata halal bukan semata kepentingan bisnis tetapi lebih dari itu ada nilai-nilai dakwah yang disampaikan kepada masyarakat.

Semua ini diinformasikan kepada wisatawan domestik maupun Mancanegara yang ada di Indonesia dengan harapan pengetahuan mereka semakin sempurna dan pariwisata halal Indonesia akan semakin berkembang lebih baik. Melalui literasi wisata, maka wisatawan akan lebih familiar terhadap perilaku, budaya dan praktek kehidupan halal life style. Dengan program literasi ini juga maka masyarakat dan wisatawan Mancanegara menghormati tradisi ajaran Islam Indonesia yang penuh dengan keramah-tamahan dan mereka, apapun agamanya, memperoleh kenyamanan dan menilai bahwa pariwisata halal Indonesia sesuai dengan gaya hidup sehat. Dengan cara ini maka informasi yang salah dan buruk tentang wisata halal bisa terjawab secara kongkrit.

Informasi keindahan dan keunikan tentang destinasi yang ramah dan bersih di Indonesia harus terus diperhatikan dan dikelola dengan baik. Berkembangnya teknologi di era 4.0 adalah nilai positif yang harus dimanfaatkan. Bagaimana pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan pariwisata halal menguasai teknologi informasi yang mumpuni. Kecepatan dalam menginput destinasi halal Indonesia dan mendesain informasi akan keindahan, keunikan dan keramah-tamahan pariwisata halal Indonesia adalah salah satu kunci pariwisata ini mampu menjangkau ke berbagai negara dan pelosok-pelosok wilayah Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan tim yang solid dan kerjasama yang baik dalam mengelola literasi pariwisata halal ini.

Sebuah penelitian yang telah diterbitkan di *Jurnal Ilmiah Manajemen EMOR (Ekonomi Manajemen Orientasi Riset)*



hasil kerja Nurul Ma'rifah dkk, menunjukkan tingkat literasi wisatawan domestik yang mencapai 56,5% menggambarkan bahwa sebagian besar wisatawan domestik memberikan respon positif tentang pariwisata halal. Pariwisata halal adalah konsep yang terbuka untuk umum tidak membedakan agama apupun yang datang ke destinasi wisata halal. Mereka sudah memiliki pengetahuan mengenai pariwisata halal dan mengatakan bahwa pariwisata halal akan mampu memberikan berbagai manfaat dan memperkuat pariwisata nasional. (Nurul Ma'rifah dkk, 2020: 16-31).

Penelitian selanjutnya yang dimuat pada "Proceedings Books (2017) saat International Halal Tourism Congress ke-1 di Turkey" tentang literasi marketing. Di hasil penelitian tersebut disebutkan keunikan dan kearifan lokal di Lombok NTB dan Sumatera Barat antara lain karena adanya sumber wisata kuliner halal yang terkenal. Menurut peneliti dan wisatawan dari luar negeri bahwa Wisata Halal Lombok sangat ideal dan paling cocok untuk bulan madu, perjalanan petualangan dan wisatawan individu yang mencari keindahan alam gratis seperti pantai dan pegunungan. Wisata halal Lombok kuat dengan daya tarik pantai dan dataran tinggi dan pegunungannya. Oleh karena itu, destinasi ini paling cocok untuk pasangan menikah muda, atau cocok bagi remaja untuk mencari perjalanan petualangan dan atau pecinta alam, karena Lombok menawarkan pantai dan daerah pegunungan terbaik. Sementara Sumatera Barat sangat ideal dan paling cocok untuk perjalanan keluarga, pencari kuliner dan kunjungan budaya. Kuliner Sumatera Barat adalah salah

satu favorit Indonesia. Makanan Sumatera Barat diterima dengan baik dan dinikmati oleh sebagian besar orang Indonesia dari daerah yang bukan berasal dari Sumatera Barat. Kuliner halal menjadi salah satu hal yang populer saat bepergian di Sumatera Barat. Oleh karena itu, target pasar untuk pariwisata halal Sumatera Barat adalah orang-orang dewasa atau mereka yang suka mencari variasi seni dan budaya, pencari kuliner dengan kehidupan kemapanan yang Islami (Bastaman, 2017: 1319). Artinya bagaimana pengemasan literasi pariwisata halal Indonesia, masing-masing wilayah memiliki kekhasannya sendiri. Ketertarikan wisatawan mancanegara terhadap produk halal yang dimiliki adalah basis dasar bahwa Indonesia layak untuk menjadi pusat pariwisata halal dunia.

Contoh literasi wisatawan domestik dan mancanegara di atas menunjukkan bahwa pariwisata halal Indonesia menurut mereka adalah sangat menakjubkan. Artinya jika literasi pariwisata halal semakin berkembang dan didapatkan oleh semua pihak terutama wisatawan dan para stakeholder, maka wisata halal akan berkembang. Dapat diprediksikan bahwa perkembangan dan kemajuan Indonesia sebagai pusat pariwisata halal dunia benar-benar akan terjadi. Dengan kata lain literasi pariwisata halal adalah bagian dari strategi dalam pengembangan pariwisata halal baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Begitupula secara budaya masyarakat Indonesia sebenarnya banyak yang meahami hidup halal yang sesuai dengan ajaran agama. Namun yang perlu dikerjakan secara maksimal adalah penyampaian konsep pariwisata halal



secara tersistem dan terencana. Begitupula pengemasan pariwisata halal yang ramah tamah ala Indonesia juga harus terus diperkenalkan sebagai bagian dari literasi kuat bagi bangsa Indonesia.

## F. PERAN BANK INDONESIA, KNKS DAN BANK SYARIAH

Beberapa pendukung dalam pengembangan pariwisata halal di atas adalah bagian yang memiliki fungsi-fungsi tersendiri dalam pengembangan pariwisata halal Indonesia dan saling berkaitan. Ada yang tidak kalah pentingnya dengan pendukung di atas adalah lembaga keuangan negara. Keberadaan lembaga keuangan sangat penting untuk memainkan peran dalam pengembangan pariwisata halal yang antara lain meliputi investasi, permodalan dan lain sebagainya. Di bawah ini, uraian terkait dengan beberapa peran lembaga yang terkait dengan keuangan.

### 1. Peran Bank Indonesia

Pengembangan wisata halal sejalan dengan komitmen pemerintah menjadikan pariwisata sebagai sektor utama pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Anang Sutono, staf ahli Menteri Pariwisata Bidang Ekonomi dan Kawasan Kreatif, Kementerian Pariwisata. Untuk itu, pemerintah bersama Bank Indonesia dan pemangku kepentingan terkait lainnya, telah menyusun strategi pengembangan industri pariwisata halal Indonesia. (<https://www.bi.go.id/id/ruang->

[media/info-terbaru/Pages/Wisata-Halal-Penggerak-Utama-Industri-Halal-Indonesia.aspx](https://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Wisata-Halal-Penggerak-Utama-Industri-Halal-Indonesia.aspx))

Pariwisata halal tidak dapat berdiri sendiri karena telah menjadi bagian dari keseluruhan industri halal, yang juga mencakup sektor finansial dan pembiayaan. Untuk itu, sangatlah penting dijalin kerjasama Indonesia dengan berbagai negara, pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mendorong pengembangan wisata halal. Kerja sama juga perlu dilakukan dengan pemangku kepentingan di daerah-daerah wisata halal.

Gambar 21.  
Peran Bank Indonesia



Bank Indonesia (BI) mendorong agar negara bisa menjadi pemain utama dalam sektor industri halal khususnya pariwisata halal. Agar pariwisata halal tersebut bisa diterima oleh seluruh masyarakat lintas agama, Bank Sentral memberi



penekanan bahwa halal pada kata pariwisata memiliki makna sehat dan dibutuhkan oleh semua umat. Dalam rangka mendukung kebijakan industri halal termasuk pariwisata halal di Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, pada acara konferensi INHALIFE dengan tema “Creating Halal Champions Accessing to The Global Halal Markets: “From Potency to Reality”, menyampaikan lima jurus untuk mendorong industri halal yang didalamnya termasuk industri pariwisata halal di Indonesia. Kelima jurus tersebut adalah Competitiveness (daya saing), Certification (sertifikasi), Coordination (koordinasi), Campaign (publikasi) dan Cooperation (kerja sama). (Departemen Komunikasi, Gubernur BI Berikan 5 Jurus Dorong Industri Halal, 14-11-2019)

Implementasi lima strategi tersebut dapat menjadi kunci untuk menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai pasar dalam pariwisata halal tetapi juga sebagai basis produksi industri pariwisata halal global. Gubernur Bank Indonesia menyampaikan bahwa Competitiveness (daya saing) dapat dilakukan melalui pemetaan sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan, seperti sektor makanan dan minuman, fashion, wisata, dan ekonomi digital. Sementara itu, Certification (sertifikasi) diperlukan untuk memperluas akses pasar. Oleh karena itu, para pengambil kebijakan dan pelaku industri pariwisata halal perlu bersama mendorong agar barang dan jasa yang dihasilkan memperoleh sertifikasi halal. Coordination (koordinasi) dan sinergi kebijakan dan program antara pemerintah. Campaign (Promosi) diperlukan

untuk memperkenalkan kepada publik bahwa pariwisata halal bersifat universal, tidak hanya untuk wisatawan Muslim, namun juga untuk non Muslim. Dan yang terakhir, Cooperation (kerja sama) antara pemangku kepentingan industri pariwisata halal nasional dan internasional adalah prasyarat untuk membangun dan mengembangkan industri pariwisata halal global.

## **2. Peran KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah)**

Indonesia merupakan negara yang memiliki institusi keuangan Syariah terbanyak di dunia. KNKS hadir sebagai katalisator dalam upaya mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Ketahanan ekonomi dan keuangan nasional dewasa juga memiliki ketertergantungan kepada perkembangan pariwisata halal. Lalu bagaimana peran KNKS dalam mendukung industri yang masih baru tersebut?

Mengacu pada Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, penguatan rantai nilai halal merupakan bagian dari strategi utama dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri, makmur, dan madani serta menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi Syariah terkemuka dunia. KNKS sebagai mediator dan katalisator dari seluruh kegiatan ekonomi Syariah berkomitmen untuk mendukung realisasi penguatan rantai nilai halal tersebut melalui inisiatif-inisiatif strategis, yang salah satunya adalah pengembangan pariwisata halal. KNKS, melalui Direktorat Pengembangan Ekonomi Syariah



dan Industri Halal, memiliki inisiatif program yaitu strategi nasional pengembangan industri halal yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain utama regional dan global dalam hal perdagangan maupun produksi. Inisiatif program ini merupakan upaya pemetaan klaster industri halal melalui kajian dan analisis yang mencakup tinjauan aspek ekonomi dan preferensi konsumen. Diharapkan, keluaran dari program ini ialah strategi baik berupa rekomendasi kebijakan maupun insentif yang dapat menarik para pelaku industri dan investor untuk berpartisipasi dan berinvestasi dalam mengembangkan pariwisata halal. Tidak hanya itu, melalui survei preferensi konsumen, akan lahirnya strategi yang dapat mendorong pertumbuhan permintaan lokal terhadap produk pariwisata halal dalam negeri.

Berkaitan dengan upaya pengembangan pariwisata halal, ketersediaan fasilitas pendukung diperlukan untuk mempermudah pelaku industri selama proses produksi produk halal. Fasilitas tersebut bisa dalam bentuk kemudahan koordinasi dan perizinan dengan menggunakan integrasi sistem *Online Single Submission*, percepatan dan kemudahan proses sertifikasi halal, akses langsung ke pelabuhan, dan sebagainya. Selain itu, bagi investor dan pelaku industri, pemerintah dapat memberikan insentif pajak untuk mendorong pertumbuhan pariwisata halal dalam kawasan tertentu dan menarik partisipasi para pelaku industri di dalam kawasan tersebut.

Strategi-strategi di atas dapat membantu percepatan pembangunan kawasan pariwisata halal Indonesia yang

sudah dicanangkan pemerintah. Dengan adanya kawasan ini, diharapkan industri wisata halal dapat berkontribusi bagi peningkatan pertumbuhan PDB Indonesia, dan membuat Indonesia menjadi role model pariwisata halal di dunia.

Gambar 22.  
Peran Peran KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah)



### 3. Peran Bank Syariah

Salah satu peran dari Bank Syariah adalah bersinergi untuk mendukung pembiayaan dan menghimpun dana pihak ketiga (DPK). Peran Bank Syariah bisa dilakukan, misalnya, dalam pembangunan perhotelan halal, travel Islami, makanan dan minuman halal. Bahkan Bank Syariah sebetulnya mampu menjadi lokomotif industri keuangan dalam prinsip Islam. Karena itu, bank syariah dituntut untuk mampu memberikan penawaran produk-produk khusus dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di sektor pariwisata halal di Indonesia.



Sejalan dengan itu, sosialisasi Bank Syariah dalam mendukung pariwisata halal kepada para pelaku industri dengan cara memberikan fasilitas yang memadai di berbagai kota wisata, seperti akses kantor dan ATM untuk menunjang kebutuhan keuangan wisatawan sangatlah diperlukan. Tidak saja memberikan fasilitas ATM di lokasi pariwisata halal, bank syariah lebih dari itu mampu memerikan pembiayaan syariah bagi para pelaku industri pariwisata halal. Sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI tentang ketentuan hotel syariah pada pedoman pariwisata bahwa Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanannya.

Fatwa tersebut memberikan kesempatan kepada lembaga keuangan syariah dalam hal ini bank syariah berperan aktif memberikan kemudahan bagi industri pariwisata halal. Bisa juga bank syariah melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan mikro syariah yang berada di lokasi pariwisata halal, hal ini dilakukan dalam rangka memperkuat lembaga keuangan mikro tersebut, sehingga industri pariwisata halal mendapatkan kemudahan dalam menjalankan usahanya.

Berdasarkan hasil kerjasama antara bank syariah dan para klayennya, maka dapat pula kerjasama memberikan kekuatan pada bank syariah. Sebagaimana sumber pembiayaan dan pendanaan yang bersumber dari bank syariah dapat menambah pasar bagi bank syariah sehingga kedua hubungan ini saling berperan secara masing-masing dalam pengembangan dan penguatan yang lebih optimal.

## Bab VI

# REFLEKSI

**K**onsep dasar pariwisata halal pada awalnya hanya sebatas memberikan pelayanan, fasilitas yang sesuai dengan karakter dan budaya Islam kepada turis-turis Muslim. Namun pada perkembangannya, budaya orang Islam terutama terkait dengan mengkonsumsi makanan dan minuman halal semula hanya dikonsumsi orang Muslim, kemudian makanan dan minuman tersebut boleh dikonsumsi oleh siapapun. Hal ini terkait substansi makanan dan minum halal adalah bersih dan higienis. Begitupula budaya Islam yang penuh dengan keramahmatan dengan siapapun dalam menerima tamu adalah bagian dari usaha



dalam bidang jasa yang dapat diterapkan dalam melayani semua wisatawan tanpa membedakan agama, suku dan negaranya. Pada akhirnya budaya-budaya tersebut bukan saja untuk umat Islam semata, umat beragama lain pun diperkenankan untuk menikmatinya. Wisata halal sangat menarik perhatian negara-negara Muslim dan Non-Muslim dan ini merupakan peluang besar untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanannya. Dari wisata halal ini maka produk-produk halal lainnya perlu disiapkan. Diantara produk-produk itu ialah obat-obatan, fesyen, rekreasi yang ramah. Wisata Halal menciptakan sistem produksi halal yang antara satu dengan lainnya saling terkait kuat.

Banyak ayat al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Saw. menganjurkan umatnya untuk melakukan wisata (perjalanan), meneliti ayat-ayat Kauniyah, tadabbur alam ke berbagai daerah dan negara dengan tujuan utamanya adalah agar mereka mampu mendekatkan diri kepada Allah Swt. Para tokoh Muslim dari generasi awal sahabat hingga para pendakwah Islam di Indonesia adalah travellers of Muslim ulung yang berkeliling dari satu kota ke kota lain, dari satu desa ke desa lain, dari satu lembah ke lembah lain, dan dari satu negeri ke negeri lain. Semula mereka melakukan perjalanan dengan tujuan awalnya wisata religi (ziarah ke Baitullah dan Makam Nabi Muhammad Saw). Kemudian perjalanan para pelancong Muslim tersebut menyebar ke berbagai belahan dunia. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Khardzabah, Ibnu Jubair dan Ibnu Bathutah adalah sumber inspirasi bagi para traveller atau wisatawan era berikutnya baik di Barat maupun di Timur. Hingga saat ini, seiring dengan berkembangnya

zaman dan teknologi, wisata dalam bentuk perjalanan tersebut berkembang menjadi ilmu pariwisata modern.

Pariwisata halal adalah bagian dari sejarah wisata yang pernah dilakukan oleh tokoh pelancong Muslim yang tetap mempertahankan kebiasaan dan budayanya selama masa perjalanan. Gambaran ini adalah landasan dasar dalam penerapan dan pengembangan pariwisata halal, termasuk pariwisata halal di Indonesia. Namun yang membedakan pariwisata halal di Indonesia dengan negara-negara lain adalah kearifan lokal dari mulai alam, budaya, sosial masyarakat Islam yang toleran dan pelayanan prima bagi wisatawan.

Keberadaan alam Indonesia yang luar biasa indah, budaya yang beragam dan masyarakat Muslim toleran adalah sumber utama kearifan lokal pariwisata halal yang selama ini mendominasi obyek-obyek wisata Indonesia. Lima destinasi paling dirindukan selama Pandemi Covid-19, Indonesia termasuk dari lima negara dengan obyek wisata yang sangat dirindukan oleh para turis. Kepulauan Gili di Lombok, NTB, terpilih sebagai "Top Five Most Missed Islands" atau pulau yang paling dirindukan oleh orang-orang di seluruh dunia. Pulau Bali juga menjadi salah satu dari "Top Five Most Missed Islands". Ketenaran pariwisata Indonesia di atas adalah bentuk pengembangan kearifan lokal yang dimiliki oleh setiap wilayah masing-masing di Indonesia. Indonesia memiliki keindahan alam yang luar biasa, pantai-pantai yang masih asli, lebih dari 17 ribu pulau, pegunungan, hutan tropis, situs-situs kerajaan Islam dan ribuan masjid yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Belum lagi kekayaan budaya (tari, lagu, adat dan lain-lain) dari ribuan suku yang



ada. Tidak kalah menariknya adalah kekayaan kuliner yang amat beragam dan luar biasa. Keramahtamahan (santun) bangsa Indonesia, dan suasana religius yang sangat terasa di berbagai wilayah juga menjadi kekuatan bagi wisata halal. Dengan semua kekayaan tersebut, Indonesia sangat layak menjadi destinasi halal utama bagi para traveller of Muslim dari berbagai negara.

Wisata halal kini menjadi gelombang besar dunia. Wisata halal menjadi tren global. Jumlah turis Muslim tahun 2016 mencapai 121 juta orang, dan akan mencapai 230 juta jiwa pada tahun 2026. Jumlah belanja turis Muslim tahun 2020 mencapai 220 miliar dolar AS dan akan menembus 300 miliar dolar AS pada tahun 2026. Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk memajukan industri pariwisata halal nasional. Dari mulai penyediaan fasilitas umum, fasilitas khusus, fasilitas ibadah yang sangat layak dan penyediaan produk-produk makanan-minuman halal, hotel dan tempat penginapan yang bersertifikasi halal. Hal ini melibatkan para stakeholders terkait, seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), MUI, Bank Indonesia, Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dan asosiasi industri halal lainnya yang saling terkait. Lembaga-lembaga tersebut saling bersinergi dengan pihak pemerintah dan masyarakat dalam memajukan, mengembangkan dan mengenalkan pariwisata halal Indonesia menuju pusat pariwisata halal dunia.

## DAFTAR REFERENSI

### BUKU

- Abadi, Priyadi, *Muslim Traveller Solutions*, (Jakarta: Almarwardi Prima, 2016)
- Ahmad, Ramadhon Ahmad. *al-Riblah wa al-Ribālatu al-Muslimūn*, (Jeddah: Dār al-Bayān al-‘arabī, tth)
- Baqy, Muhammad Fuad Abdul, *Mu’jam al-Mufahris li Al-fāz al-Quran*, (Maktabah Islāmīyah: Istanbul, Turki, 1984 M)
- Djakfar, Muhammad, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, edisi revisi (Malang: UIN-Maliki Press, 2016)



- \_\_\_\_\_, Muhammad. "Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi: Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal di Indonesia." (2017)
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)
- Islamic Tourism Center (ITC) Malaysia, CrescentRating, Shaza Hotels, COMCEC, (The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of the Islamic Cooperation), Tripfez dan Artikel-artikel di berbagai Media
- Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024
- MINTEL, GNPD. "Global New Products Database." (2005).
- Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan. "Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024." *Desember. BAPPENAS: Jakarta* (2018)
- Nicolaidis, Angelo. "Ethical leadership in a morally driven hospitality organisational culture." (2019)
- Shihab, M. Qurais, *Tafsir al-Misbab: Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), Vol. 15
- Sofyan, Riyanto, and M. B. A. Riyanto. "Prospek bisnis pariwisata syariah." *Jakarta: Republika* (2012)
- Sucipto, Hery dan Fitria Andayani. *Wisata syariah: karakter, potensi, prospek, dan tantangannya*. Grafindo Books Media & Wisata Syariah Consulting, 2014
- Syakir, Ahmad, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), j. 6
- UNWTO, Tourism Organisation. "Tourism Highlights, 2014 edition." *World* (2014).

UNWTO Tourism Highlights. "Edition. 2018. World Tourism Organization UNWTO. *Publications*. URL: <http://mkt.unwto.org/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights11enbr.pdf>

del Turisme, Organització Mundial, ed. Contribution of Islamic Culture and Its Impact on the Asian Tourism Market. World Tourism Organization, 2017.

World Travel and Tourism Council (WTTC). "Economic impact and Trand." (2019).

## JURNAL

- Agustina, A. H., Afriadi, R. D., Pratama, C., & Lestari, A. 2019. Platform Halal Lifestyle dengan Aplikasi Konsep One Stop Solution. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1)
- al-Hamarneh, Ala. "The Emerging Islamic Tourism Global Market: Rethinking The Concepts, Challenging the Practices." *Jerman: di Center for Research on the Arab World pada Institut Of Geography Mainz University* (2011).
- Bahār Aḥmad Jāsīm al-Sāmīrāī, al-Aswāq al-Tijāriyyah fi Rihlah ibn Jabīr, *Majallah Diyālī lilbuḥwat al-Insāniyyah* 59, 2013
- al-Raghib Asfahani. *al-Mu'jam Mufradat Alfadz Al-Qur'an / Al-Raghib Al-Asfahani*, (Dār Fikr, Beirut, 1989 M)
- Bastaman, Aam. "Marketing of halal tourism based on local wisdom and uniqueness (a comparative study at west Sumatra and Lombok Island Indonesia halal destinations)." *PROCEEDINGS BOOKS* (2017)



- Battour, M., Battor, M., dan Bhatti, M. A. (2013). Islamic attributes of destination: Construct development and measurement validation, and their impact on tourist satisfaction. *International Journal of Tourism Research*, 16(6)
- Battour, M., Ismail, M. N., dan Battor, M. (2011). The impact of destination attributes on Muslim tourist's choice. *International Journal of Tourism Research*, 13(6)
- Carboni, Michele, Carlo Perelli, and Giovanni Sistu. "Is Islamic tourism a viable option for Tunisian tourism? Insights from Djerba." *Tourism Management Perspectives* 11 (2014)
- Damayantie, Augustia Rahma. "Literasi dari Era ke Era." *Sasindo* 3.1 (2018).
- del Turisme, Organització Mundial, ed. *Contribution of Islamic Culture and Its Impact on the Asian Tourism Market*. World Tourism Organization, 2017.
- Din, Kadir H. "Islam and tourism: Patterns, issues, and options." *Annals of tourism research* 16.4 (1989)
- Farahani H Zamani. dan Henderson, J. C. (2009). Islamic tourism and managing tourism development in Islamic societies: The cases of Iran and Saudi Arabia. *International Journal of Tourism Research*, 12(1).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.108/DSNMUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah
- Haerisma, Alvien Septian. "Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia Tinjauan Etika Bisnis Islam." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3.2 (2018): 153-168
- Hassan A. R. (2004). Islamic tourism: The concept and the reality. *Islamic Tourism*, 14, 2.
- Hassan, Siti Hasnah, Siti Rohaida Mohamed Zainal, and Osman Mohamed. "Determinants of destination knowledge acquisition in religious tourism: Perspective of Umrah travelers." *International Journal of Marketing Studies* 7.3 (2015)
- Iflah, Iflah, and Kinkin Yuliaty Subarsa Putri. "Wisata Halal Muslim Milenial." *Jurnal Common* 3.2 (2019)
- Jaelani, Aan. "Halal tourism industry in Indonesia: Potential and prospects." *International Review of management and Marketing* 7.3 (2017).
- Kasriel-Alexander, Daphne. *Top 10 global consumer trends for 2015*. Euromonitor International, 2016.
- Kern, R. *Literacy and Language Teaching*. Oxford: Oxford University Press (2000).
- M. G. Korres, "The role of innovation activities in tourism regional growth in Europe, tourisms," *An International Multidisciplinary Journal of Tourism*, vol. 3, no. 1, pp. 135-152, 2008.
- Ma'rifah, Aula Nurul, M. Nasor, And Erike Anggraeni. "Tingkat Literasi Pariwisata Halal Dan Keputusan Berwisata Pada Wisata Halal (Studi Pada Wisatawan Domestik di Indonesia)." *Jurnal Ilmiah Manajemen Emor (Ekonomi Manajemen Orientasi Riset)* 4.1 (2020)
- Masduki, Anwar. "Ziarah Wali di Indonesia dalam Perspektif Pilgrime Studies." *Religió: Jurnal Studi Agama-agama* 5.2 (2015)
- Mastercard & HalalTrip. *Muslim Millennial Travel Report 2017*. Singapore: Mastercard & HalalTrip (2017)



- Millatina, Afifah Nur, et al. "Peran Pemerintah Untuk Menumbuhkan Potensi Pembangunan Pariwisata Halal Di Indonesia." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia* 5.1 (2019)
- Muhammad Dzikri Abadi, "Model Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Community Based Tourism (CBT) Perspektif Ekonomi Islam, Studi Kasus Kampong Wisata Warna-Warni Jodipan Malang", Thesis, (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018)
- Pamukçu, Res Assist Huseyin. "International Halal Tourism Congress." (2017)
- Paraskevas, Alexandros, et al. "Crisis knowledge in tourism: Types, flows and governance." *Annals of Tourism Research* 41 (2013)
- Pendidikan, Kementerian, et al. "Arkeologi Makam Sultan Muhammad Ali Ternate, Maluku Utara M. Mudjib Ali Perempuan Dan Tradisi Ziarah Makam Amilda Sani Penggunaan dalam Perekaman Data Arkeologi di Indonesia."
- Presentasisebagai pembicara dalam Award Forum Travel Partner Indonesia (FTPI) di Jakarta Pusat, Jumat (19/5/2017).
- Puangniyom, Piyachat, Nantawan Swangcheng, and Tosaporn Mahamud. "Halal tourism strategy to promote sustainable culture tourism in Thailand." *International conference on studies in Arta, Social Science and Humanities, January*. 2017.
- Selvi, Yuliana, Kasmita Kasmita, and Pasaribu Pasaribu. "Potensi Makam Syech Burhanuddin Sebagai Obyek Wisata Ziarah Di Kabupaten Padang Pariaman." *E-Journal Home Economic and Tourism* 15.2 (2017).

- Shakiry, Abdul Sahib. "Tourism Halal imposing themselves little by little." *Islamic Tourism Media* (2008).
- Sidharta, Raden Bagus Faizal Irany. "Optimalisasi Peran Perbankan Syariah Dalam Mendukung Wisata Halal." *Jurnal Distribusi* 5.2 (2018): 1-14.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius, Flores Tanjung, and Rosramadhana Nasution. *Sejarah pariwisata: menuju perkembangan pariwisata Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- UU RI No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- Violita, E. S., & Handarbeni, G. Analisis Efektivitas dan Tinjauan Audit Syariah Dalam Pelaksanaan dan Pengawasan Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah. *Jurnal Riset Bisnis*, 1(1) (2017)
- Wuryasti, Fetri. "Wisata halal, Konsep Baru Kegiatan Wisata di Indonesia." (2013)
- Zamani Farahani, Hamira, and Joan C. Henderson. "Islamic tourism and managing tourism development in Islamic societies: the cases of Iran and Saudi Arabia." *International journal of tourism research* 12.1 (2010)

## INTERNET

- <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/islamic-clothing-market>
- [www.isrinur.com](http://www.isrinur.com)
- <https://republika.co.id/berita/o9slbr374/iitcf-berkomitmen-tingkatkan-sdm-travel-muslim>
- <http://www.pewresearch.org>



<http://www.suarantb.com/news/2016/12/08/16667/lombok.kembali.raih.tiga.juara.dalam.ajang.world.halal.tourism.awards.2016>

<https://travel.tempo.co/read/1218812/pemerintah-siapkan-pedoman-wisata-halal-apa-yang-diperhatikan/full&view=ok>

<https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/po03tc368/wisata-halal-dinilai-perlu-dijadikan-prodi-perkuliahan>

<https://lampung.antaraneews.com/berita/373039/pphi-minta-masyarakat-terus-perkuat-literasi-wisata-halal>

<https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/VNx791yK-membangun-konsep-wisata-halal-berbasis-komunitas>

<http://www.disbudpar.ntbprov.go.id/tag/islamic-center-mataram/>

<https://www.acehtrend.com/2019/04/28/catat-ini-agenda-festival-ramadan-di-aceh/>

[https://www.spiresearch.com/wp-content/uploads/2019/07/Journal-Q2-2019-Summer-issue\\_Fashion\\_Industry\\_wakes\\_up\\_to\\_Modest-Wear.pdf](https://www.spiresearch.com/wp-content/uploads/2019/07/Journal-Q2-2019-Summer-issue_Fashion_Industry_wakes_up_to_Modest-Wear.pdf)

<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/19/06/30/ptwhaj383-pphi-wisata-halal-bukan-arabisasi-atau-islamisasi>

# GLOSARIUM

**ASITA**, Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies

**BPJPH**, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

**brand internasional**, branding/merk internasional

**Destinasi wisata**, Obyek wisata/tujuan wisata

**Destinasi wisata Syariah**, kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah

**DSN-MUI**, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia



**Family Friendly Tourism**, pariwisata ramah untuk keluarga fesyen Muslim, mode orang Muslim. Gaya berpakaian yang populer dalam suatu budaya. Secara umum, mode termasuk masakan, bahasa, seni, dan arsitektur.

**GMTI**, Global Muslim Travel Index, merupakan indeks paling komprehensif mengukur kualitas dan kuantitas wisata halal di berbagai negara

**halal central commercial facility**, fasilitas komersial pusat halal

**halal cultural facilities**, fasilitas-fasilitas budaya halal

**halal educational facility**, fasilitas pendidikan halal

**halal food**, makanan halal

**halal lifestyle**, gaya hidup halal disemua kehidupan yang tidak hanya terhadap makanan saja, tetapi juga fashion, keuangan, wisata, kesehatan dan yang lainnya

**halal park**, taman halal (taman yang nyaman)

**halal residential facility**, fasilitas perumahan halal (perumahan yang nyaman)

**halal tourism**, pariwisata halal

**HPI**, Himpunan Pramuwisata Indonesia

**ICMI**, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia

**IHLC**, Indonesia Halal Lifestyle Center

**IITCF**, Indonesian Islamic Travel Communication Forum

**industri**, kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin

**Indutri halal**, merupakan kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan yang diizinkan/dibolehkan oleh syariah Islam

**ISEF**, Indonesia Sharia Economic Festival (festifal ekonomi syariah Indonesia)

**Islamic tourism**, pariwisata yang Islami

**Islamofobia**, istilah kontroversial yang merujuk pada prasangka dan diskriminasi pada Islam dan Muslim

**Kemenperin**, Kementerian Perindustrian

**Keraton**, daerah tempat seorang penguasa (raja atau ratu) memerintah atau tempat tinggalnya (istana). Dalam pengertian sehari-hari, keraton sering merujuk pada istana penguasa di Nusantara

**Khifzdu bil'ah**, menjaga alam/menlestarikan alam

**KNKS**, Komite Nasional Keuangan Syariah

**Kuliner Halal**, makanan-minuman khas daerah yang halal dan tayyib

**Literasi**, sebuah peristiwa sosial yang melibatkan keterampilan tertentu guna menyampaikan suatu informasi maupun untuk mendapatkan suatu informasi dalam bentuk tulisan.

**literasi pariwisata halal**, sebuah upaya untuk mempertimbangkan berbagai informasi baik dari pihak pemberi informasi (ahli/pakar pariwisata halal) kepada pihak yang menerima informasi (masyarakat umum) tentang pariwisata halal sebagai obyeknya

**LPPOM MUI**, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia adalah



lembaga yang bertugas kuat untuk meneliti, mengkaji, menganalisis dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan produk kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi pengajaran agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Muslim khususnya di wilayah Indonesia

**LSU**, Lembaga Sertifikasi Usaha

**Makam Wali**, Bangunan kuburan penyebar Islam di Indonesia (kuburan orang-orang shaleh)

**MES**, Masyarakat Ekonomi Syariah

**MICE**, Meetings, Incentives, Conferences and Events

**Muslim Friendly Tourism**, pariwisata ramah Muslim

**Muslim Milenial**, pariwisata Muslim untuk milenial

**OKI**, Organisasi Kerjasama Islam

**P3H**, Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal

**pariwisata halal**, kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syariah.

**Pariwisata syariah**, berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip syariah. Dapat disebut juga dengan istilah pariwisata Islami, perjalanan syariah, pariwisata halal, pariwisata yang ramah

**PDB**, Produk Domestik Bruto

**PHRI**, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia

**PPIH**, Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia

**RPJMN**, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

**Silaknas**, Silaturahmi Kerja Nasional

**State of the Gobal Islamic Economy Report**, Hasil laporan yang mendefinisikan dan memberikan pandangan menyeluruh tentang ekonomi Islam serta potensi masa depannya untuk memfasilitasi investasi dan pertumbuhan industri

**sustainable tourism**, pariwisata berkelanjutan

**thayyibat**, aneka ragam makanan atau sesuatu yang dapat dikonsumsi yang halal dan baik

**Traveller of Muslim**, para pelancong/wisatawan/ turis Muslim

**UMKM**, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

**UNWTO**, United Nations World Tourism Organization, salah satu badan dari PBB yang menangani masalah pariwisata. Markas besarnya berada di Madrid, Spanyol

**UU JPH**, Undang-undang Jaminan Produk Halal

**WHTA**, World Halal Travel Award

**Wonderful Halal Tourism**, icon/ logo pariwisata halal Indonesia yang menakjubkan

**World's Best Airline for Halal Travellers**, maskapai Penerbangan Terbaik Dunia untuk Pelancong Halal

**World's Best Airport for Halal Travellers**, Bandara Terbaik Dunia untuk wisatawan Halal



World's Best Family Friendly Hotel, Hotel Ramah Keluarga Terbaik Dunia

World's Best Hajj & Umrah Operator, Penyelenggara Haji & Umrah Terbaik Dunia

World's Best Halal Beach Resort, Resor Pantai Halal Terbaik Dunia

World's Best Halal Cultural Destination, Tujuan Budaya Halal Terbaik Dunia

World's Best Halal Honeymoon Destination, Tujuan Bulan Madu Halal Terbaik Dunia

World's Best Halal Tour Operator, Penyelenggara Tur Halal Terbaik Dunia

World's Best Halal Tourism Destination, Tujuan Wisata Halal Terbaik Dunia

World's Most Luxurious Family Friendly Hotel, Hotel Ramah Keluarga Paling Mewah di Duni

WTTC, World Travel & Tourism Council

# DAFTAR INDEKS

## D

DSN-MUI 3, 37, 86, 98, 153

## F

filosofi 18, 21, 22

Filosofi 19, 21, 22

## G

GMTI 11, 44, 99, 102, 154

## H

halal lifestyle 1, 11, 12, 154

halal tourism 5, 100, 104, 106,  
147, 154

## I

Industri halal 11, 12, 84

## K

Kemenpar RI 5, 8, 20, 98

## M

Ma'ruf Amin 18

Muslim 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13,  
15, 20, 21, 24, 27, 28, 30, 31,  
33, 36, 44, 45, 83, 84, 94, 98,  
102, 104, 106, 141, 142, 144,  
145, 148, 149, 154, 155, 156,  
157

Muslim Friendly Tourism 5, 156

## O

OKI 1, 9, 10, 44, 156



**P**

pariwisata halal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10,  
12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30,  
31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 44,  
45, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89,  
90, 91, 94, 95, 96, 98, 100,  
101, 105, 139, 140, 141, 144,  
154, 155, 156, 157

pariwisata Islam 2, 3, 5

Pariwisata syariah 3, 4, 156

PDB 7, 8, 156

Perkumpulan Pariwisata Halal 20,  
157

produk-produk halal 11, 12

**R**

rihla 23, 24, 26, 78

**S**

SDM 39, 40, 88, 89, 90, 103

Sertifikasi 32, 100, 156

Sertifikat 38

syariah Islam 4, 19, 155

syariat Islam 3, 22

**T**

traveller 27, 142, 144

**W**

Wisata Islami 5

WTTC 8, 42, 45, 46, 147, 158





Anugerah Allah SWT berupa alam Indonesia yang indah dan menawan, budaya yang beragam, keunikan kuliner yang beraneka-macam dan mayoritas penduduk Muslim yang toleran adalah potensi dan sumber utama kearifan lokal pariwisata halal Indonesia. Pariwisata halal Indonesia kini menjadi daya tarik dan tujuan wisatawan domestik dan mancanegara. Tidaklah mengherankan jika sejak tahun 2015 sampai 2019 Indonesia selalu diperhitungkan oleh industri pariwisata dunia. industri pariwisata halal kini menjadi tren dan perbincangan di kalangan akademisi maupun masyarakat umum.

Eksistensi pariwisata halal Indonesia tentu menghadapi tantangan tersendiri dalam regulasi industrinya agar tetap sesuai dengan koridor syariah dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam rangka itulah MUI sebagai lembaga keagamaan yang mengayomi kehidupan keberagaman masyarakat muslim tampil dengan wajah *Washatiyyatul Islam yang rahmatan lil 'alamin* mengakomodir keberanekaragaman sosial budaya dan keagamaan dalam wajah pariwisata halal Indonesia.

Sumber daya manusia Indonesia yang mumpuni, dukungan fasilitas umum, fasilitas ibadah dan eksotisme daya tarik pariwisata halal yang unik dengan menampilkan kearifan lokal daerah wisata masing-masing serta penguatan Pemerintah dan MUI dalam kelembagaan industri pariwisata halal bisa mengantarkan pariwisata halal Indonesia menjadi barometer pariwisata halal dunia sehingga Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lainnya. Oleh karena itu mengunjungi dan berwisata ke Indonesia menjadi pilihan yang sulit dilewatkan lagi bagi wisatawan manapun.

Buku ini menjelaskan konsep pariwisata halal Indonesia yang penuh dengan kearifan lokal dan dalil-dalil syar'i yang mendukungnya baik secara argumentatif maupun teoritik serta memberikan contoh praktik pariwisata halal di lapangan. Kontribusi MUI sebagai lembaga sosial agama tentu memberikan banyak dukungan terhadap pariwisata halal dengan berbagai instrumennya dengan harapan Indonesia menjadi pusat pariwisata halal dunia. Tentu buku ini layak menjadi buku pegangan bagi para akademisi, pengusaha pariwisata, *traveller* bahkan para dai dan masyarakat umum agar menjadi sumber informasi dan pengenalan pariwisata halal yang aman, nyaman dan ramah bagi siapapun yang berwisata ke Indonesia.



ISBN: 978-602-6233-43-3



9 786026 213433 >

